



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### 1.b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah daerah. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

### **1.c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan
  - 1.a Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
  - 1.b Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
  - 1.c Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II   Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.a Ekonomi Makro;
  - 2.b Kebijakan Keuangan;
  - 2.c Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.a Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
  - 3.b Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV   Kebijakan Akuntansi
  - 4.a Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;
  - 4.b Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.c Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.d Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V   Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.a Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.b Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.c Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.d Penjelasan Laporan Operasional



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- 5.e Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.f Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.g Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.a. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang selama tahun 2019 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,43%, sedangkan inflasi selama tahun 2019 adalah sebesar 2,12%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,66%. Menurut perhitungan, pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Magelang memiliki PDRB per-kapita sebesar 25,18 juta rupiah. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2019 adalah sebagai berikut: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan sebesar Rp6.747.258,89 (20,77%), sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp1.449.936,34 juta (4,46%), sektor industri pengolahan sebesar Rp7.131.884,09 juta (21,95%), sektor pengadaan listrik dan gas menyumbangkan sebesar Rp16.397,24 juta (0,05%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah sebesar Rp25.814,64 juta (0,08%), sektor konstruksi sebesar Rp3.133.130,46 juta (9,64%), sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi sebesar Rp4.455.795,40 juta (13,71%), sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp1.119.983,35 juta (3,45%), sektor penyediaan akomodasi dan minum sebesar Rp1.379.383,03 juta (4,25%), sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp1.230.339,44 juta (3,79%), sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp896.648,50 juta (2,76%), sektor *real estate* sebesar Rp606.436,23 juta (1,87%), sektor jasa perusahaan sebesar Rp91.945,66 juta (0,28%), sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp1.098.363,84 juta (3,38%), sektor jasa pendidikan sebesar Rp2.086.414,39 juta (6,42%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp276.823,81 juta (0,85%), sektor jasa lainnya sebesar sebesar Rp744.247,19 juta (2,29%).

Data tingkat kemiskinan, angka pengangguran, Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta indeks Gini Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir dengan data sebagai berikut:

2.1. Tabel Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang 3 tahun terakhir

No	Tahun	Persentase %	Keterangan
1.	2017	12,42	
2.	2018	11,23	Turun 10% dari tahun sebelumnya
3.	2019	10,67	Turun 5% dari tahun sebelumnya



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2. Angka pengangguran selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sebagai berikut:

2.2. Tabel Angka Pengangguran 3 tahun terakhir

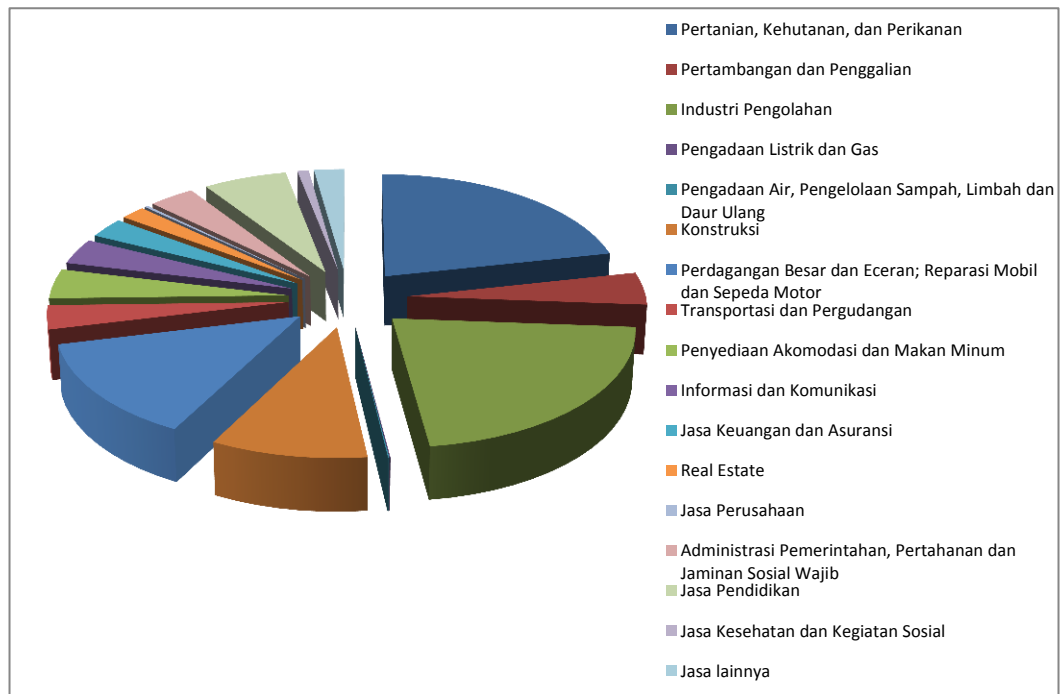
No	Tahun	Persentase %	Keterangan
1.	2017	2,44	
2.	2018	2,91	Naik 19% dari tahun sebelumnya
3.	2019	3,21	Naik 10% dari tahun sebelumnya

3. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sebagai berikut:

2.3. Tabel Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 3 tahun terakhir

No	Tahun	Persentase %	Keterangan
1.	2017	68,39	
2.	2018	69,11	Naik 0,72% dari tahun sebelumnya
3.	2019	69,87	Naik 76% dari tahun sebelumnya

4. Indeks Gini Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir hanya ditahun 2018 yang dapat menampilkan angka yaitu 0,344.



Gambar 1. Kontribusi masing-masing sektor pada PDRB



## **2.b. Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Selain kedua hal tersebut, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2019 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2019. APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

### **1) Arah Kebijakan Anggaran**

Dalam sistem anggaran kinerja arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran, disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

### **2) Kebijakan Anggaran Pendapatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain lain Pendapatan Daerah Yang sah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang



menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Selain itu pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD, pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah.

### 3) Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

### 4) Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## 2.c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

Tabel 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja

No	Program	Indikator Program
1	2	3
I	<b>Urusan Wajib</b>	
a.	<b>Pendidikan</b>	
	– Program Pendidikan Anak Usia Dini	– Meningkatnya jumlah PAUD
	– Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	– APK SD/MI, SMP/MTs
	– Program Pendidikan Non Formal	– Meningkatnya pemberantasan buta aksara



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	– Meningkatnya penetapan angka kredit jabatan guru
	– Program Pendidikan Tinggi	– Meningkatnya persentase penduduk yang menempuh pendidikan tinggi
	– Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	– Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna/LPP
	– Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	– Terlaksananya Pelatihan pemuda produktif bagi pemuda pengangguran
	– Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	– Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba
<b>b.</b>	<b>Kesehatan</b>	
	– Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	– Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dalam jumlah yang memadai
	– Program Upaya Kesehatan Masyarakat	– Jumlah Polindes yang meningkat
	– Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	– Meningkatnya prosentase pengembangan toga di masyarakat
	– Program Perbaikan Gizi Masyarakat	– Meningkatnya distribusi Kapsul Yodium, Vitamin A, Tablet Fe
	– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	– Menurunnya jumlah kasus penyakit menular
	– Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	– Pelayanan kesehatan sesuai standar dan peraturan
	– Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	– Cakupan kunjungan masyarakat miskin
	– Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	– Rehabilitasi puskesmas, RSUD Muntian, Gudang farmasi, incenerator.
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	– Kegiatan GSI berjalan lancar
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Lansia	– Terfasilitasinya kegiatan posyandu
	– Program Keluarga Berencana	– Meningkatnya peserta KB
<b>c.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	
	– Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	– Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pedesaan
	– Program Pembangunan Saluran Drainase	– Terlaksananya pembangunan drainase gorong-gorong
	– Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	– Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	– Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	– Pembangunan SPAM
	– Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	– Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan
	– Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	– Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	– Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	– Terpeliharanya sungai dan sumber daya lainnya





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	– Melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi di bidang pertambangan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Terwujudnya penerapan zona tambang dan penertiban kegiatan penambangan
	– Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	– Terlayannya kebutuhan masyarakat di bidang ketenagalistrikan
<b>d.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
	– Program Perencanaan Pembangunan Daerah	– Tersusunnya Renja, RPTK, RKPd dan RPJMD – Terlaksananya Forum SKPD
	– Program Perencanaan Tata Ruang	– Tersedianya pedoman teknis untuk perijinan pemanfaatan ruang
	– Program Kerjasama Pembangunan	– Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar wilayah
	– Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	– Fasilitasi program perencanaan pembangunan ekonomi
<b>e.</b>	<b>Perhubungan</b>	
	– Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	– Meningkatnya jumlah angkutan darat – Meningkatnya PAD dari sektor parkir
	– Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	– Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	– Program Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi	– Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi
<b>f.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	– Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
	– Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	– Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	– Program Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi SDA	– Program perlindungan dan konservasi SDA
	– Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	– Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan
<b>g.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	
	– Program Penataan Administrasi Kependudukan	– Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kab. Magelang
	– Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan	– Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
<b>h.</b>	<b>Sosial</b>	
	– Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	– Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
	– Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	– Terlayannya rehabilitasi kesejahteraan sosial
	– Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	– Terbinanya para penyandang cacat
	– Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	– Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial
<b>i.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	– Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
	– Program Peningkatan Kesempatan Kerja	– Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja
	– Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	– Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga
<b>j.</b>	<b>Koperasi dan usaha kecil menengah</b>	
	– Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	– Tumbuhnya kemandirian dan kewirausahaan UMKM di 360 UMKM
	– Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	– Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	– Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	– Meningkatnya investasi dan PMAD
	– Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	– Meningkatnya kemampuan penerapan IPTEK pada sistem produksi
	– Program Pengembangan IKM	– Meningkatnya daya saing produktivitas serta efisiensi
	– Program Penataan Struktur Industri	– Meningkatnya kualitas struktur industri
	– Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	– Terlaksananya pengembangan sentra-sentra industri potensial
<b>k.</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	
	– Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	– Meningkatnya prosentase kegiatan Linmas Desa
	– Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	– Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
	– Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	– Meningkatnya nasionalisme di masyarakat
	– Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	– Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
	– Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	– Menurunnya tingkat penyalahgunaan napza, miras dan pekat lainnya
	– Program Pendidikan Politik Masyarakat	– Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
	– Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	– Menurunnya tingkat gangguan Kamtramtibmas di masyarakat
<b>l.</b>	<b>Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>	
	– Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	– Terciptanya standar waktu maksimum proses pelayanan administrasi perkantoran
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	– Sarana prasarana kantor memadai
	– Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	– Meningkatnya kerjasama antar daerah
	– Program Peningkatan Disiplin Aparatur	– Meningkatnya disiplin aparatur
	– Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	– Tertatanya administrasi kepegawaian
	– Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	– Meningkatnya profesionalisme aparatur



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	– Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan sesuai mekanisme
<b>m.</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dan desa</b>	
	– Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	– Terwujudnya rencana pembangunan desa
	– Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	– Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa
	– Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	– Lembaga perempuan berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan
	– Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	– Berkembangnya pasar tradisional/pasar desa dan lembaga usaha ekonomi masyarakat. Menguatkan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat
<b>n.</b>	<b>Komunikasi dan informatika</b>	
	– Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	– Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa	– Meningkatnya kualitas konten dan pengakses website <a href="http://www.magelangkab.go.id">www.magelangkab.go.id</a>
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
	– Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
<b>o.</b>	<b>Kearsipan</b>	
	– Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	– Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan
	– Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	– Meningkatnya pemeliharaan dan pemantauan arsip
<b>II.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
<b>p.</b>	<b>Pertanian</b>	
	– Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	– Tercapainya peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura
	– Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	– Tersedianya permodalan di tingkat petani / kelompok tani dan sarpras agropoliatan
	– Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan	– Tercukupinya kebutuhan bibit
	– Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	– Terlaksananya perizinan ditingkat pengusaha.
	– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	– Sarana dan prasarana kesehatan hewan memadai
	– Program Peningkatan Manajemen Produksi Budidaya Perikanan	– Terlaksananya pelatihan manajemen produksi budidaya perikanan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan usaha sumber daya mineral
<b>q.</b>	<b>Pariwisata</b>	



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Pengembangan Destinasi pariwisata	– Peningkatan kualitas sarana dan prasarana obyek wisata sehingga semakin dikenal oleh wisatawan . semakin lama tinggal dan meningkatnya jumlah kunjungan.
	– Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan	– Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Manajemen Kepariwisataan
	– Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	– Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	– Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata yang memadai
<b>r.</b>	<b>Perdagangan</b>	
	– Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	– Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri
	– Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	– Peningkatan terhadap perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan
	– Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	– Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan
	– Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	– Meningkatnya pengembangan ekspor
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	– Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai



### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

##### 3.a. Pendapatan

Realisasi pencapaian kinerja pendapatan Kabupaten Magelang sebesar Rp2.575.439.825.755,00 dari target sebesar Rp2.644.102.341.000,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang  
Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2019 (Audited)			Realisasi Tahun 2018 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	159.571.514.000,00	128.605.715.341,00	80,59	114.220.874.059,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	27.382.556.000,00	19.999.789.449,00	73,04	15.982.792.272,00
3	Urusan Pilihan	650.000.000,00	679.510.248,00	104,54	668.987.600,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.456.498.271.000,00	2.426.154.810.717,00	98,76	2.171.317.889.685,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.644.102.341.000,00</b>	<b>2.575.439.825.755,00</b>	<b>97,40</b>	<b>2.302.190.543.616,00</b>

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.**

##### 3.b. Belanja

Realisasi pencapaian belanja kinerja Kabupaten Magelang sebesar Rp2.568.593.603.007,00 dari target sebesar Rp2.854.735.322.082,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang  
Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2019 (Audited)			Realisasi Tahun 2018 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.543.023.438.917,00	1.366.260.435.319,00	88,54	1.390.197.544.390,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	200.768.075.069,00	166.707.673.739,00	83,03	137.493.669.635,00
3	Urusan Pilihan	90.145.278.080,00	78.998.238.462,00	87,63	152.303.244.132,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.020.798.530.016,00	956.627.255.487,00	93,71	806.546.103.012,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.854.735.322.082,00</b>	<b>2.568.593.603.007,00</b>	<b>89,98</b>	<b>2.486.540.561.169,00</b>

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.**



## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2019 yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### 4.a Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas 51 entitas akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi dari 51 SKPD sebagai berikut:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   | 24. Sekretariat Daerah    |
| 2. Dinas Kesehatan   | 25. Sekretariat Dewan     |
| 3. RSUD Muntilan   | Perwakilan Rakyat Daerah  |
| 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | 26. Kecamatan Salaman     |
| 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   | 27. Kecamatan Borobudur   |
| 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran   | 28. Kecamatan Ngluwar     |
| 7. Kesatuan Bangsa dan Politik   | 29. Kecamatan Salam       |
| 8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 30. Kecamatan Srumbung    |
| 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  | 31. Kecamatan Dukun       |
| 10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja   | 32. Kecamatan Sawangan    |
| 11. Dinas Pertanian dan Pangan   | 33. Kecamatan Muntilan    |
| 12. Dinas Lingkungan Hidup   | 34. Kecamatan Mungkid     |
| 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 35. Kecamatan Mertoyudan  |
| 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | 36. Kecamatan Tempuran    |
| 15. Dinas Perhubungan  | 37. Kecamatan Kajoran     |
|  | 38. Kecamatan Kaliangkrik |
|  | 39. Kecamatan Bandongan   |
|  | 40. Kecamatan Candimulyo  |
|  | 41. Kecamatan Pakis       |
|  | 42. Kecamatan Ngablak     |
|  | 43. Kecamatan Grabag      |
|  | 44. Kecamatan Tegalrejo   |
|  | 45. Kecamatan Secang      |
|  | 46. Kecamatan Windusari   |
|  | 47. Inspektorat           |



- |  |   |
|--|---|
| 16. Dinas Komunikasi dan Informatika                       | 48. Badan Perencanaan                           |
| 17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 49. Badan Pendapatan                            |
| 19. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga             | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah            |
| 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 50. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah           |
| 21. Dinas Peternakan dan Perikanan                         | 51. Badan Kepegawaian,                          |
| 22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                         | Pendidikan dan Pelatihan                        |
| 23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | Daerah  |

#### 4.b Prinsip Akuntansi Desentralisasi

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

#### 4.c Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5 : *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”.*

Paragraf 7 : *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”.*

Sehingga basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian



atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.d Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

##### **1) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

##### **a) Aset Lancar**

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek.

##### **b) Aset Non Lancar**

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Adapun rincian penjelasan masing-masing jenis aset adalah sebagai berikut:

##### **a) Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah meliputi:

- (1) Kas di Kas Daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember;
- (3) Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember;





(4) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijadikan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

b) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang/sejak jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan.

c) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

d) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu:

(1) Investasi Jangka Pendek

Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

(2) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- (a) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan



tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- (b) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanen menyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

e) Aset Tetap

- (1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca;
- (2) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah;
- (3) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

f) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- (1) Tagihan piutang angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
- (2) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas



kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

- (3) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- (4) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

#### Pengakuan Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
- d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar menggunakan metode ekuitas untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di atas 20%, sedang untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di bawah 20% menggunakan metode biaya / perolehan.
- e) Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/mesin adalah sama atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit.
- g) Pengadaan baru aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
- h) Aset tetap peralatan/mesin dan aset tetap lainnya yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang.
- i) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset



tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 per unit.

- j) Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, meliputi:

- a) *Goodwill*;
- b) Hak Paten atau Hak Cipta;
- c) Royalti;
- d) *Software*;
- e) Lisensi;
- f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- g) Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
- h) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tidak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan surat pernyataan dari Pengguna Barang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- b) Aset Tidak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun masa manfaat.



## 2) Hutang

Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Hutang diklasifikasikan:

- 1) Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek meliputi bagian lancar hutang jangka panjang, hutang kepada pihak ketiga, hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga.
- 2) Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

## 3) Ekuitas

Ekuitas adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 4) Pendapatan- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah *netto* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut.



### 5) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

### 6) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

### 7) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

### 8) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



## 9) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a) Metode pendekatan Beban

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b) Metode pendekatan Aset

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.a. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

**1) Pendapatan**

Anggaran Pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp2.644.102.341.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.575.439.825.755,00.

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2019 (Audited)			Realisasi Tahun 2018 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi(Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	441.347.020.000,00	417.178.099.961,00	94,52	325.089.093.092,00
2	Pendapatan Transfer	2.085.847.921.000,00	2.063.644.057.920,00	98,94	1.887.644.229.675,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	116.907.400.000,00	94.617.667.874,00	80,93	89.457.220.849,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.644.102.341.000,00</b>	<b>2.575.439.825.755,00</b>	<b>97,40</b>	<b>2.302.190.543.616,00</b>

**a) Pendapatan Asli Daerah**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>441.347.020.000,00</b>	<b>417.178.099.961,00</b>	<b>325.089.093.092,00</b>

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian anggaran dan realisasi tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	142.014.208.000,00	156.886.789.644,00	110,47	124.444.072.963,00
2.	Retribusi Daerah	32.643.365.000,00	22.934.190.849,00	70,26	18.186.191.392,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.700.415.000,00	23.700.417.768,00	100,00	28.534.358.666,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	242.989.032.000,00	213.656.701.700,00	87,93	153.924.470.071,00
	<b>Jumlah</b>	<b>441.347.020.000,00</b>	<b>417.178.099.961,00</b>	<b>94,52</b>	<b>325.089.093.092,00</b>





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(1) Pajak Daerah

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>142.014.208.000,00</b>	<b>156.886.789.644,00</b>	<b>124.444.072.963,00</b>

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pada Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.3. Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	15.934.618.000,00	16.136.254.566,00	101,27	14.259.466.439,00
2	Pajak Restoran	14.645.663.000,00	18.938.329.070,00	129,31	13.265.681.310,00
3	Pajak Hiburan	3.898.653.000,00	3.910.873.455,00	100,31	3.388.992.989,00
4	Pajak Reklame	1.160.000.000,00	1.121.265.805,00	96,66	1.158.383.871,00
5	Pajak Penerangan Jalan	34.441.408.000,00	35.517.773.032,00	103,13	33.465.346.161,00
6	Pajak Parkir	1.780.000.000,00	1.875.857.572,00	105,39	1.778.574.239,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	22.000.000.000,00	24.892.951.192,00	113,15	16.046.119.240,00
8	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	879.678.828,00	117,29	656.793.041,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	30.611.719.000,00	33.057.309.182,00	107,99	25.807.217.483,00
10	BPHTB	16.792.147.000,00	20.556.496.942,00	122,42	14.617.498.190,00
<b>Jumlah</b>		<b>142.014.208.000,00</b>	<b>156.886.789.644,00</b>	<b>110,47</b>	<b>124.444.072.963,00</b>

SKPD pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp156.886.789.644,00. Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut:

(a) Pajak Hotel

Tabel 5.4. Realisasi Pajak Hotel

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel Bintang Lima	6.422.000.000,00	6.001.991.482,00	93,46	5.372.112.716,00
2	Pajak Hotel Bintang Tiga	2.894.482.000,00	3.749.130.407,00	129,53	1.788.474.346,00
3	Pajak Hotel Bintang Satu	5.500.000.000,00	5.160.611.100,00	93,83	6.144.188.982,00
4	Pajak Los-men / Ru-mah Pengi-napan/ Pe-sanggrahan/Hotel/Rumah Kos	1.118.136.000,00	1.224.521.577,00	109,51	954.690.395,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.934.618.000,00</b>	<b>16.136.254.566,00</b>	<b>101,27</b>	<b>14.259.466.439,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(b) Pajak Restoran

Tabel 5.5. Realisasi Pajak Restoran

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Restoran	9.195.428.000,00	12.094.661.075,00	131,53	7.930.636.651,00
2	Pajak Rumah Makan	612.868.000,00	878.363.334,00	143,32	576.112.454,00
3	Pajak Katering	4.500.000.000,00	5.291.924.979,00	117,60	4.441.797.565,00
4	Pajak Warung	337.367.000,00	673.379.682,00	199,60	317.134.640,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.645.663.000,00</b>	<b>18.938.329.070,00</b>	<b>129,31</b>	<b>13.265.681.310,00</b>

(c) Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB

Tabel 5.6. Realisasi Pajak Hiburan, Reklame, Penerangan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah dan BPHTB

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hiburan dikenakan untuk Rekreasi dan Hiburan Lainnya	3.898.653.000,00	3.910.873.455,00	100,31	3.388.992.989,00
2	Pajak Reklame meliputi Reklame Papan, Billboard, Videotron, dan Megatron	1.160.000.000,00	1.121.265.805,00	96,66	1.158.383.871,00
3	Pajak Penerangan Jalan PLN	34.441.408.000,00	35.517.773.032,00	103,13	33.465.346.161,00
5	Pajak Parkir	1.780.000.000,00	1.875.857.572,00	105,39	1.778.574.239,00
6	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	879.678.828,00	117,29	656.793.041,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi Pasir, Batu, Kerikil	22.000.000.000,00	24.892.951.192,00	113,15	16.046.119.240,00
7	BPHTB	16.792.147.000,00	20.556.496.942,00	122,42	14.617.498.190,00
	<b>Jumlah</b>	<b>80.822.208.000,00</b>	<b>88.754.896.826,00</b>	<b>109,81</b>	<b>71.111.707.731,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tabel 5.7. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Salaman	1.492.774.248	1.698.377.490	113,77	1.284.718.715,00
2	Kecamatan Borobudur	1.710.567.003	1.901.189.299	111,14	1.463.120.405,00
3	Kecamatan Ngluwar	828.749.550	966.537.432	116,63	738.039.671,00
4	Kecamatan Salam	1.532.689.172	1.625.865.863	106,08%	1.256.741.249,00
5	Kecamatan Srumbung	1.154.002.440	1.345.937.359	116,63	1.014.779.555,00
6	Kecamatan Dukun	1.203.376.388	1.404.173.144	116,69	1.073.332.016,00
7	Kecamatan Sawangan	1.280.127.933	1.419.646.217	110,90	1.157.959.820,00
8	Kecamatan Muntian	2.017.099.877	2.286.807.128	113,37	1.744.415.034,00
9	Kecamatan Mungkid	1.812.068.165	1.975.617.722	109,03	1.427.179.536,00
10	Kecamatan Mertoyudan	2.702.460.694	2.689.655.302	99,53	2.264.198.234,00
11	Kecamatan Tempuran	1.735.805.238	1.704.323.397	98,19	1.285.230.994,00
12	Kecamatan Kajoran	1.401.167.695	1.540.749.623	109,96	1.242.390.439,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	945.995.759	1.103.464.406	116,65	875.602.397,00
14	Kecamatan Bandongan	1.358.665.903	1.494.460.383	109,99	1.153.978.201,00
15	Kecamatan Candimulyo	1.262.508.617	1.472.948.653	116,67	1.113.771.119,00
16	Kecamatan Pakis	1.185.082.189	1.382.367.987	116,65	1.040.746.031,00
17	Kecamatan Ngablak	879.550.412	1.025.784.444	116,63	781.405.530,00
18	Kecamatan Grabag	1.924.333.340	1.828.439.804	95,02	1.509.565.382,00
19	Kecamatan Tegalrejo	1.151.282.968	1.168.913.521	101,53	1.007.877.637,00
20	Kecamatan Secang	2.066.483.914	1.894.016.775	91,65	1.498.150.887,00
21	Kecamatan Windusari	966.927.495	1.128.033.233	116,66	874.014.631,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.611.719.000</b>	<b>33.057.309.182</b>	<b>107,99</b>	<b>25.807.217.483,00</b>

(2) Retribusi Daerah

	Tahun 2019	Tahun 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>32.643.365.000,00</b>	<b>22.934.190.849,00</b>
		<b>18.186.191.392,00</b>

Pendapatan Retribusi berasal dari hasil pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016, dan Retribusi



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Perizinan Tertentu diatur dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019 dan realisasi Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.8. Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>19.265.302.000,00</b>	<b>12.508.541.664,00</b>	<b>64,93</b>	<b>8.117.544.102,00</b>
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.800.000.000,00	592.197.000,00	32,9	452.187.000,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	253.620.000,00	325.141.000,00	128,2	249.551.500,00
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	684.601.000,00	817.211.000,00	119,37	609.002.600,00
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	14.191.536.000,00	8.364.394.140,00	58,94	4.382.050.771,00
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.130.545.000,00	1.015.680.000,00	89,84	1.052.561.500,00
f.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	1.915.000,00	100,00	1.295.000,00
g.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	105.000.000,00	111.804.500,00	106,48	104.921.000,00
h.	R. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.152.104.024,00	115,21	1.184.569.231,00
i.	Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	128.095.000,00	128,1	81.405.500,00
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>10.766.686.000,00</b>	<b>8.590.956.482,00</b>	<b>79,79</b>	<b>8.450.789.440,00</b>
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.407.084.000,00	1.220.067.622,00	86,71	1.094.823.710,00
b.	Retribusi Terminal	603.467.000,00	461.724.300,00	76,51	540.475.350,00
c.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.019.219.000,00	920.069.800,00	90,27	878.940.900,00
d.	Retribusi Rumah Potong Hewan	210.135.000,00	215.805.000,00	102,70	208.033.000,00
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.526.781.000,00	5.773.289.760,00	76,70	5.728.516.480,00
<b>3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.611.377.000,00</b>	<b>1.834.692.703,00</b>	<b>70,26</b>	<b>1.617.857.850,00</b>
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.492.930.000,00	1.758.277.703,00	70,53	1.407.222.750,00
b.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00	68.087.500,00
c.	Retribusi Izin Trayek	92.750.000,00	65.230.000,00	70,33	80.252.500,00
d.	Retribusi Izin Penempatan Ruko/Kios/Los	25.697.000,00	11.185.000,00	43,53	19.827.100,00
e.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	0,00	0,00	0,00	42.468.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.643.365.000,00</b>	<b>22.934.190.849,00</b>	<b>88,73</b>	<b>18.186.191.392,00</b>

Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016, dan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016.

Rincian Retribusi Daerah per jenis retribusi per SKPD Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**

**(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>23.700.415.000,00</b>	<b>23.700.417.768,00</b>	<b>28.534.358.666,00</b>

Penerimaan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang PD Bapas 69 Kabupaten Magelang, Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD BPR BKK serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang PD Bank Jateng. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 dan realisasi Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.9. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69	15.884.341.000,00	15.884.341.325,00	100,00	13.108.808.051,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.470.715.000,00	3.470.715.600,00	100,00	3.334.613.700,00
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	114.103.000,00	114.103.400,00	100,00	181.282.413,00
4	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK)	1.000.630.000,00	1.000.630.327,00	100,00	912.692.891,00
5	PD Bank Jawa Tengah	3.230.292.000,00	3.230.292.657,00	100,00	10.758.475.226,00
6	PD BKK Tempuran	334.000,00	334.459,00	100,14	238.486.385,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.700.415.000,00</b>	<b>23.700.417.768,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.534.358.666,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(4) Lain-lain PAD yang Sah

	Tahun 2019	Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>242.989.032.000,00</b>	<b>213.656.701.700,00</b>	<b>153.924.470.071,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang menampung penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah yaitu hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa bank, bunga bank, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan dari pengembalian lain-lainnya, pendapatan BLUD dan lain-lainnya pendapatan Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 dan realisasi Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.10. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	109.000.000,00	125.060.750,00	114,73	383.218.281,00
2	Penerimaan Jasa Giro	12.693.751.000,00	12.599.649.926,00	99,26	8.096.817.742,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	66.225.661.000,00	64.284.190.831,00	97,07	27.487.067.975,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	10.562.500,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.294.577.000,00	5.853.945.930,00	93,00	422.272.923,00
6	Pendapatan Denda Pajak	49.483.000,00	134.800.009,00	272,42	1.676.573,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	646.000.000,00	845.980.980,00	130,96	966.168.980,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	64.954.000,00	146.618.073,00	225,73	56.949.600,00
9	Pendapatan dari pengembalian Lainnya	1.549.171.000,00	2.572.096.586,00	166,03	3.610.106.295,00
10	Lain-Lainnya Pendapatan (BLUD)	154.577.414.000,00	125.622.344.591,00	81,27	111.909.416.829,00
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	265.000.000,00	345.721.078,00	130,46	435.400.519,00
12	Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air	495.021.000,00	1.107.292.946,00	223,69	534.811.854,00
13	Hasil Penjualan Pertanian	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	10.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>242.989.032.000,00</b>	<b>213.656.701.700,00</b>	<b>87,93</b>	<b>153.924.470.071,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian Lain-lain PAD yang Sah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

(a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Tabel 5.11. Realisasi Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	<b>BPPKAD</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>81.400.000,00</b>	<b>137,97</b>	<b>337.239.531,00</b>
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kendaraan roda 2	24.000.000,00	400.000,00	1,67	108.060.372,00
	Kendaraan roda 4	10.000.000,00	0,00	0,00	225.021.659,00
	Bahan bekas bangunan	0,00	81.000.000,00	100,00	4.157.500,00
2	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>43.660.750,00</b>	<b>87,32</b>	<b>45.978.750,00</b>
	Penebangan pohon	0,00	13.782.000,00	100,00	23.064.500,00
	Bahan bekas bangunan	50.000.000,00	29.878.750,00	59,76	22.914.250,00
	<b>Jumlah</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>125.060.750,00</b>	<b>114,73</b>	<b>383.218.281,00</b>

(b) Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro adalah penerimaan jasa giro yang masuk ke Kasda atas Rekening milik Pemda dan Rekening Dana Cadangan yang dikelola BPPKAD. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Jasa Giro Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.12. Realisasi Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1.	Jasa Giro Kas Daerah	7.620.576.000,00	7.499.962.922,00	98,42	7.054.955.770,00
2.	Jasa Giro Bendahara	199.030.000,00	237.502.916,00	119,33	450.759.232,00
3.	Jasa Giro Dana Cadangan	4.874.145.000,00	4.862.184.088,00	99,75	591.102.740,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.693.751.000,00</b>	<b>12.599.649.926,00</b>	<b>99,26</b>	<b>8.096.817.742,00</b>

(c) Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan bunga deposito adalah penerimaan bunga atas deposito yang ditempatkan oleh BPPKAD pada bank-bank. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bunga Deposito Tahun 2019 dan realisasi Tahun 2018 sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Rekening Deposito pada Bank Jateng	5.466.611.000,00	3.921.643.828,00	71,74	15.340.068.459,00
2	Rekening Deposito pada BNI	3.199.143.000,00	3.079.212.327,00	96,25	2.912.582.190,00
3	Rekening Deposito pada BTN	1.441.232.000,00	1.359.041.082,00	94,30	1.252.109.582,00
4	Rekening Deposito pada BRI	11.725.534.000,00	11.480.945.511,00	97,91	1.947.801.707,00
5	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	0,00	0,00	0,00	238.458.900,00
6	Bunga Deposito Dana Cadangan	44.393.141.000,00	44.431.022.817,00	100,09	5.796.047.137,00
7	Rekening Bunga Deposito pada Bank Muamalat	0,00	12.325.266,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.225.661.000,00</b>	<b>64.284.190.831,00</b>	<b>97,07</b>	<b>27.487.067.975,00</b>

(d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah penerimaan BPPKAD atas kerusakan atau kehilangan atas aset Kabupaten Magelang. Realisasi pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan tahun 2018 sebesar Rp10.562.500,00

(e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan Pemerintah Daerah atas denda yang dikenakan pada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pendidikan	0,00	43.737.487,00		5.612.665,00
2	Bidang Kesehatan	83.000,00	201.789.478,00	243119,85	35.427.445,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	6.288.612.000,00	5.580.259.822,00	88,74	222.960.478,00
4	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	40.526.490,00
5	Bidang Penataan Ruang	0,00	9.868.656,00	100,00	30.115.422,00
6	Bidang Perhubungan	0,00	0,00	0,00	5.607.712,00





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
7	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	1.945.500,00	0,00	0,00
8	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Lainnya	5.882.000,00	16.344.987,00	277,88	82.022.711,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.294.577.000,00</b>	<b>5.853.945.930,00</b>	<b>93,00</b>	<b>422.272.923,00</b>

(f) Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan denda pajak adalah penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan denda pajak Tahun 2019 dan realisasi Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	30.900.000,00	30.883.182,00	99,95	87.505,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.526.000,00	14.223.368,00	135,13	446.485,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.356.000,00	1.561.741,00	115,17	13.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.905.000,00	11.829.771,00	241,18	911.137,00
5	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	535.000,00	2.936.422,00	548,86	638,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	33.000,00	65.694,00	199,07	10.602,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.228.000,00	1.873.012,00	152,53	164.828,00
8	Pendapatan Denda Pajak PBB	0,00	71.426.819,00	0,00	42.378,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.483.000,00</b>	<b>134.800.009,00</b>	<b>272,42</b>	<b>1.676.573,00</b>

(g) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi adalah penerimaan dari denda atas keterlambatan pembayaran retribusi daerah. Anggaran dan realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2019 sebesar Rp646.000.000,00 dan Rp845.980.980,00 (130%) sementara realisasi tahun 2018 sebesar Rp966.168.980,00 dengan rincian pada **Lampiran 5.2.**



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- (h) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan  
Pendapatan hasil eksekusi jaminan adalah penerimaan hasil eksekusi dari jaminan atas pelaksanaan pekerjaan. Anggaran dan realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Tahun 2019 sebesar Rp64.954.000,00 dan Rp146.618.073,00 sementara realisasi tahun 2018 sebesar Rp56.949.600,00
- (i) Pendapatan dari Pengembalian Lainnya  
Pendapatan dari pengembalian adalah penerimaan dari dana setoran temuan pemeriksaan atas pemeriksaan tahun anggaran sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Lainnya Tahun 2019 dan realisasi Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.16. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Lainnya

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Perhubungan	0,00	47.000,00	-	5.763.000,00
2	BPPKAD	1.549.171.000,00	2.572.049.586,00	166,03	3.604.343.295
	<b>Jumlah</b>	<b>1.549.171.000,00</b>	<b>2.572.096.586,00</b>	<b>166,03</b>	<b>3.610.106.295,00</b>

- (j) Lain Lainnya Pendapatan BLUD  
Pendapatan BLUD adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat. BLUD di Kabupaten Magelang terdiri dari BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Muntilan. Anggaran dan realisasi lain lainnya pendapatan BLUD Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 masing-masing adalah sebagai berikut

Tabel 5.17. Realisasi Pendapatan BLUD

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	94.373.469.370,00	62.178.396.982,00	65,89	56.853.946.692,00
2	RSUD	60.203.944.630,00	63.444.080.709,00	105,38	55.055.470.137,00
	<b>Jumlah</b>	<b>154.577.414.000,00</b>	<b>125.622.344.591,00</b>	<b>81,27</b>	<b>111.909.416.829,00</b>

Rincian pendapatan BLUD disajikan pada **Lampiran 5.3.**

- (k) Lain- Lain PAD Yang Sah Lainnya  
Lain-lain PAD yang sah lainnya adalah lain-lain PAD yang sah yang tidak termasuk kategori rincian huruf (a) sampai dengan huruf (j). Untuk tahun 2019 lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan pengganti ongkos cetak karcis pada SKPD Disdagkop UMKM dan setoran pendapatan sewa tempat (Baledono) pada BPPKAD. Anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 masing-masing adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.18. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Perdagang-an, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	16.825.500,00	112,17	18.181.500,00
2	BPPKAD	250.000.000,00	328.895.578,00	131,56	417.219.019,00
	<b>Jumlah</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>345.721.078,00</b>	<b>130,46</b>	<b>435.400.519,00</b>

(l) Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air

Penerimaan kontribusi air PDAM ke Desa Sumber Air adalah penerimaan kontribusi desa lokasi sumber air dari PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang. Anggaran dan realisasi penerimaan kontribusi air PDAM ke Desa Sumber air tahun 2019 masing-masing sebesar Rp495.021.000,00 dan Rp1.107.292.946,00 (223,69%) dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp534.811.854,00.

(m) Hasil Penjualan Pertanian

Hasil penjualan pertanian tahun 2019 dengan target sebesar Rp19.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.000.000,00 (100%) dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp10.000.000,00.

**b) Pendapatan Transfer**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>2.085.847.921.000,00</b>	<b>2.063.644.057.920,00</b>	<b>1.887.644.229.675,00</b>

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19. Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.470.931.062.000,00	1.452.804.059.102,00	98,77	1.398.132.841.570,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	47.781.527.000,00	47.781.527.000,00	100,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	170.373.555.000,00	167.256.161.818,00	98,17	154.791.322.105,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
4	Bantuan Keuangan	396.761.777.000,00	395.802.310.000,00	99,76	334.720.066.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.085.847.921.000,00</b>	<b>2.063.644.057.920,00</b>	<b>98,94</b>	<b>1.887.644.229.675,00</b>

**1) Transfer Pemerintah Pusat**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.470.931.062.000,00</b>	<b>1.452.804.059.102,00</b>	<b>1.398.132.841.570,00</b>

Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.20. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	33.818.285.000,00	26.872.678.200,00	79,46	44.373.677.715,00
2	DBH Bukan Pajak/SDA	2.331.888.000,00	1.375.208.237,00	58,97	1.125.995.824,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.097.366.974.000,00	1.097.366.974.000,00	100,00	1.060.027.733.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	337.413.915.000,00	327.189.198.665,00	96,97	301.160.637.595,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.470.931.062.000,00</b>	<b>1.452.804.059.102,00</b>	<b>98,77</b>	<b>1.398.132.841.570,00</b>

Rincian anggaran dan realisasi transfer pemerintah pusat disajikan pada disajikan pada **Lampiran 5.4.**

**2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>430.853.304.000,00</b>	<b>430.853.304.000,00</b>	<b>325.360.832.000,00</b>

Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun 2019 terdiri dari Dana insentif Daerah dan Dana Desa. Anggaran dan realisasi transfer pemerintah pusat tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagaimana rincian berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.21. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan	14.474.551.000,00	14.474.551.000,00	100,00	0,00
2	Kesejahteraan	11.691.322.000,00	11.691.322.000,00	100,00	0,00
3	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	10.537.181.000,00	10.537.181.000,00	100,00	0,00
4	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	11.078.473.000,00	11.078.473.000,00	100,00	0,00
5	Dana Desa	383.071.777.000,00	383.071.777.000,00	100,00	325.360.832.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>430.853.304.000,00</b>	<b>430.853.304.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>325.360.832.000,00</b>

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>170.373.555.000,00</b>	<b>167.256.161.818,00</b>	<b>154.791.322.105,00</b>

Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya seluruhnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Anggaran dan realisasi transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagaimana rincian berikut:

Tabel 5.22. Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	35.667.915.000,00	39.305.491.181,00	110,20	33.469.575.206,00
2	BBNKB	27.680.818.000,00	28.510.922.534,00	103,00	27.600.176.524,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.492.749.000,00	50.752.610.199,00	94,88	45.435.842.752,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	198.822.000,00	267.824.987,00	134,71	210.278.374,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	53.333.251.000,00	48.419.312.917,00	90,79	48.075.449.249,00
	<b>Jumlah</b>	<b>170.373.555.000,00</b>	<b>167.256.161.818,00</b>	<b>98,17</b>	<b>154.791.322.105,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**4) Bantuan Keuangan**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>13.690.000.000,00</b>	<b>12.730.533.000,00</b>	<b>9.359.234.000,00</b>

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat/Daerah lainnya untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah penerimanya. Pendapatan Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

Tabel 5.23. Realisasi Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	13.690.000.000,00	12.730.533.000,00	92,99	9.359.234.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.690.000.000,00</b>	<b>12.730.533.000,00</b>	<b>92,99</b>	<b>9.359.234.000,00</b>

**c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>116.907.400.000,00</b>	<b>94.617.667.874,00</b>	<b>89.457.220.849,00</b>

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagaimana rincian berikut:

Tabel 5.24. Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	116.907.400.000,00	94.617.667.874,00	80,93	89.457.220.849,00
<b>Jumlah</b>		<b>116.907.400.000,00</b>	<b>94.617.667.874,00</b>	<b>80,93</b>	<b>89.457.220.849,00</b>

Pendapatan Hibah terdiri atas pendapatan hibah pemerintah pusat untuk PDAM dan Pendapatan Dana BOS. Pendapatan Hibah dari Pusat untuk PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-218/MK.7/2019 tanggal 15 Agustus 2019 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Magelang Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2019. Dana Hibah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan.

Pendapatan Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp115.407.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.117.667.874,00.

## 2) BELANJA

Belanja Daerah termasuk di dalamnya adalah belanja BLUD RSUD Muntitan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan serta belanja BOS. Realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSUD Muntitan sebesar Rp63.663.394.778,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari rekening BLUD UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan sebesar Rp61.760.319.935,00. Sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp125.423.714.713,00. Sementara Belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp91.214.080.600,00. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagaimana rincian berikut:

Tabel 5.25. Realisasi Belanja Daerah

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.688.380.335.036,00	1.498.077.962.197,00	88,73	1.454.440.752.541,00
2	Belanja Modal	475.141.984.218,00	386.529.995.844,00	81,35	501.727.375.261,00
3	Belanja Tak Terduga	3.043.828.500,00	73.755.000,00	2,42	946.000.000,00
4	Transfer	688.169.174.328,00	683.911.889.966,00	99,38	529.426.433.367,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.854.735.322.082,00</b>	<b>2.568.593.603.007,00</b>	<b>89,98</b>	<b>2.486.540.561.169,00</b>

### a) Belanja Operasi

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.688.380.335.036,00</b>	<b>1.498.077.962.197,00</b>	<b>1.454.440.752.541,00</b>

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2019 sebesar Rp1.688.380.335.036,00 dan Rp1.498.077.962.197,00 (88,73%). Realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.454.440.752.541,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	906.806.177.110,00	842.384.330.471,00	92,90	845.457.837.560,00
2	Belanja Barang dan Jasa	675.630.382.926,00	579.430.825.726,00	85,86	495.704.552.647,00
3	Belanja Hibah	71.135.785.000,00	46.064.197.000,00	70,79	70.898.793.334,00
4	Belanja Bantuan Sosial	34.807.990.000,00	30.198.609.000,00	86,89	42.379.569.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.688.380.335.036,00</b>	<b>1.498.077.962.197,00</b>	<b>88,72</b>	<b>1.454.440.752.541,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(1) **Belanja Pegawai**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>906.806.177.110,00</b>	<b>842.384.330.471,00</b>	<b>845.457.837.560,00</b>

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 pada Belanja Operasi adalah:

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Pegawai

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	841.015.031.242,00	789.482.091.968,00	93,87	792.210.693.534,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	45.720.344.368,00	34.961.110.122,00	76,47	37.373.077.655,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.482.000.000,00	9.482.000.000,00	100,00	6.814.600.000,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.031.344.000,00	5.933.633.221,00	84,39	5.982.484.717,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.327.643.000,00	512.220.100,00	38,58	735.601.169,00
6	Belanja Uang Lembur	2.229.814.500,00	2.013.275.060,00	90,29	2.341.380.485,00
	<b>Jumlah</b>	<b>906.806.177.110,00</b>	<b>842.384.330.471,00</b>	<b>92,90</b>	<b>845.457.837.560,00</b>

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.5**.

(2) **Belanja Barang dan Jasa**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>675.630.382.926,00</b>	<b>579.430.825.726,00</b>	<b>495.704.552.647,00</b>

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian belanja barang dan jasa tahun 2019 dan 2018 menurut obyek belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.28. Realisasi Belanja Menurut Objek Belanja

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	16.756.580.144,00	13.383.741.723,00	79,87	10.194.660.278,00
2	Belanja Bahan/Material	19.112.034.101,00	13.060.229.658,00	68,34	9.766.192.036,00
3	Belanja Jasa Kantor	143.972.705.832,00	128.790.027.959,00	89,45	113.198.383.883,00
4	Belanja Premi Asuransi	25.412.669.500,00	20.344.402.841,00	80,06	5.315.277.800,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.073.851.300,00	11.779.483.896,00	78,15	12.455.287.764,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.903.487.396,00	9.474.799.492,00	79,6	8.291.212.367,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.185.037.400,00	1.043.673.000,00	88,07	947.291.800,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.393.703.500,00	1.230.538.600,00	88,29	1.257.804.060,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.072.366.300,00	1.838.269.660,00	88,7	1.341.371.805,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	37.036.109.700,00	34.770.420.180,00	93,88	27.407.960.045,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	540.279.500,00	353.228.000,00	65,38	489.178.400,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1.125.977.520,00	1.094.729.269,00	97,22	934.153.485,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	869.187.830,00	827.135.280,00	95,16	947.939.280,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	51.055.836.400,00	45.462.451.742,00	89,04	43.451.449.528,00
15	Belanja Pemeliharaan	30.550.948.055,00	28.365.736.824,00	92,85	46.986.483.457,00
16	Belanja Jasa Konsultansi	12.705.270.500,00	10.830.418.095,00	85,24	6.862.085.827,00
17	Belanja Hibah barang atau jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	33.458.963.100,00	27.978.719.223,00	83,62	0,00
18	Belanja bantuan sosial barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	1.588.806.200,00	1.427.250.000,00	89,83	0,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	69.600.000,00	69.600.000,00	100,00	143.500.000,00
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.146.150.750,00	5.380.213.843,00	87,54	4.039.624.395,00
21	Belanja Honorarium PNS	29.716.373.995,00	27.866.429.495,00	93,77	26.514.775.190,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	11.534.222.300,00	10.809.365.478,00	93,72	5.251.506.520,00
23	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	50.881.603.528,00	66.394.880.873,00	130,49	53.832.931.450,00
24	Belanja Pajak / Retribusi	218.479.325,00	199.668.864,00	91,39	177.888.267,00
25	Belanja Pegawai BLUD	62.241.135.900,00	36.081.511.582,00	56,92	35.266.644.409,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.568.367.170,00	72.181.880.229,00	83,17	60.910.163.076,00
27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	8.652.335.000,00	7.591.777.000,00	87,74	7.017.132.000,00
28	Belanja Pegawai BOS	12.788.300.680,00	800.242.920,00	6,26	12.703.655.525,00
	<b>Jumlah</b>	<b>675.630.382.926,00</b>	<b>579.430.825.726,00</b>	<b>85,76</b>	<b>495.704.552.647,00</b>

Sedangkan belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.6**



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018 tersebut termasuk Belanja Barang dan Jasa yang sumber dananya dari BLUD RSUD Munttilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 5.29. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Puskesmas	Persediaan (Rp)	Jasa (Rp)	Pemeliharaan (Rp)	Perjalanan dinas (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SALAMAN I	548.511.577	765.107.840	33.657.500	28.534.200	1.375.811.117,00
2	SALAMAN II	128.080.475	248.423.779	53.187.250	9.674.200	439.365.704,00
3	BOROBUDUR	290.359.133	699.961.664	33.470.500	35.339.200	1.059.130.497,00
4	NGLUWAR	82.145.257	188.777.837	85.770.000	7.374.600	364.067.694,00
5	SALAM	283.182.883	271.937.665	109.855.700	11.264.200	676.240.448,00
6	SRUMBUNG	105.413.528	277.516.554	110.877.508	53.224.200	547.031.790,00
7	DUKUN	130.432.378	267.491.398	20.528.500	10.444.600	428.896.876,00
8	SAWANGAN I	185.580.268	295.304.402	62.234.150	49.694.200	592.813.020,00
9	SAWANGAN II	56.448.437	226.142.438	32.275.920	9.684.200	324.550.995,00
10	MUNTILAN I	95.889.919	287.694.212	114.789.828	4.140.000	502.513.959,00
11	MUNTILAN II	145.801.565	186.101.460	26.267.700	92.704.200	450.874.925,00
12	MUNGKID	284.504.027	512.578.091	74.452.575	73.884.200	945.418.893,00
13	MERTOYUDAN I	188.657.969	330.257.731	67.832.436	33.744.200	620.492.336,00
14	MERTOYUDAN II	74.911.350	249.255.371	15.803.500	14.294.200	354.264.421,00
15	TEMPURAN	219.690.375	519.505.634	70.405.000	100.594.600	910.195.609,00
16	KAJORAN I	110.795.272	266.105.095	14.314.875	91.714.200	482.929.442,00
17	KAJORAN II	86.986.113	229.552.025	6.139.000	18.084.200	340.761.338,00
18	KALIANGKRIK	195.337.979	458.702.177	70.411.000	28.044.200	752.495.356,00
19	BANDONGAN	433.730.558	490.350.518	109.244.495	14.024.200	1.047.349.771,00
20	CANDIMULYO	211.597.079	424.603.192	93.494.800	70.504.200	800.199.271,00
21	PAKIS	280.514.773	333.272.277	12.518.100	17.354.600	643.659.750,00
22	NGABLAK	137.609.062	322.795.400	51.178.883	31.374.200	542.957.545,00
23	GRABAG I	497.180.429	569.679.584	68.524.070	237.824.200	1.373.208.283,00
24	GRABAG II	76.701.289	174.668.440	9.417.200	20.600.000	281.386.929,00
25	TEGALREJO	123.554.867	165.271.221	117.361.300	8.674.200	414.861.588,00
26	SECANG I	102.563.638	415.636.282	53.045.430	39.474.200	610.719.550,00
27	SECANG II	117.925.814	310.953.467	5.120.000	35.104.200	469.103.481,00
28	WINDUSARI	98.860.862	515.705.970	36.551.480	19.414.600	670.532.912,00
29	KOTA MUNGKID	92.901.925	191.204.693	40.869.050	0,00	324.975.668,00
<b>Jumlah (BLUD Puskesmas)</b>		<b>5.385.868.801,00</b>	<b>10.194.556.417,00</b>	<b>1.599.597.750,00</b>	<b>1.166.786.200,00</b>	<b>18.346.809.168,00</b>
30	BLUD RSUD	22.659.300.480,00	29.553.610.562,00	1.533.746.299,00	88.413.720,00	53.835.071.061,00
<b>Jumlah (BLUD)</b>		<b>28.045.169.281,00</b>	<b>39.748.166.979,00</b>	<b>3.133.344.049,00</b>	<b>1.255.199.920,00</b>	<b>72.181.880.229,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Realisasi Belanja Hibah di SKPD digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk barang kepada pihak ketiga/masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja Hibah Barang Tahun 2019 di SKPKD sebesar Rp27.978.719.000,00. Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.7**.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 pada SKPD sebesar Rp1.427.250.000,00 . Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.8**.

**(3) Belanja Hibah**

	Tahun 2019	Tahun 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>71.135.785.000,00</b>	<b>46.064.197.000,00</b>
		<b>70.898.793.334,00</b>

Realisasi Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp46.064.197.000,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.30. Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	49.561.585.000,00	46.064.197.000,00	92,94	70.898.793.334,00
2	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	21.574.200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>71.135.785.000,00</b>	<b>46.064.197.000,00</b>	<b>64,76</b>	<b>70.898.793.334,00</b>

Atas realisasi Belanja Hibah selama tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (a) Realisasi Belanja Hibah di PPKD digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 di PPKD sebesar Rp46.064.197.000,00 dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.31. Realisasi Belanja Hibah Verifikasi SKPD

No	SKPD pemverifikasi	Jumlah hibah	Setor kembali	hibah per 31 Des 2019
1	KESRA	5.731.800.000,00		5.731.800.000,00
2	TAPEM	1.225.000.000,00	2.878.000,00	1.222.122.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	SKPD pemverifikasi	Jumlah hibah	Setor kembali	hibah per 31 Des 2019
3	DISDIKBUD			
	- Umum	1.255.800.000,00		1.255.800.000,00
	- BOP PAUD	16.730.700.000,00		16.730.700.000,00
	- Pendidik PAUD	686.400.000,00		686.400.000,00
	- BOSDA SMP	1.199.300.000,00		1.199.300.000,00
	- BOSDA SD	1.310.400.000,00		1.310.400.000,00
	- GTT	7.747.200.000,00		7.747.200.000,00
	- BOP Kesetaraan :	4.109.600.000		4.109.600.000,00
	- KSBN	300.000.000,00		300.000.000,00
4	DISPARPORA	3.175.250.000,00		3.175.250.000,00
5	DPUPR			
	- Umum	300.000.000,00		300.000.000,00
	- PAMSIMAS	1.800.000.000,00		1.800.000.000,00
6	DISTANPANGAN	149.000.000,00		149.000.000,00
7	DISPERMADES	75.500.000,00		75.500.000,00
8	DISHUB	45.000.000,00		45.000.000,00
9	DISPERINAKER	0,00		0,00
10	DLH	25.000.000,00		25.000.000,00
11	Dinsos	0,00		0,00
12	DISPETERIKAN	201.125.000,00		201.125.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.067.075.000,00</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>46.064.197.000,00</b>

(4) Belanja Bantuan Sosial

	Tahun 2019	Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>34.807.990.000,00</b>	<b>30.198.609.000,00</b>	<b>42.379.569.000,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial ada pada PPKD sebesar Rp30.198.609.000,00 dan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.32. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Kepada Anggota Masyarakat	34.807.990.000,00	30.198.609.000,00	86,76	42.379.569.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>34.807.990.000,00</b>	<b>30.198.609.000,00</b>	<b>86,76</b>	<b>42.379.569.000,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**b) Belanja Modal**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>475.141.984.218,00</b>	<b>386.529.995.844,00</b>	<b>501.727.375.261,00</b>

Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

Tabel 5.33. Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Tanah	28.650.623.700,00	14.038.662.136,00	49,00	14.739.607.873,00
2	Peralatan dan Mesin	159.960.099.583,00	131.750.646.976,00	82,36	58.710.296.254,00
3	Gedung dan Bangunan	157.672.913.080,00	131.649.038.676,00	83,50	272.403.892.514,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.554.474.285,00	91.473.924.357,00	85,05	135.156.134.118,00
5	Aset Tetap Lainnya	19.326.366.770,00	15.782.598.699,00	81,66	20.198.464.502,00
6	Aset Lainnya (Aset tak berwujud)	1.977.506.800,00	1.835.125.000,00	92,80	518.980.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>475.141.984.218,00</b>	<b>386.529.995.844,00</b>	<b>81,35</b>	<b>501.727.375.261,00</b>

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 tersebut termasuk Belanja Modal yang sumber dananya dari BLUD RSUD Muntitan, BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Belanja Modal BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut.

Tabel 5.34. Realisasi Belanja Modal BLUD dan BOS

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	UPTD Puskesmas	17.080.283.101,00	11.374.901.300,00	66,60	11.696.266.788,00
2	BLUD RSU Muntitan	5.785.421.602,00	5.785.421.602,00	83,94	13.123.105.891,00
3	BOS	31.581.166.431,00	24.093.956.807,00	76,29	21.720.160.077,00
	<b>Subtotal</b>	<b>54.446.871.134,00</b>	<b>41.254.279.709,00</b>	<b>74,26</b>	<b>46.539.532.756,00</b>

Rincian Belanja Modal per SKPD Tahun 2019 dan 2018 secara rinci pada **Lampiran 5.9**.



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:

Tabel 5.35. Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	6.384.145.000,00	3.321.879.980,00	52,03	14.723.947.873,00
2	Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00
3	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	22.266.478.700,00	10.716.782.156,00	48,13	0,00
4	Pengadaan Tanah – BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.650.623.700,00</b>	<b>14.038.662.136,00</b>	<b>49,00</b>	<b>14.739.607.873,00</b>

Rincian belanja modal tanah per SKPD Tahun 2019 dan 2018 secara rinci pada **Lampiran 5.10**.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018:

Tabel 5.36. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	662.167.000,00	654.098.740,00	98,78	599.243.000,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	1.099.829.050,00	1.026.353.950,00	93,32	399.389.750,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	11.071.598.540,00	9.396.965.295,00	84,87	2.614.165.950,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	330.658.000,00	321.553.550,00	97,25	5.200.000,00
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.778.300,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	659.883.000,00	591.446.400,00	89,63	0,00
7	Pengadaan Alat Ukur	1.076.085.460,00	1.002.350.166,00	93,15	723.873.000,00
8	Pengadaan Alat Pengolahan	171.092.000,00	167.885.000,00	98,13	1.100.000,00
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	190.279.000,00	189.845.000,00	99,77	123.639.340,00
10	Pengadaan Alat Kantor	1.641.602.544,00	1.495.748.143,00	91,12	1.534.323.110,00
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.076.703.499,00	11.860.249.410,00	43,80	7.006.017.910,00
12	Pengadaan Komputer	16.966.235.280,00	15.888.546.570,00	93,65	16.356.863.080,00
13	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.270.800,00	41.360.000,00	97,85	233.760.820,00
14	Pengadaan Alat Studio	5.739.779.230,00	5.439.466.242,00	94,77	1.111.730.075,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
15	Pengadaan Alat Komunikasi	189.447.500,00	182.891.920,00	96,53	498.379.300,00
16	Pengadaan Peralatan Pemancar	64.104.000,00	63.936.000,00	99,74	295.994.400,00
17	Pengadaan Alat Kedokteran	8.667.852.884,00	8.281.695.109,00	95,54	5.474.344.215,00
18	Pengadaan Alat Kesehatan	52.881.002.572,00	52.159.843.706,00	98,64	4.729.392.951,00
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	21.230.000,00	21.152.726,00	99,64	40.990.940,00
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.780.794.000,00	1.745.493.026,00	62,77	1.020.000,00
21	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	21.160.000,00
23	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	89.760.000,00	89.251.500,00	99,43	10.736.000,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	14.529.141.197,00	9.613.395.175,00	66,16	11.030.309.682,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- BOS	13.999.084.027,00	11.507.619.348,00	82,20	5.892.884.431,00
	<b>Jumlah</b>	<b>159.960.099.583,00</b>	<b>131.750.646.976,00</b>	<b>82,36</b>	<b>58.710.296.254,00</b>

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018 tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.11**.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 masing-masing SKPD adalah sebagaimana tabel berikut.:

Tabel 5.37. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	145.134.130.762,00	123.548.211.259,00	85,13	256.363.583.567,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	230.000.000,00	227.009.900,00	98,70	1.398.170.875,00
3	Pengadaan Bangunan Menara	192.360.000,00	190.460.000,00	99,01	0,00
4	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	150.685.000,00	150.092.790,00	99,61	141.976.825,00
5	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.661.728.000,00	304.309.950,00	18,31	648.830.745,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	8.404.124.204,00	6.896.027.127,00	82,06	13.709.656.997,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS	1.899.885.114,00	332.927.650,00	0,00	141.673.505,00
	<b>Jumlah</b>	<b>157.672.913.080,00</b>	<b>131.649.038.676,00</b>	<b>83,50</b>	<b>272.403.892.514,00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018 tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.12**.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 masing-masing SKPD adalah sebagaimana berikut:

Tabel 5.38. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Jalan	46.646.706.775,00	37.833.806.124,00	81,11	94.716.354.938,00
2	Pengadaan Jembatan	42.455.309.250,00	37.592.606.410,00	88,55	22.390.744.970,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	15.918.628.000,00	14.182.711.633,00	89,10	16.842.925.925,00
4	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.170.485.260,00	1.163.339.590,00	99,39	349.832.250,00
6	Pengadaan Bangunan Air Kotor	343.950.000,00	66.387.500,00	19,30	0,00
8	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	340.473.850,00
	Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	111.825.100,00
9	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
10	Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	361.681.085,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLUD	1.019.395.000,00	635.073.100,00	62,30	33.196.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>107.554.474.285,00</b>	<b>91.473.924.357,00</b>	<b>85,05</b>	<b>135.156.134.118,00</b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan 2018 tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.13**.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 masing-masing SKPD adalah sebagaimana berikut:

Tabel 5.39. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Buku	2.919.389.480,00	2.814.459.390,00	96,41	2.539.505.355,00
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	7.500.000,00	7.485.000,00	99,80	0,00





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	818.752.500,00
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00		52.160.000,00
5	Pengadaan Tanaman	202.140.000,00	198.940.000,00	98,42	432.017.000,00
6	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	488.640.000,00	485.977.000,00	99,46	624.217.506,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	20.000.000,00	15.827.500,00	79,14	46.210.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	15.682.197.290,00	12.253.409.809,00	78,14	15.685.602.141,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.326.366.770,00</b>	<b>15.782.598.699,00</b>	<b>81,66</b>	<b>20.198.464.502,00</b>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018 tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.14**.

(6) Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 masing-masing SKPD adalah sebagaimana berikut:

Tabel 5.40. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.977.506.800,00	1.835.125.000,00	92,80	518.980.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.977.506.800,00</b>	<b>1.835.125.000,00</b>	<b>92,80</b>	<b>518.980.000</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2019 sebesar Rp1.835.125.000,00 berupa software dan Kajian untuk Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp518.980.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.15**.

(7) Belanja Modal Dana Bos

Realisasi Belanja Modal Dana BOS pada Tahun 2019 sebesar Rp24.093.956.807,00

c) Belanja Tak Terduga

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>3.043.828.500,00</b>	<b>73.755.000,00</b>	<b>946.000.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 berupa pembangunan tiga hunian



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

sementara di dusun Bontoran, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/113/KEP/46/209.

**3) Transfer**

Tahun 2019		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>688.169.174.328,00</b>	<b>683.911.889.966,00</b>	<b>529.426.433.367,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Anggaran dan realisasi transfer tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.41. Realisasi Transfer

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>A</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>19.576.722.300,00</b>	<b>18.900.059.265,00</b>	<b>96,54</b>	<b>15.546.920.254,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak	14.228.154.800,00	14.130.217.300,00	99,31	11.517.775.700,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi)	5.348.567.500,00	4.769.841.965,00	89,18	4.029.144.554,00
<b>B</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>668.592.452.028,00</b>	<b>665.011.830.701,00</b>	<b>99,46</b>	<b>513.879.513.113,00</b>
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lain	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	666.465.374.028,00	663.934.864.201,00	99,62	512.572.360.113,00
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.127.078.000,00	1.076.966.500,00	50,63	1.057.153.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>688.169.174.328,00</b>	<b>683.911.889.966,00</b>	<b>99,38</b>	<b>529.426.433.367,00</b>

**a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

**(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>14.228.154.800,00</b>	<b>14.130.217.300,00</b>	<b>11.517.775.700,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer – Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 ke desa. Rincian Belanja Transfer - Bagi Hasil Pajak sebesar Rp14.130.217.300,00 mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/408/KEP/13/2019 sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.42. Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Salaman	651.904.000,00	651.904.000,00	100,00	528.947.000,00
2	Kecamatan Borobudur	1.404.031.800,00	1.373.393.800,00	97,82	1.139.200.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	364.445.000,00	364.445.000,00	100,00	295.705.000,00
4	Kecamatan Salam	578.121.000,00	578.121.000,00	100,00	469.078.000,00
5	Kecamatan Srumbung	740.735.000,00	739.765.000,00	99,87	601.021.000,00
6	Kecamatan Dukun	614.371.000,00	612.696.000,00	99,73	497.377.000,00
7	Kecamatan Sawangan	592.984.000,00	592.984.000,00	100,00	481.140.000,00
8	Kecamatan Muntilan	669.783.000,00	669.783.000,00	100,00	543.453.000,00
9	Kecamatan Mungkid	622.634.000,00	622.634.000,00	100,00	505.194.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	1.101.036.000,00	1.069.202.500,00	97,11	893.364.000,00
11	Kecamatan Tempuran	540.131.000,00	540.131.000,00	100,00	438.253.000,00
12	Kecamatan Kajoran	824.736.000,00	824.130.000,00	99,93	669.181.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	599.320.000,00	599.320.000,00	100,00	486.279.000,00
14	Kecamatan Bandongan	479.762.000,00	479.762.000,00	100,00	389.274.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	581.019.000,00	581.019.000,00	100,00	471.430.000,00
16	Kecamatan Pakis	607.597.000,00	607.597.000,00	100,00	492.996.000,00
17	Kecamatan Ngablak	484.443.000,00	484.443.000,00	100,00	393.068.000,00
18	Kecamatan Grabag	895.356.000,00	895.356.000,00	100,00	726.477.700,00
19	Kecamatan Tegalrejo	640.008.000,00	640.008.000,00	100,00	519.294.000,00
20	Kecamatan Secang	656.453.000,00	624.238.000,00	95,09	507.019.000,00
21	Kecamatan Windusari	579.285.000,00	579.285.000,00	100,00	470.025.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.228.154.800,00</b>	<b>14.130.217.300,00</b>	<b>99,31</b>	<b>11.517.775.700,00</b>

Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak per Desa sebagaimana pada **Lampiran 5.16**.

**(2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>5.348.567.500,00</b>	<b>4.769.841.965,00</b>	<b>4.029.144.554,00</b>

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi) Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari transfer kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang. Bagi hasil retribusi kepada



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Pemerintah Provinsi adalah sehubungan dengan pengelolaan Objek Wisata Ketep Pass yang merupakan *sharing* antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian 50:50. Anggaran dan realisasi transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi) tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.43. Realisasi Bagi Hasil Pendapatan lainnya (Retribusi)

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota</b>	<b>1.946.587.000,00</b>	<b>1.390.419.865,00</b>	<b>71,43</b>	<b>1.197.321.037,00</b>
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi Jawa Tengah	1.946.587.000,00	1.390.419.865,00	71,43	1.197.321.037,00
	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>	<b>3.401.980.500,00</b>	<b>3.379.422.100,00</b>	<b>99,34</b>	<b>2.831.823.517,00</b>
1	Kecamatan Salaman	179.809.000,00	179.809.000,00	100,00	156.064.301,00
2	Kecamatan Borobudur	165.624.000,00	159.856.000,00	96,52	143.750.461,00
3	Kecamatan Ngluwar	46.438.000,00	46.438.000,00	100,00	40.306.016,00
4	Kecamatan Salam	94.910.000,00	94.910.000,00	100,00	82.376.755,00
5	Kecamatan Srumbung	96.023.000,00	96.023.000,00	100,00	83.341.674,00
6	Kecamatan Dukun	105.022.000,00	105.022.000,00	100,00	91.151.596,00
7	Kecamatan Sawangan	507.397.025,00	507.397.025,00	100,00	417.988.023,00
8	Kecamatan Muntilan	435.579.075,00	435.579.075,00	100,00	310.886.096,00
9	Kecamatan Mungkid	112.326.000,00	112.326.000,00	100,00	97.492.283,00
10	Kecamatan Mertoyudan	90.652.000,00	90.652.000,00	100,00	78.521.801,00
11	Kecamatan Tempuran	98.960.000,00	98.960.000,00	100,00	85.890.201,00
12	Kecamatan Kajoran	162.043.000,00	155.334.000,00	95,86	140.640.464,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	141.370.000,00	141.370.000,00	100,00	122.708.186,00
14	Kecamatan Bandongan	88.007.000,00	88.007.000,00	100,00	76.384.438,00
15	Kecamatan Candimulyo	107.209.000,00	107.209.000,00	100,00	92.645.948,00
16	Kecamatan Pakis	125.477.000,00	125.477.000,00	100,00	108.906.202,00
17	Kecamatan Ngablak	114.808.000,00	114.808.000,00	100,00	100.114.703,00
18	Kecamatan Grabag	380.906.000,00	380.906.000,00	100,00	308.153.398,00
19	Kecamatan Tegalrejo	122.101.000,00	122.101.000,00	100,00	105.975.591,00
20	Kecamatan Secang	117.467.400,00	107.386.000,00	91,42	93.203.375,00
21	Kecamatan Windusari	109.852.000,00	109.852.000,00	100,00	95.322.005,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
	Jumlah	5.348.567.500,00	4.769.841.965,00	89,18	4.029.144.554,00

Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya per Desa adalah sebagaimana **Lampiran 5.17**.

**b) Transfer Bantuan Keuangan**

**(1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan ke Pemerintahan Desa yaitu terdiri dari Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Magelang, Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah Kabupaten Magelang, dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang. Anggaran dan realisasi transfer bantuan keuangan ke desa tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagaimana berikut:

Tabel 5.44. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan kepada Desa / kelurahan Penghasil Sumber Daya Air	838.750.000,00	834.468.391,00	99,49	776.321.041,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Desa	383.071.777.000,00	383.071.777.000,00	100,00	325.360.832.000,00
3	Bantuan Keuangan (ADD) ke Desa	198.589.134.928,00	198.161.157.416,00	99,78	141.323.207.072,00
4	Bantuan Keuangan Khusus ke Desa	83.965.712.100,00	81.867.461.394,00	97,50	45.112.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>666.465.374.028,00</b>	<b>663.934.864.201,00</b>	<b>99,62</b>	<b>512.572.360.113,00</b>

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.45. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Per Kecamatan

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Kecamatan Salaman	20.632.388.000,00	20.632.388.000,00	100,00	17.681.511.000,00
2	Kecamatan Borobudur	19.447.049.000,00	19.447.049.000,00	100,00	16.818.081.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	7.756.948.000,00	7.756.948.000,00	100,00	6.574.540.000,00
4	Kecamatan Salam	11.217.839.000,00	11.217.839.000,00	100,00	9.904.183.000,00
5	Kecamatan Srumbung	16.504.217.000,00	16.504.217.000,00	100,00	13.768.909.000,00
6	Kecamatan Dukun	14.987.258.000,00	14.987.258.000,00	100,00	12.508.751.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
7	Kecamatan Sawangan	16.263.917.000,00	16.263.917.000,00	100,00	13.525.412.000,00
8	Kecamatan Muntilan	12.916.348.000,00	12.916.348.000,00	100,00	10.912.329.000,00
9	Kecamatan Mungkid	13.745.453.000,00	13.745.453.000,00	100,00	11.755.338.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	12.902.025.000,00	12.902.025.000,00	100,00	10.446.493.000,00
11	Kecamatan Tempuran	15.947.053.000,00	15.947.053.000,00	100,00	13.653.395.000,00
12	Kecamatan Kajoran	29.816.020.000,00	29.816.020.000,00	100,00	25.968.279.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	23.077.162.000,00	23.077.162.000,00	100,00	20.336.583.000,00
14	Kecamatan Bandongan	15.195.070.000,00	15.195.070.000,00	100,00	12.515.074.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	19.750.631.000,00	19.750.631.000,00	100,00	16.283.778.000,00
16	Kecamatan Pakis	23.170.162.000,00	23.170.162.000,00	100,00	18.851.141.000,00
17	Kecamatan Ngablak	16.600.632.000,00	16.600.632.000,00	100,00	14.730.459.000,00
18	Kecamatan Grabag	31.313.428.000,00	31.313.428.000,00	100,00	26.594.007.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	20.237.389.000,00	20.237.389.000,00	100,00	17.695.398.000,00
20	Kecamatan Secang	20.257.888.000,00	20.257.888.000,00	100,00	15.888.083.000,00
21	Kecamatan Windusari	21.332.900.000,00	21.332.900.000,00	100,00	18.949.088.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>383.071.777.000,00</b>	<b>383.071.777.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>325.360.832.000,00</b>

Rincian Transfer Dana Desa per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.18**.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.46. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Per Kecamatan

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
1	Kecamatan Salaman	10.936.646.200,00	10.936.646.200,00	100,00	7.773.611.000,00
2	Kecamatan Borobudur	10.470.867.400,00	10.393.930.467,00	99,27	7.419.215.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	4.424.172.200,00	4.424.172.200,00	100,00	3.133.140.000,00
4	Kecamatan Salam	6.551.657.200,00	6.551.657.200,00	100,00	4.637.202.000,00
5	Kecamatan Srumbung	9.345.533.600,00	9.345.533.600,00	100,00	6.647.992.400,00
6	Kecamatan Dukun	8.951.163.200,00	8.951.161.400,00	100,00	6.381.067.000,00
7	Kecamatan Sawangan	9.479.433.200,00	9.479.433.200,00	100,00	6.915.701.000,00
8	Kecamatan Muntilan	7.692.892.600,00	7.692.892.600,00	100,00	5.458.553.000,00
9	Kecamatan Mungkid	8.149.311.200,00	8.149.311.200,00	100,00	5.849.519.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	7.465.532.200,00	7.465.532.200,00	100,00	5.406.504.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
11	Kecamatan Tempuran	7.807.118.600,00	7.807.118.600,00	100,00	5.581.870.000,00
12	Kecamatan Kajoran	14.056.055.000,00	14.056.055.000,00	100,00	10.024.240.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	10.321.617.000,00	10.321.617.000,00	100,00	7.336.187.000,00
14	Kecamatan Bandongan	7.893.665.660,00	7.893.665.660,00	100,00	5.601.227.740,00
15	Kecamatan Candimulyo	9.891.227.200,00	9.891.227.200,00	100,00	6.989.109.000,00
16	Kecamatan Pakis	11.106.082.000,00	11.106.082.000,00	100,00	7.883.450.000,00
17	Kecamatan Ngablak	8.036.713.400,00	8.029.987.417,00	99,92	5.695.433.000,00
18	Kecamatan Grabag	15.217.887.400,00	15.217.887.400,00	100,00	10.848.117.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	10.609.951.200,00	10.609.951.200,00	100,00	7.367.713.000,00
20	Kecamatan Secang	10.178.630.668,00	9.834.317.872,00	96,62	7.135.036.932,00
21	Kecamatan Windusari	10.002.977.800,00	10.002.977.800,00	100,00	7.238.319.000,00
Jumlah		198.589.134.928,00	198.161.157.416,00	99,78	141.323.207.072,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.19**.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.47. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan khusus

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kecamatan Salaman	5.697.906.000,00	5.592.906.000,00	98,16	2.511.200.000,00
2	Kecamatan Borobudur	3.511.304.000,00	3.416.304.000,00	97,29	2.590.520.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	3.794.198.275,00	3.704.197.000,00	97,63	1.738.750.000,00
4	Kecamatan Salam	3.164.174.400,00	2.922.676.000,00	92,37	2.437.408.000,00
5	Kecamatan Srumbung	1.747.300.000,00	1.697.300.000,00	97,14	1.289.229.000,00
6	Kecamatan Dukun	3.822.866.000,00	3.662.866.000,00	95,81	816.562.000,00
7	Kecamatan Sawangan	5.513.726.000,00	5.448.726.000,00	98,82	2.323.769.000,00
8	Kecamatan Muntilan	2.121.758.208,00	1.886.758.207,00	88,92	1.510.520.000,00
9	Kecamatan Mungkid	7.498.344.717,00	7.239.593.677,00	96,55	1.342.000.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	6.774.869.200,00	6.722.869.210,00	99,23	2.944.800.000,00
11	Kecamatan Tempuran	3.238.315.800,00	3.123.315.800,00	96,45	1.459.100.000,00
12	Kecamatan Kajoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	1.814.700.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	3.544.700.000,00	3.544.700.000,00	100,00	2.848.417.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
14	Kecamatan Bandongan	1.100.000.000,00	1.075.000.000,00	97,73	1.144.000.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	2.162.212.000,00	2.162.212.000,00	100,00	1.063.900.000,00
16	Kecamatan Pakis	10.033.037.500,00	9.783.037.500,00	97,51	3.498.250.000,00
17	Kecamatan Ngablak	3.520.000.000,00	3.189.000.000,00	90,60	4.818.500.000,00
18	Kecamatan Grabag	4.143.000.000,00	4.118.000.000,00	99,40	3.185.300.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	3.219.000.000,00	3.219.000.000,00	100,00	2.204.000.000,00
20	Kecamatan Secang	1.801.000.000,00	1.801.000.000,00	100,00	1.418.375.000,00
21	Kecamatan Windusari	4.258.000.000,00	4.258.000.000,00	100,00	2.152.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>83.965.712.100,00</b>	<b>81.867.461.394,00</b>	<b>97,50</b>	<b>45.112.000.000,00</b>

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.20**

(2) **Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Tahun 2019		Tahun 2018
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>2.127.078.000,00</b>	<b>1.076.966.500,00</b>	<b>1.057.153.000,00</b>

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2019 dan 2018 adalah bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010. SK Bupati Nomor 180.182/361/KEP/47/2019 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Magelang Tahun 2019. Anggaran dan realisasi Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 dan realisasi tahun 2018 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.48. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	482.325.000,00	252.164.000,00	52,28	239.715.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	421.905.000,00	218.847.000,00	51,87	209.686.000,00
3	Partai Gerindra	381.381.000,00	181.005.000,00	47,46	189.546.000,00
4	Partai Golongan Karya	222.141.000,00	112.830.500,00	50,79	110.404.000,00





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
5	Partai Amanat Nasional	190.146.000,00	88.787.000,00	46,69	94.502.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	188.847.000,00	98.794.000,00	52,31	93.856.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	132.939.000,00	73.495.000,00	55,28	66.070.000,00
8	Partai Demokrat	107.394.000,00	51.044.000,00	47,53	53.374.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.127.078.000,00</b>	<b>1.076.966.500,00</b>	<b>50,63</b>	<b>1.057.153.000,00</b>

#### 4) PEMBIAYAAN

Struktur APBD TA 2019 terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, termasuk transaksi untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan daerah antara lain:

- Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, transfer dari Dana Cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali Pembayaran Pajak.
- Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke Dana Cadangan, penyertaan modal, pemberian Pinjaman Daerah, dan Pembayaran Pengembalian Pajak.
- Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp222.336.981.082,00 dan anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp11.704.000.000,00.
- Adapun realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2019 untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp222.184.974.911,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.204.000.000,00.

Realisasi Pembiayaan TA 2019 dan 2018 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.49. Realisasi Pembiayaan

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>222.336.981.082,00</b>	<b>222.184.974.911,00</b>	<b>99,93</b>	<b>432.441.998.635,00</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	222.336.981.082,00	222.336.981.082,00	100,00	301.191.010.635,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	<b>0,00</b>	131.250.988.000,00
3	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun	0,00	(163.406.171,00)	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
	Sebelumnya				
4	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11.704.000.000,00</b>	<b>10.204.000.000,00</b>	<b>87,18</b>	<b>25.755.000.000,00</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD	11.704.000.000,00	10.204.000.000,00	87,18	25.755.000.000,00
3	<b>JUMLAH</b>	<b>210.632.981.082,00</b>	<b>211.980.974.911,00</b>	<b>100,64</b>	<b>406.686.998.635,00</b>

**a) Penerimaan Pembiayaan**

**(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)**

Pada tahun 2019, penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah Rp222.336.981.082,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp222.336.981.082,00.

**(2) Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.50. Realisasi Pencairan Dana Cadangan

No	Uraian	Realisasi 2019 (Audited)	Realisasi 2018 (Audited)	Dasar hukum
1	Pembangunan Pasar Munttilan	0,00	52.029.119.000,00	Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pasar munttilan
2	Pembangunan RSUD Tipe B	0,00	41.250.000.000,00	Perda No.12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan RSUD Tipe B
3	Pilbub Pilwabub	0,00	37.971.869.000,00	Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilbub
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00	Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip
5	Pembangunan Pasar Secang	0,00	0,00	Kebutuhan 23 m, dicadangkan 20 m dan kekurangan 3 m dicadangkan di perubahan 2015. Pelaksanaan BL th 2016. Perda No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang.
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250.988.000,00</b>	

**(3) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Saldo akhir Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun 2019 sebesar Rp0,00.



**(4) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya**

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun 2019 sebesar Rp11.400.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp11.400.000,00

**b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

**(1) Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan Dana Cadangan tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan tahun 2018 sebesar Rp0,00.

**(2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD**

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD sebesar Rp10.204.000.000,00 secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.51. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi)

No	Uraian	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	PD. BPR Bapas 69	0,00	0,00	0,00	5.225.000.000,00
2	PDAM Tirta Gemilang	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	75,00	5.500.000.000,00
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PD BPR BKK Muntilan	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
5	PD BKK Tempuran	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
6	PT Bank Jawa Tengah	5.704.000.000,00	5.704.000.000,00	100,00	13.530.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.704.000.000,00</b>	<b>10.204.000.000,00</b>	<b>87,18</b>	<b>25.755.000.000,00</b>

**5) SISA ANGGARAN LEBIH (SILPA)**

Secara keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52. Sisa Anggaran Lebih (SILPA)

No	Uraian	2019 (Audited)	2018 (Audited)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Realisasi Pendapatan	2.575.439.825.755,00	2.302.190.543.616,00
b.	Realisasi Belanja dan Transfer	2.568.593.603.007,00	2.486.540.561.169,00
c.	<b>Surplus/Sisa Lebih tahun Berjalan (a-b)</b>	<b>6.846.222.748,00</b>	<b>(184.350.017.553,00)</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	2019 (Audited)	2018 (Audited)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
d.	Realisasi Pembiayaan		
	1) Penerimaan	222.184.974.911,00	432.441.998.635,00
	2) Pengeluaran	10.204.000.000,00	25.755.000.000,00
	<b>3) Pembiayaan Netto (1 - 2)</b>	<b>211.980.974.911,00</b>	<b>406.686.998.635,00</b>
e.	<b>Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2019</b>	<b>218.827.197.659,00</b>	<b>222.336.981.082,00</b>

Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp218.827.197.659,00 yang terdiri atas SiLPA mengikat sebesar Rp67.140.196.271,00 dan SiLPA tidak mengikat sebesar Rp151.687.001.388,00. Rincian SiLPA mengikat Tahun 2019 dijelaskan pada **Lampiran 5.21**.

### 5.b. PENJELASAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 5.53. Penjelasan Perubahan SAL

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	222.336.981.082,00	303.453.312.294,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	222.173.574.911,00	301.191.010.635,00
<b>Sub Total</b>	<b>163.406.171,00</b>	<b>2.262.301.659,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	218.827.197.659,00	222.336.981.082,00
<b>Sub Total</b>	<b>218.990.603.830,00</b>	<b>224.599.282.741,00</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(163.406.171,00)	(2.262.301.659,00)
Lain-lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>218.827.197.659,00</b>	<b>222.336.981.082,00</b>

Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2019 sebesar Rp222.336.981.082,00 dan tahun 2018 sebesar Rp303.453.312.294,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp222.173.574.911,00 dan tahun 2018 sebesar Rp301.191.010.635,00 merupakan nilai Penggunaan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berjalan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp218.827.197.659,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp222.336.981.082,00.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp163.406.171,00) karena adanya kesalahan pencatatan Dana BOS. Koreksi tersebut terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Koreksi saldo awal Kas BOS	:	(Rp69.673.997,00)
Koreksi pengakuan utang Gulkin	:	Rp14.337.826,00
Koreksi pengakuan utang lebih salur dana BOS	:	<u>(Rp108.070.000,00)</u>
<b>Jumlah</b>		<b>(Rp163.406.171,00)</b>

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp163.406.171,00) karena adanya kesalahan pencatatan Dana BOS.

Saldo Anggaran Lebih akhir tahun 2019 sebesar Rp218.827.197.659,00 dan tahun 2018 sebesar Rp222.336.981.082,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih akhir pada tahun berjalan.

### 5.c. PENJELASAN POS – POS NERACA

#### 1) ASET LANCAR

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>Rp294.824.172.624,21</u>	<u>Rp314.935.347.535,34</u>

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Rincian aset lancar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.54. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
Kas di Kas Daerah	196.367.954.777,00	56.941.053.981,00
Kas di Bendahara Penerimaan	124.504.800,00	101.836.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.739.169,00
Kas di BLUD	19.457.692.305,00	19.228.727.881,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	65.000.000.000,00
Kas BOS	2.943.171.436,00	1.347.001.214,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	80.000.000.000,00
Piutang Pendapatan	46.593.739.033,48	64.170.698.166,73
Piutang Lainnya	28.961.609.618,50	21.176.632.734,50
Penyisihan Piutang	(21.283.715.218,95)	(19.040.616.049,74)
Beban Dibayar Dimuka	248.030.000,00	4.844.352.786,00
Persediaan	21.411.185.873,18	21.159.921.152,85
<b>Jumlah</b>	<b>294.824.172.624,21</b>	<b>314.935.347.535,34</b>

#### Kas dan Setara Kas

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>Rp218.893.323.318,00</u>	<u>Rp142.624.358.745,00</u>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah, Setara Kas, dan Kas BOS sebagai berikut :

Tabel 5.55. Kas dan Setara Kas

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2019 (Audited)(Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	196.367.954.777,00	56.941.053.981,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	124.504.800,00	101.836.500,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.739.169,00
4.	Kas di BLUD	19.457.692.305,00	19.228.727.881,00
5.	Setara Kas	0,00	65.000.000.000,00
6.	Kas BOS	2.943.171.436,00	1.347.001.214,00
	<b>Jumlah</b>	<b>218.893.323.318,00</b>	<b>142.624.358.745,00</b>

a) **Kas di Kas Daerah**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>Rp196.367.954.777,00</u>	<u>Rp56.941.053.981,00</u>

Adalah saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah /Pemegang Kas Daerah per 31 Desember 2019 rekening giro Bank Jateng 1.005.02340.1. Saldo riil pada RC Bank Jateng berjumlah Rp196.374.636.436,00 atau terdapat selisih sebesar Rp6.681.659,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Setoran pengembalian gaji Dinas Kesehatan tanggal 30 Desember 2019 kurang input oleh Bank Jateng sebesar Rp250.200,00.
2. Setoran sisa UP milik Pemerintah Kota Magelang tanggal 30 Desember 2019 diinput sebagai pemasukan Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp6.931.859,00.

b) **Kas di Bendahara Penerimaan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>Rp124.504.800,00</u>	<u>Rp101.836.500,00</u>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.56. Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	31 Desember 2019(Audited) (Rp)	31 Desember 2018(Audited) (Rp)	Tanggal Penyetoran ke RKUD
1.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	60.850.600,00	94.083.000,00	3 Januari 2020
				2,3,4 Januari 2019
2.	Dinas Perhubungan	63.654.200,00	5.953.500,00	2 Januari 2020
				2 Januari 2019
3.	Dinas Peterikan	0,00	1.800.000,00	7 Januari 2019
4	Kecamatan Salam	0,00	0,00	
<b>Kas Bendahara Penerimaan</b>		<b>124.504.800,00</b>	<b>101.836.500,00</b>	

c) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp0,00**

**Rp5.739.169,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
1.	Sisa Belanja	1.Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
		2.Disparpora	0,00	0,00
		3.Kecamatan Salam	0,00	0,00
		4.Kecamatan Bandongan	0,00	0,00
		5.Kecamatan Pakis	0,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pajak yang belum disetor	1.Sekretariat Daerah	0,00	1.234.264,00
		2.Kecaman Mungkid	0,00	2.146.258,00
		3.Kecamatan Salam	0,00	951.973,00
			0,00	0,00
		4.Kecamatan Bandongan	0,00	1.406.600,00
			0,00	0,00
		5.Kantor Kesbangpol	0,00	0,00
		6.Dispermades	0,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.095,00</b>
3.	Utang PFK	1.Kecamatan Srumbung	0,00	74,00
		2.Kecamatan Salam	0,00	0,00
		3.Kecamatan Dukun	0,00	0,00
		4.Kecamatan Sawangan	0,00	0,00
		5.Kecamatan Grabag	0,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
4.	Pendapatan Jasa giro yang belum disetor ke RKUD	1.BPPKAD	0,00	0,00
<b>Kas Bendahara Pengeluaran</b>			<b>0,00</b>	<b>5.739.169,00</b>

d) Kas di BLUD

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp19.457.692.305,00**

**Rp19.228.727.881,00**

Adalah saldo kas yang masih ada di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas Tahun 2019 sebesar Rp19.457.692.305,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58. Kas Bendahara BLUD

No.	Uraian	31 Desember 2019(Audited) (Rp)	31 Desember 2018(Audited) (Rp)
	<b>Kas di BLUD RSUD Muntitan</b>		
1.	Kas Bendahara Penerimaan	36.523.585,00	23.290.466,00
	1. Pendapatan Tunai	36.523.585,00	23.290.466,00
	2. Titipan Pasien	0,00	0,00
2.	Kas Bendahara Pengeluaran	9.276.341.448,00	9.495.655.517,00
	1. Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	9.276.341.448,00	9.495.655.517,00
<b>JUMLAH KAS BLUD RSUD Muntitan</b>		<b>9.312.865.033,00</b>	<b>9.518.945.983,00</b>
	<b>Kas di BLUD Puskesmas</b>		
1.	Puskesmas Salaman I	277.378.186,00	21.416.389,00
2.	Puskesmas Salaman II	100.093.727,00	17.546.166,00
3.	Puskesmas Borobudur	747.128.746,00	844.634.995,00
4.	Puskesmas Ngluwar	209.367.953,00	196.755.483,00
5.	Puskesmas Salam	59.231.708,00	181.855.046,00
6.	Puskesmas Srumbung	135.285.066,00	284.096.146,00
7.	Puskesmas Dukun	366.099.310,00	69.713.160,00
8.	Puskesmas Sawangan I	169.702.198,00	197.920.162,00
9.	Puskesmas Sawangan II	181.815.526,00	81.948.896,00
10.	Puskesmas Muntitan I	190.015.087,00	265.197.545,00
11.	Puskesmas Muntitan II	175.151.183,00	278.983.235,00
12.	Puskesmas Mungkid	607.464.025,00	454.650.739,00
13.	Puskesmas Mertoyudan I	5.684.594,00	144.786.374,00
14.	Puskesmas Mertoyudan II	516.555.745,00	259.861.416,00
15.	Puskesmas Tempuran	111.706.100,00	338.911.221,00
16.	Puskesmas Kajoran I	288.609.367,00	97.731.699,00
17.	Puskesmas Kajoran II	108.225.973,00	36.638.464,00





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019(Audited) (Rp)	31 Desember 2018(Audited) (Rp)
18.	Puskesmas Kalingkrik	534.953.701,00	248.383.644,00
19.	Puskesmas Bandongan	435.639.462,00	997.285.662,00
20.	Puskesmas Candimulyo	18.321.007,00	199.916.978,00
21.	Puskesmas Pakis	784.167.192,00	1.412.366.279,00
22.	Puskesmas Ngablak	314.992.437,00	165.330.375,00
23.	Puskesmas Grabag I	1.408.640.047,00	706.960.609,00
24.	Puskesmas Grabag II	122.086.638,00	124.233.969,00
25.	Puskesmas Tegalrejo	259.980.841,00	122.194.648,00
26.	Puskesmas Secang I	1.333.097.659,00	1.026.540.540,00
27.	Puskesmas Secang II	202.598.326,00	276.248.515,00
28.	Puskesmas Windusari	396.493.012,00	527.083.126,00
29.	Puskesmas Kota Mungkid	84.342.456,00	130.590.417,00
	<b>Jumlah Kas BLUD Puskesmas</b>	<b>10.144.827.272,00</b>	<b>9.709.781.898,00</b>
	<b>JUMLAH KAS BLUD</b>	<b>19.457.692.305,00</b>	<b>19.228.727.881,00</b>

e) **Setara Kas**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp0,00**

**Rp65.000.000.000,00**

Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan. Saldo kas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00

f) **Kas BOS**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp2.943.171.436,00**

**Rp1.347.001.214,00**

Kas BOS merupakan bagian dari aset lancar yang merupakan sisa penggunaan dana BOS dari 554 SD Negeri dan 59 SMP Negeri yaitu sebesar Rp2.943.171.436,00.

g) **Investasi Jangka Pendek**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp0,00**

**Rp80.000.000.000,00**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera di cairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

kurang.Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2019 berjumlah Rp0,00

**h) Piutang Pendapatan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp46.593.739.033,48</b>	<b>Rp64.170.698.166,73</b>

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

Tabel 5.59. Piutang Pendapatan

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak	28.143.493.316,48	139.947.919.020,00	136.330.292.702,00	31.761.119.634,48
2	Piutang Retribusi	3.950.203.002,00	306.534.214,00	368.564.462,00	3.888.172.754,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.381.663.223,25	0,00	21.381.663.223,25	0,00
4	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.037.774.298,00	6.533.669.015,00	2.037.774.298,00	6.533.669.015,00
6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.988.231.527,00	3.741.444.830,00	7.988.231.527,00	3.741.444.830,00
7	Piutang pendapatan lainnya	669.332.800,00	0,00	0,00	669.332.800,00
	<b>Jumlah Piutang Pendapatan</b>	<b>64.170.698.166,73</b>	<b>150.529.567.079,00</b>	<b>168.106.526.212,25</b>	<b>46.593.739.033,48</b>

Piutang Pendapatan sejumlah Rp46.593.739.033,48 dapat dikategorikan menjadi piutang lancar, kurang lancar, diragukan tertagih dan macet sebagaimana tabel dalam **Lampiran 5.22**.

Tahun 2019 Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp6.533.669.015,00 merupakan piutang atas kekurangan transfer pemerintah pusat atas bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam berdasar PMK nomor 20/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 sebesar Rp2.675.560.241,00 dan PMK nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp3.858.108.774,00.

**i) Piutang Lainnya**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp28.961.609.618,50</b>	<b>Rp21.176.632.734,50</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

Tabel 5.60. Piutang Lainnya

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	RSUD Muntian				
1.a	Retribusi Rawat Inap	1.466.192.397,50	434.305.833,00	261.621.563,00	1.638.876.667,50
	a. Piutang Pasien Umum Tahun 2019	0,00	434.305.833,00	221.320.906,00	212.984.927,00
	b. Piutang Pasien Umum Tahun 2018	221.381.880,00	0,00	34.586.075,00	186.795.805,00
	c. Piutang Pasien Umum Tahun 2017	168.084.154,00	0,00	1.972.083,00	166.112.071,00
	d. Piutang Pasien Umum Tahun 2016	166.011.095,00	0,00	2.192.549,00	163.818.546,00
	e. Piutang Pasien Umum Tahun 2015	162.998.076,00	0,00	341.850,00	162.656.226,00
	f. Piutang Pasien Umum Tahun 2014	82.451.114,50	0,00	1.208.100,00	81.243.014,50
	g. Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	0,00	0,00	315.375.636,00
	h. Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	0,00	0,00	211.840.847,00
	i. Piutang Pasien Umum Th 2011	77.765.070,00	0,00	0,00	77.765.070,00
	j. Piutang Pasien Umum Th 2007	1.757.875,00	0,00	0,00	1.757.875,00
	k. Piutang Pasien Umum Th 2006	2.177.025,00	0,00	0,00	2.177.025,00
	l. Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	0,00	0,00	56.349.625,00
1.b	Piutang Jamkesmas/ JKN	20.378.618.371,00	27.169.836.183,00	20.378.618.371,00	27.169.836.183,00
	a. Piutang JKN	18.961.624.619,00	26.316.726.569,00	18.961.624.619,00	26.316.726.569,00
	b. Piutang Jamkesda	1.416.993.752,00	853.109.614,00	1.416.993.752,00	853.109.614,00
1.c	Piutang Jamkes Lainnya- Piutang Jasa Raharja 2017	106.276.337,00	772.479,00	107.048.816,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.951.087.105,50</b>	<b>27.604.914.495,00</b>	<b>20.747.288.750,00</b>	<b>28.808.712.850,50</b>
2.	<b>Dinas Kesehatan</b>				
	Piutang Puskesmas BLUD –BPJS				
	a. BPJS	611.394.316,00	102.450.768,00	611.394.316,00	102.450.768,00
	b. Jamkesda	29.224.300,00	46.246.000,00	29.224.300,00	46.246.000,00
	c. Jampersial	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>640.618.616,00</b>	<b>152.896.768,00</b>	<b>640.618.616,00</b>	<b>152.896.768,00</b>
3.	PPKD				
	Eliminasi Piutang Untuk Konsolidasi	-1.415.072.987,00	1.415.072.987,00	0,00	0,00
	Piutang Jamkesda RSUD Muntian ke DINKES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Jamkesda Puskesmas BLUD ke DINKES	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-1.415.072.987,00</b>	<b>1.415.072.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>21.176.632.734,50</b>	<b>29.172.884.250,00</b>	<b>21.387.907.366,00</b>	<b>128.961.609.618,50</b>

Rincian piutang lainnya di lampiran 5.23.

Rincian piutang per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.61. Piutang per SKPD

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	BPPKAD				
	Piutang Pajak	28.143.493.316,48	139.947.919.020,00	136.330.292.702,00	31.761.119.634,48
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	152.750.964,00	25.050.649.281,00	24.892.951.192,00	310.449.053,00
2	Pajak Restoran	489.340.744,00	19.408.844.926,00	18.938.329.070,00	959.856.600,00
3	Pajak Reklame	266.216.537,48	1.172.958.849,00	1.121.265.805,00	317.909.581,48
4.	Pajak Hiburan	8.081.500,00	3.938.997.955,00	3.910.873.455,00	36.206.000,00
5.	Pajak Air Tanah	33.439.525,00	914.261.052,00	879.678.828,00	68.021.749,00
6.	Pajak Hotel	880.179.631,00	16.177.110.872,00	16.136.254.566,00	921.035.937,00
7.	Pajak Parkir	4.501.604,00	1.884.848.283,00	1.875.857.572,00	13.492.315,00
8.	Piutang PBB	23.374.374.546,00	35.703.259.197,00	33.057.309.182,00	26.020.324.561,00
9.	Piutang PPJU	2.934.608.265,00	35.696.988.605,00	35.517.773.032,00	3.113.823.838,00
	Lain-lain PAD yang syah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang pendapatan bunga deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.143.493.316,48</b>	<b>139.947.919.020,00</b>	<b>136.330.292.702,00</b>	<b>31.761.119.634,48</b>
B	RSUD Muntian				
1.	Retribusi Rawat Inap	1.466.192.397,50	434.305.833,00	261.621.563,00	1.638.876.667,50
	a. Piutang Pasien Umum Tahun 2019	0,00	434.305.833,00	221.320.906,00	212.984.927,00
	a. Piutang Pasien Umum Tahun 2018	221.381.880,00	0,00	34.586.075,00	186.795.805,00
	b.. Piutang Pasien Umum Tahun 2017	168.084.154,00	0,00	1.972.083,00	166.112.071,00
	c. Piutang Pasien Umum Tahun 2016	166.011.095,00	0,00	2.192.549,00	163.818.546,00
	d. Piutang Pasien Umum Tahun 2015	162.998.076,00	0,00	341.850,00	162.656.226,00
	e. Piutang Pasien Umum Tahun 2014	82.451.114,50	0,00	1.208.100,00	81.243.014,50
	f. Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	0,00	0,00	315.375.636,00
	g.. Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	0,00	0,00	211.840.847,00
	h. Piutang Pasien Umum Th 2011	77.765.070,00	0,00	0,00	77.765.070,00
	i. Piutang Pasien Umum Th 2007	1.757.875,00	0,00	0,00	1.757.875,00
	j. Piutang Pasien Umum Th 2006	2.177.025,00	0,00	0,00	2.177.025,00
	k. Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	0,00	0,00	56.349.625,00
2.	Piutang Jamkesmas/ JKN	20.378.618.371,00	27.169.836.183,00	20.378.618.371,00	27.169.836.183,00
	a. Piutang JKN	18.961.624.619,00	26.316.726.569,00	18.961.624.619,00	26.316.726.569,00
	b. Piutang Jamkesda	1.416.993.752,00	853.109.614,00	1.416.993.752,00	853.109.614,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
3.	Piutang Jamkes Lainnya	106.276.337,00	772.479,00	107.048.816,00	0,00
	a. Piutang Jasa Raharja 2017	106.276.337,00	772.479,00	107.048.816,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.951.087.105,50</b>	<b>27.604.914.495,00</b>	<b>20.747.288.750,00</b>	<b>28.808.712.850,50</b>
C	Dinas Perhubungan				
1	Tunggakan Retribusi Terminal	157.348.350,00	26.326.050,00	9.168.800,00	174.505.600,00
2.	Tunggakan Retribusi Parkir	15.131.500,00	18.810.500,00	15.131.500,00	18.810.000,00
3.	Tunggakan Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah	0,00	9.186.000,00	4.480.000,00	4.706.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>172.479.850,00</b>	<b>54.322.050,00</b>	<b>28.780.300,00</b>	<b>198.021.600,00</b>
D	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM				
1	Retribusi Bulanan	331.965.213,00	183.425.542,00	247.258.614,00	268.132.141,00
2	Penempatan pertama	3.124.358.336,00	0,00	78.385.000,00	3.045.973.336,00
3	Perpanjangan	15.265.000,00	2.365.000	0,00	17.630.000,00
4	kurang catat tahun 2017	171.638.638,00	51.690.422,00	0,00	223.329.060,00
5	Piutang Retribusi(tagihan sewa dibelakang metro square)	106.958.000,00	0,00	0,00	106.958.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.750.185.187,00</b>	<b>237.480.964,00</b>	<b>325.643.614,00</b>	<b>3.662.022.537,00</b>
E	Dinas Komunikasi dan Informatika				
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.284.265,00	0,00	0,00	7.284.265,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.284.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284.265,00</b>
F	PPKD				
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	21.381.663.223,25	0,00	21.381.663.223,25	0,00
1	Piutang bagian laba dari BUMD	21.381.663.223,25	0,00	21.381.663.223,25	0,00
	Piutang lain-lain PAD yang syah	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang pendapatan bunga deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat lainnya	2.037.774.298,00	6.533.669.015,00	2.037.774.298,00	6.533.669.015,00
1	Piutang bagi hasil SDA	2.037.774.298,00	6.533.669.015,00	2.037.774.298,00	6.533.669.015,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.988.231.527,00	3.741.444.830,00	7.988.231.527,00	3.741.444.830,00
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	2.518.866.850,00	2.149.836.934,00	2.518.866.850,00	2.149.836.934,00
2.	Pajak BBNKB	1.527.713.428,00	1.567.620.179,00	1.527.713.428,00	1.567.620.179,00
3.	Pajak Bahan Bakar KB	3.923.775.042,00	4.052.248,00	3.923.775.042,00	4.052.248,00
4.	Pajak Pengambilan	17.876.207,00	19.935.469,00	17.876.207,00	19.935.469,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	dan Pemanfaatan Air Permukaan				
5.	Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang lainnya	(1.415.072.987,00)	1.415.072.987,00	0,00	0,00
	Eliminasi Piutang untuk konsolidasi				
1	Piutang Jamkesda RSUD Muntilan ke dinkes	(1.415.072.987,00)	1.415.072.987,00	0,00	0,00
2	Piutang Jamkesda Puskesmas BLUD ke dinkes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.992.596.061,25</b>	<b>11.690.186.832,00</b>	<b>31.407.669.048,25</b>	<b>10.275.113.845,00</b>
G	Dinas Kesehatan				
	Piutang Puskesmas BLUD				
1	BPJS	611.394.316,00	102.450.768,00	611.394.316,00	102.450.768,00
2	Jamkesda	29.224.300,00	46.246.000,00	29.224.300,00	46.246.000,00
3	Jampersal		4.200.000,00		4.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>640.618.616,00</b>	<b>152.896.768,00</b>	<b>640.618.616,00</b>	<b>152.896.768,00</b>
H	DPUPR				
	Piutang pendapatan lainnya				
1	Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Excavator) 2003	669.332.800,00	0,00	0,00	669.332.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>669.332.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.332.800,00</b>
I	Dispeterikan				
1	Retribusi pelayanan pasar hewan muntilan	2.558.900,00	4.752.000,00	4.648.748,00	2.662.152,00
2	Retribusi pelayanan pasar hewan grabag	17.694.800,00	9.979.200,00	9.491.800,00	18.182.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.253.700,00</b>	<b>14.731.200,00</b>	<b>14.140.548,00</b>	<b>20.844.352,00</b>

j) Penyisihan Piutang

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp21.283.715.218,95)

(Rp19.040.616.049,74)

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diantaranya mengatur tentang kebijakan akuntansi piutang. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Saldo piutang di atas merupakan saldo piutang bersih per 31 Desember 2018 yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.62. Penyisihan Piutang

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited)	Penyisihan Piutang	NRV Piutang
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>			
1.	Piutang Pajak	31.761.119.634,48	16.829.510.901,70	14.931.608.732,78
2.	Piutang Retribusi	3.888.172.754,00	2.809.874.183,20	1.078.298.570,80
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6,533,669,015.00	0,00	6,533,669,015.00
6.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3,741,444,830.00	0,00	3,741,444,830.00
7.	Piutang pendapatan lainnya	669.332.800,00	669.332.800,00	0,00
	<b>Jumlah Piutang Pendapatan</b>	<b>46,593,739,033.48</b>	<b>20,308,717,884.90</b>	<b>26,285,021,148.58</b>
<b>B</b>	<b>Piutang Lainnya</b>			
1	RSUD Muntian			
1.a	Retribusi Rawat Inap			
	a. Piutang Pasien Umum Tahun 2019	212.984.927,00	0,00	212.984.927,00
	b. Piutang Pasien Umum Tahun 2018	186.795.805,00	56.038.741,50	130.757.063,50
	c. Piutang Pasien Umum Tahun 2017	166.112.071,00	49.833.621,30	116.278.449,70
	d. Piutang Pasien Umum Tahun 2016	163.818.546,00	81.909.273,00	81.909.273,00
	e. Piutang Pasien Umum Tahun 2015	162.656.226,00	81.328.113,00	81.328.113,00
	f. Piutang Pasien Umum Th 2014	81.243.014,50	40.621.507,25	40.621.507,25
	g. Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	315.375.636,00	0,00
	h. Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	211.840.847,00	0,00
	i. Piutang Pasien Umum Th 2011	77.765.070,00	77.765.070,00	0,00
	j. Piutang Pasien Umum Th 2007	1.757.875,00	1.757.875,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited)	Penyisihan Piutang	NRV Piutang
	k. Piutang Pasien Umum Tahun 2006	2.177.025,00	2.177.025,00	0,00
	l. Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	56.349.625,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.638.876.667,50</b>	<b>974.997.334,05</b>	<b>663.879.333,45</b>
1.b	Piutang Jamkesmas/ JKN - Piutang JKN	27.169.836.183,00	0,00	27.169.836.183,00
1.c	Piutang Jamkes Lainnya - Piutang Jasa Raharja 2017	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.808.712.850,50</b>	<b>974.997.334,05</b>	<b>27.833.715.516,45</b>
2	Piutang Puskesmas BLUD-BPJS			
	a. BPJS	102.450.768,00	0,00	102.450.768,00
	b. Jamkesda	46.246.000,00	0,00	46.246.000,00
	c. Jampersal	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>152.896.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.896.768,00</b>
	<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>	<b>28.961.609.618,50</b>	<b>974.997.334,05</b>	<b>27.986.612.284,45</b>
	<b>Jumlah per 31 Desember 2019</b>	<b>83.298.630.988,98</b>	<b>(21.283.715.218,95)</b>	<b>54.271.633.433,03</b>

Selanjutnya *Aging schedule* Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.24.**

**k) Beban Dibayar di Muka**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp248.030.000,00**

**Rp4.844.352.786,00**

Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2019 sebesar Rp248.030.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.63. Beban Dibayar Dimuka

NO	SKPD	Uraian	Periode	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1.	DPU &ESDM	Pembayaran sewa tanah periode 2018 sd 2020	5 Tahun	144.042.600,00	0,00	52.132.600,00	91.910.000,00
2.	Disdagk opukm	Sewa Tanah		0,00	138.620.000,00	0,00	138.620.000,00
3	Kec. Borobudur	Sewa Gedung Kecamatan	1 tahun	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
4	PPKD	Pembayaran kompensasi pemotongan Pajak		4.700.310.186,00	0,00	4.700.310.186,00	0,00





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO	SKPD	Uraian	Periode	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
		Rokok disalurkan ke BPJS					
	Jumlah			4.844.352.786,00	156.120.000,00	4.752.442.786,00	248.030.000,00

1) **Persediaan**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp21.411.185.873,18**

**Rp21.159.921.152,85**

Merupakan asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang dimaksudkan untuk digunakan/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Dalam sistem pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan metode perpetual dan periodik. Nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64. Persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019(Audited) (Rp)	31 Desember 2018(Audited) (Rp)
1	ATK	952.415.371,00	300.888.472,00
2	Cetakan	1.891.491.148,00	1.994.705.849,00
3	Alat Kebersihan	256.261.141,00	45.389.175,00
4	BBM	578.000,00	0,00
5	Benda Pos	17.601.750,00	1.829.000,00
6	Alat Listrik	154.944.754,00	40.772.590,00
7	Obat-Obatan	10.501.678.691,18	9.357.511.973,85
8	Alat dan Bahan Lab	1.333.903.728,00	582.270.920,00
9	Isi tabung pemadam	29.895.000,00	0,00
10	Kuasi	0,00	161.390.250,00
11	Bahan makanan pokok	0,00	271.920.010,00
12	Alat Kesehatan/Alat Kedokteran	0,00	0,00
16	Vaksin	281.339.782,00	490.780.772,00
17	Bahan Material Lainnya	0,00	748.369.571,00
18	Bahan Baku Bangunan	0,00	2.429.800,00
19	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	694.551.700,00
20	Bahan Kimia	0,00	5.815.492,00
21	Bahan Bibit Temak/ikan	3.000.000,00	2.825.000,00
22	Barang yang akan diserahkan kepada	2.508.943.603,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019(Audited) (Rp)	31 Desember 2018(Audited) (Rp)
	pihak ketiga		
23	Persediaan RSUD Muntian	0,00	3.827.929.393,00
24	Persediaan BLUD Puskesmas	0,00	2.208.378.036,00
25	Persediaan BOS	0,00	422.163.149,00
26	Radiologi	82.856.230,00	0,00
27	Alat Kedokteran	320.408.503,00	0,00
28	Plat Uji/Plaket	85.925.000,00	0,00
29	Bahan makan pasien	1.283.955.473,00	0,00
30	Logistik	905.692.580,00	0,00
31	Sisa Karcis	2.027.400,00	0,00
32	Bahan Praktek	1.346.600,00	0,00
33	Sisa Karcis adanya Perda Baru	73.674.594,00	0,00
35	ATK Penyedia/pengendali keuangan	442.900,00	0,00
34	Barang lainnya	722.803.625,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.411.185.873,18</b>	<b>21.159.921.152,85</b>

Adapun rincian persediaan per SKPD dijelaskan dalam **Lampiran 5.25**.

## 2) INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp277.196.942.571,74**

**Rp254.588.708.906,93**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

### a) Investasi Non Permanen

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Saldo Investasi non permanen tahun 2019 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai investasi non permanen sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Nilai tagihan investasi permanen beserta penyisihannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.65. Tagihan Investasi Permanen

SKPD	Saldo per 31 Des 2019(Audited) (Rp)	Saldo per 31 Des 2018 (Audited) (Rp)
Distanpangan	0,00	0,00
Dispeterikan	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

SKPD	Saldo per 31 Des 2019 (Audited) (Rp)	Saldo per 31 Des 2018 (Audited) (Rp)
Disdagkop UMKM	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Sedangkan tabel mutasi dari investasi permanen serta keterangan lebih rinci perihal penyisihan masing –masing investasi non permanen dapat dilihat pada **Lampiran 5.26.**

**b) Investasi Permanen**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp277.196.942.571,74</b>	<b>Rp254.588.708.906,93</b>

Termasuk dalam Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. Berikut rincian saldo investasi permanen sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Tabel 5.66. Investasi Permanen

No	Nama BUMD	Saldo per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Saldo per 31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
1	Penyertaan Modal ke BUMD	277.196.942.571,74	254.588.708.906,93
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>277.196.942.571,74</b>	<b>254.588.708.906,93</b>

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang dijelaskan bahwa:

- (1) Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%;
- (2) Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%

Penilaian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan metode ekuitas diberlakukan mulai tahun 2011.

**(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp277.196.942.571,74 dan Rp 254.588.708.906,93 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.67. Investasi Permanen BUMD

Nama BUMD	Saldo 2018 (Audited)	Prosentase kepemilikan per 31 des 2019	Penyertaan modal 2019	Saldo 31 Des 2019 (Audited)
1	2	3	4	5
Bapas 69	140.724.919.309,00	100%	0,00	151.087.498.630,00
PDAU	3.338.715.617,00	100%	0,00	3.343.544.231,00
PDAM	63.057.121.902,00	100%	4.500.000.000,00	69.444.071.291,00
Bank Jateng	27.888.000.000,00	0,92%	5.704.000.000,00	33.592.000.000,00
BKK Muntian	13.913.116.474,43	50,52%	0,00	14.549.828.419,74
BKK Jateng	5.386.835.604,50	1,37%	0,00	4.900.000.000,00
PRPP	280.000.000,00		0,00	280.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>254.588.708.906,93</b>		<b>10.204.000.000,00</b>	<b>277.196.942.571,74</b>

(2) Investasi Permanen Lainnya

Nilai Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam modal pemerintah, perusahaan Negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Misalnya property investasi yang tidak tercakup dalam standar akuntansi pemerintah. Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0,00.

3) ASET TETAP

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp2.666.869.597.674,68**

**Rp2.497.259.818.060,64**

Aset tetap tahun 2018 sebesar Rp2.497.259.818.060,64 dan tahun 2019 sebesar Rp2.666.869.597.674,68. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

5.68. Tabel Daftar Aset Tetap Per Kelompok Barang

No	Uraian Jenis Barang	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
A.	Tanah	622.190.382.414,00	14.158.567.806,00	225.948.856,00	636.123.001.364,00
B.	Peralatan Dan Mesin	560.091.205.789,00	245.153.068.601,00	127.023.583.097,00	678.220.691.293,00
C.	Gedung Dan Bangunan	1.207.117.002.145,00	253.930.312.536,00	6.438.080.933,00	1.454.609.233.748,00
D.	Jalan Irigasi & Jaringan	1.398.989.695.546,00	138.275.863.954,00	45.433.538.168,00	1.491.832.021.332,00
E.	Aset Tetap Lainnya	111.796.527.119,00	16.416.240.629,00	302.106.203,00	127.910.661.545,00
F.	Konstruksi Dlm Peng.	265.407.037.651,00	29.082.143.737,00	147.248.989.402,00	147.240.191.986,00
G.	Akumulasi Penyusutan	1.668.332.032.603,36	336.291.846.221,94	135.557.675.231,98	1.869.066.203.593,32
	<b>Total Nilai</b>	<b>2.497.259.818.060,64</b>	<b>360.724.351.041,06</b>	<b>191.114.571.427,02</b>	<b>2.666.869.597.674,68</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 108 tahun 2016 Pada akhir tahun 2019 dilakukan migrasi data asset ke dalam kode dan penggolongan sesuai permendagri tersebut diatas. Terkait dengan hal tersebut maka ada koreksi nilai akumulasi penyusutan di beberapa objek yaitu di jenis barang Peralatan Mesin senilai Rp1.111.075,00 pada gedung bangunan senilai Rp3.003.630,64 dan JIJ senilai Rp2.014.787.983.20.

a) Tanah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp 636.123.001.364,00</b>	<b>Rp622.190.382.414.00</b>

Tanah senilai Rp622.190.382.414.00 dan Rp636.123.001.364,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2018 dan 2019.

Penambahan tanah sebesar Rp13.932.618.950,00 selama tahun 2019 berasal dari:

- Belanja Modal tanah sebesar Rp2.068.666.900,00 pada Dinas kesehatan
- Belanja Modal tanah sebesar Rp981.354.580,00 pada Dinas Pekerjaan Umum
- Belanja Modal tanah pada BPBD senilai Rp271.858.500,00
- Belanja Modal pada Disparpora senilai Rp7.174.534.750,00
- Belanja Modal tanah pada BPPKAD Rp3.436.204.220,00

Saldo Aset Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.27**.

b) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp678.220.691.293,00</b>	<b>Rp560.091.205.789,00</b>

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing senilai Rp560.091.205.789,00 dan Rp678.220.691.293,00 dan terdiri dari:

Tabel 5.69 Daftar Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018

No	Objek	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
1	Alat Besar	30.172.696.824,00	28.590.264.789,00
2	Alat Angkutan	112.696.147.468,00	104.938.455.780,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	7.604.334.844,00	6.567.180.158,00
4	Alat Pertanian	3.433.685.373,00	2.714.788.373,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	199.039.283.194,00	267.099.098.947,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Objek	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
6	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	26.885.215.236,00	21.020.803.824,00
7	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	143.446.379.272,00	96.696.400.951,00
8	Alat Laboratorium	36.951.509.463,00	31.619.575.124,00
9	Alat Persenjataan	917.397.118,00	844.637.843,00
10	Alat Komputer	117.074.042.501,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>678.220.691.293,00</b>	<b>560.091.205.789,00</b>

Kenaikan nilai pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.129.485.504,00 selama tahun 2019 karena ada penambahan dan pengurangan yang berasal dari:

- Penambahan atas Belanja APBD untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp124.129.695.013,00 berasal pada 46 SKPD.
- Penambahan atas dari kementerian berupa Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp47.799.100,00 pada Dinas Perpustakaan dan arsip.
- Penambahan karena reklas masuk Peralatan dan Mesin dari KDP pada DPUPR sebesar Rp1.390.014.952,00.
- Hibah senilai Rp2.050.026.438,00 Pada jajaran Dinas Pendidikan dari pemerintah pusat maupun dari komite.
- Pengurangan sebesar Rp832.815.420,00 terdiri atas pengurangan nilai pada DPU sebesar Rp12.112.315,00 atas kendaraan yang hilang (telah selesai diproses TGR), koreksi kurang atas temuan BPK tahun 2019 pada RSU sebesar Rp4.485.250,00 koreksi kurang pada Dispermades atas persediaan dan kendaraan hilang (telah diproses TGR) senilai Rp593.009.400,00 serta usul penghapusan disdik senilai Rp223.208.455,00
- Reklas ke Aset lain lain atas barang hilang senilai Rp8.655.234.579,00

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.28**.

**c) Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp1.454.609.233.748,00</b>	<b>Rp1.207.117.002.145,00</b>

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing senilai Rp1.207.117.002.145,00 dan Rp1.454.609.233.748,00 terdiri dari:

Tabel 5.70. Daftar Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018

No	Jenis	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
1	Bangunan gedung	1.442.828.383.635,00	1.196.731.274.975,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2	Monumen	10.214.651.459,00	10.385.727.170,00
3	Bangunan menara	120.624.530,00	0,00
4	Tugu titik kontrol/pasti	1.445.574.124,00	0,00
	Jumlah	1.454.609.233.748,00	1.207.117.002.145,00

Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp247.492.231.603,00 selama tahun 2019 atas penambahan dan pengurangan yang berasal dari:

- a. Penambahan dari belanja APBD Bangunan Gedung sebesar Rp105.413.431.013,00 pada 22 SPKD.
- b. Penambahan pada DPU berasal dari Reklas dari kdp atas bangunan yang sudah jadi senilai Rp137.569.344.852,00
- c. Penambahan Hibah pad BPBD dari BNPB senilai Rp736.433.500,00
- d. Pencatatan atas bangunan hibah tahun 2009 yang belum tercatat pada dinas pertanian senilai Rp320.377.669,00
- e. Penambahan atas bangunan Pasar tempuran sebesar Rp4.787.484.000, berasal dari reklas DED di disdagkop serta hibah bagunan pasar dari pusat
- f. Koreksi masuk senilai Rp1.050.197.328,00 dan Rp732.314.922,00 atas biaya rehab bangunan di sekretariat daerah dan sekretariat dewan yang dilakukan oleh DPU
- g. Hibah pada jajaran Dinas Pendidikan dari komite senilai Rp426.155.500,00
- h. Reklas masuk dari KDP pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.738.375.098,00
- i. Reklas keluar pada DPU atas rehab pada skpd lain senilai Rp1.782.512.250,00
- j. Reklas keluar pada Kec. Borobudur senilai Rp137.569.344.852,00 dan BPPKAD senilai Rp1.605.911.745,00 atas usulan penghapusan
- k. Pengurangan pada jajaran dinas pendidikan senilai Rp951.518.869 atas usulan penghapusan
- l. Pengurangan pada dinas kesehatan atas usulan penghapusan senilai Rp172.500.000,00
- m. Reklas ke Aset lain lain atas barang hilang senilai Rp388.889.999,00 terdiri atas 2 SKPD yaitu BPPKAD senilai Rp355.420.000,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp33.469.000,00

Saldo rincian Aset Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.29.**



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**d) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp1.491.832.021.332,00</b>	<b>Rp1.398.989.695.546,00</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing senilai Rp1.398.989.695.546,00 dan Rp1.491.832.021.332,00 terdiri dari:

Tabel 5.71. Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	1.058.364.772.674,00	992.089.107.799,00
2	Bangunan Air Irigasi	392.102.296.785,00	367.280.809.573,00
3	Instalasi	13.708.191.609,00	12.702.701.760,00
4	Jaringan	27.656.760.264,00	26.917.076.414,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.491.832.021.332,00</b>	<b>1.398.989.695.546,00</b>

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp92.842.325.786,00 selama tahun 2019 berasal dari:

- a. Belanja APBD sebesar Rp86.571.559.418,00 pada 12 SKPD
- b. Reklas dari KDP senilai Rp6.276.768.368,00 pada DPU
- c. Reklas ke asset lain lain atas barang hilang pada Diskominfo senilai Rp6.002.000,00

Saldo Aset Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.30**.

**e) Aset Tetap Lainnya**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp127.910.661.545,00</b>	<b>Rp111.796.527.119,00</b>

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp127.909.251.545,00 dan Rp127.910.661.545,00 terdiri dari:

Tabel 5.72. Daftar Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018

No	Jenis	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
1	Bahan perpustakaan	109.336.749.664,00	94.720.888.915,00
2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga	16.911.512.990,00	15.626.683.813,00
3.	Hewan	0,00	1.448.954.391,00
4	Biota perairan	0,00	0,00
5	Tanaman	1.662.398.891,00	0,00
6	Barang koleksi non budaya	0,00	0,00
7	Aset tetap dalam renovasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>127.910.661.545,00</b>	<b>111.796.527.119,00</b>





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.114.134.426,00 selama tahun 2019 berasal dari:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.878.753.794,00 pada 7 SKPD termasuk BOS pada jajaran Dinas Pendidikan .
- Reklas dari KDP senilai Rp224.948.132,00 pada SKPD DPU.
- Hibah senilai Rp11.022.500,00 Pada jajaran Dinas Pendidikan
- Reklas ke Aset lain lain atas barang hilang pada Dinas Peternakan dan Perikanan senilai Rp590.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.31**.

**f) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp147.240.191.986,00</b>	<b>Rp265.407.037.651,00</b>

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp147.240.191.986,00 dan Rp265.407.037.651,00 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2019 dan 2018. Penambahan dan pengurangan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan masing masing SKPD tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.73. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Audited) (Rp)
1	DPUPR	262.121.016.314,00	28.876.428.551,00	145.461.076.304,00	145.536.368.561,00
2	DISPERINAKER	17.036.000,00	0,00	0,00	17.036.000,00
3	DISHUB	0,00	99.672.000,00	0,00	99.672.000,00
4	DISDAGKOP	255.020.000,00	0,00	49.538.000,00	205.482.000,00
5	DISPARPORA	1.275.590.239,00	0,00	0,00	1.275.590.239,00
6	DINKES	1.738.375.098,00	0,00	1.738.375.098,00	0,00
7	DLH	0,00	106.043.186,00	0,00	106.043.186,00
	<b>TOTAL</b>	<b>265.407.037.651,00</b>	<b>29.082.143.737,00</b>	<b>147.248.989.402,00</b>	<b>147.240.191.986,00</b>

Nilai pada Konstruksi Dalam Pengerjaan secara global mengalami penurunan sebesar Rp118.166.845.665,00. Nilai tersebut adalah akumulasi dari pengurangan senilai Rp147.248.989.402,00 Atas KDP yang ter reklas ke aset tetap serta penambahan karena ada KDP baru senilai Rp29.082.143.737,00 pada DPUPR, DISHUB dan DLH.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.32**.



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**g) Akumulasi Penyusutan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp1.869.066.203.593,32</b>	<b>Rp1.668.332.032.603,36</b>

Akumulasi penyusutan di Kabupaten Magelang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.869.066.203.593,32 dan Rp1.668.332.032.603,36 terdiri dari:

Tabel 5.74. Daftar Akumulasi Penyusutan Per Kelompok Barang

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL	AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR
1	2	3	4
1	PERALATAN DAN MESIN	408.015.709.078,54	478.811.381.673,83
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	351.643.767.750,25	385.424.816.699,20
3	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	908.672.555.774,57	1.004.830.005.220,29
<b>4</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>1.668.332.032.603,36</b>	<b>1.869.066.203.593,32</b>

Kenaikan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp200.734.170.989,96 berasal dari Beban Penyusutan tahun 2019 senilai Rp212.430.285.277,15 penambahan penyusutan dari barang barang yang reklas senilai Rp40.699.218.855,55 pengurangan dari barang yang reklas ke asset lain lain senilai Rp50.381.090.453,90 serta ada koreksi penyusutan atas penyesuaian tahun barang senilai Rp4.660.000,00 dan dari pergeseran kelompok barang senilai Rp2.018.902.688,84

Saldo Saldo Akumulasi Penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.33**.

**4) DANA CADANGAN**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp46.163.698.395,00</b>

Dana Cadangan merupakan dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Tahun 2019 saldo dana cadangan Rp0,00

Tabel 5.75. Daftar Dana Cadangan

No	Uraian	Dasar Hukum	Keterangan	31 Desember 2019(Audited) (Rp)	31 Desember 2018(Audited) (Rp)
1	Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan	Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pasar Muntilan	Pokok	0,00	0,00
			Bunga	0,00	23.072.289.372,00
			Jumlah	0,00	23.072.289.372,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Dasar Hukum	Keterangan	31 Desember 2019(Audited) (Rp)	31 Desember 2018(Audited) (Rp)
2	Dana CadanganPembangunan RSUD Tipe B	Perda No.12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan RSUD Tipe B	Pokok	0,00	0,00
			Bunga	0,00	23.090.048.650,00
			Jumlah	0,00	23.090.048.650,00
3	Dana Cadangan Pilbub Pilwabub Tahun 2018	Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilbup	Pokok	0,00	0,00
			Bunga	0,00	1.360.373,00
			Jumlah	0,00	1.360.373,00
4	Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip	Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip	Pokok	0,00	0,00
			Bunga	0,00	0,00
			Jumlah	0,00	0,00
Jumlah			Pokok	0,00	0,00
			Bunga	0,00	46.163.698.395,00
			Jumlah	0,00	46.163.698.395,00

**5) ASET LAINNYA**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp31.738.727.701,39</b>	<b>Rp28.813.204.920,62</b>

Tabel 5.76 Aset Lainnya

No	Jenis	Saldo per 31 Des 2019 (Audited) (Rp)	Saldo per 31 Des 2018 (Audited) (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00
2	Aset Tak Berwujud	14.204.015.977,00	10.634.928.970,00
3	Aset Lain-lain	26.222.777.179,39	24.591.182.450,62
4	Akumulasi Amortisasi	(10.652.705.455,00)	(8.377.546.500,00)
<b>ASET LAINYA</b>		<b>31.738.727.701,39</b>	<b>28.813.204.920,62</b>

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan), serta Aset Lain-lain yang antara lain berupa pekerjaan perencanaan/Master Plan, persediaan obat kadaluwarsa, konsinyasi uang ganti rugi, dan Aset Tak Berwujud beserta amortisasinya dengan penjelasan sebagai berikut:

**a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp1.964.640.000,00</b>	<b>Rp1.964.640.000,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Metode kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau *Build Operating Transfer (BOT)*. Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai aset milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diserahkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.77. Kemitraandengan Pihak Ketiga (BOT)

Jenis	Luas	Dokumen	Nilai 31 Desember 2019 (Rp)
SPBU Terpadu dan Sarana pendukungnya (Eks Kawedanan Salam)	7.550 m <sup>2</sup>	Akta Notaris Retno Rochmani. SH No. 04 tgl. 11 Februari 2002	1.017.600.000,00
Metro Square. Mertoyudan	2.120 m <sup>2</sup>	Perjanjian Kerjasama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	271.360.000,00
Metro Square. Sumberrejo	6.560 m <sup>2</sup>	Perjanjian Kerjasama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	675.680.000,00
Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening	28.570 m <sup>2</sup>	Kontrak Perjanjian No.415.4/44/31/2012. No.235/TIWUMGL/MO/ IX/2012	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.964.640.000,00</b>

**b) Aset Tak Berwujud**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp 14.204.015.977,00</b>	<b>Rp10.634.928.970,00</b>

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 tersebut merupakan nilai perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud. Rincian nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.78 Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	<i>Goodwill</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Software</i>	5.984.151.865,00	2.188.928.407,00	0,00	8.173.080.272,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

3	Kajian	4.650.777.105,00	1.380.158.600,00	0,00	6.030.935.705,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.634.928.970,00</b>	<b>3.569.087.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.204.015.977,00</b>

Perubahan Nilai Aset Tak Berwujud Senilai Rp3.569.087.007,00 berasal dari pembelian/pengembangan aset software senilai Rp2.188.928.407,00 dan Penambahan Aset Tak Berwujud Kajian dari pembelian senilai Rp1.380.158.600,00. Rincian Aset tak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.79. Penambahan Aset Tak Berwujud

No	SKPD	Penambahan 2019	
		Pembelian	
		Software	Kajian
1	BPPKAD	97.900.000,00	0,00
2	BAPPEDA LIT BANGDA	49.747.500,00	979.725.000,00
3	DINKES	1.451.480.000,00	0,00
4	DISDAGKOP UMKM	52.722.000,00	0,00
5	DISHUB	45.648.627,00	0,00
6	RSUD MUNTILAN	201.610.000,00	0,00
7	SEKRETARIAT DAERAH	43.925.000,00	0,00
8	DLH	40.210.000,00	0,00
9	DPU PR	205.685.280,00	400.433.600,00
<b>Total</b>		<b>2.188.928.407,00</b>	<b>1.380.158.600,00</b>

Pada tahun 2019 terdapat 8 Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi yang sudah tidak dipergunakan pada 7 SKPD dan masih tercatat pada Neraca senilai Rp404.406.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.80. Rincian Aplikasi yang Sudah Tidak Dipergunakan

No.	SKPD	Nama	Tahun Pengadaan	Nilai Perolehan (Rp)
1	DPU dan PR	SIM DPU ESDM	2010	2.008.750,00
2	BPPKAD	SIM Keuangan Daerah	2006	40.000.000,00
3	BPPKAD	sim Aplikasi Pengelolaan Kendaraan Dinas	2015	42.655.000,00
4	Inspektorat	Sistem Informasi Pengawasan	2011	24.100.000,00
5	Disdagkop UKM	SIM Pasar	2013	200.908.000,00
6	DLH	SIM Lingkungan Hidup	2001	28.435.000,00
7	BPBD	Website BPBD	2014	17.899.250,00
8	DISDUKCAPIL	SIM Pencatatan Sipil	2011	48.400.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>404.406.000,00</b>

c) Aset Lain-lain



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp. 26.222.777.179,39**

**Rp. 24.591.182.450,62**

Tabel 5.81. Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Nilai Perolehan Aset Lain-lain	39.098.176.023,73	12.384.405.063,00	1.411.566.051,00	50.071.015.035,73
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	14.506.993.573,11	10.458.693.709,95	1.117.449.426,72	23.848.237.856,34
	Nilai Buku Aset Lain-lain (1-2)	24.591.182.450,62	1.925.711.353,05	294.116.624,28	26.222.777.179,39

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari aset yang rusak berat dan barang hilang sesuai rekomendasi BPK.

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 merupakan nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp50.071.015.035,73 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain yang sebelumnya merupakan aset tetap sebesar Rp23.848.237.856,34 berada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, DPMPTSP, Distanpangan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dispeterikan, Disperinnaker, Disparpora, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinkes, Satpol PP, Set DPRD, DPU & PR, DLH, DPRKP, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Windusari, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Mungkid, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Diskominfo.

Di akun aset lain-lain ini terdapat pula barang persediaan (obat) rusak/kadaluarsa pada dinas kesehatan senilai Rp583.013.113,73 Rincian pada **Lampiran 5.34.**

Perubahan nilai Aset lain lain dengan nilai buku Rp1.631.594.728,77 diantaranya disebabkan oleh:

1. Penambahan sebesar nilai buku Rp1.925.711.353,05 yang berasal dari :  
Gedung Rusak Berat Dengan Nilai Buku Rp1.194.612.602,33 Gedung Hilang Rekomendasi BPK Dengan Nilai Buku Rp229.806.260,00 Peralatan Mesin Rusak Berat Dengan Nilai Buku Rp2.229.389,75 Peralatan Mesin Hilang Rekomendasi BPK Dengan Nilai Buku Rp497.186.958,11 Jalan Irigasi Jaringan Hilang Rekomendasi BPK Dengan Nilai Buku Rp1.286.142,86 Aset Tetap Lainnya



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rekomendasi BPK Dengan Nilai Buku Rp590.000,00 dengan nilai total Rp1.925.711.353,05

Adapun Perincian Penambahan Barang pada **Lampiran 5.35 sampai dengan Lampiran 5.38.**

2. Pengurangan Rp294.116.624,28 yang berasal dari :

(1) Penghapusan aset gedung dengan nilai buku sebesar Rp294.116.624,28 berasal dari SKPD Kecamatan Borobudur, Dinas Kesehatan dan BPPKAD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor SK Bupati NO 180/182/443/KEP/23/2019 Tgl 31 Desember 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Kecamatan Borobudur, Dinas Kesehatan (Puskesmas Borobudur) dan BPPKAD (Gedung RSUD Muntilan) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.82. Penghapusan Aset

No	Nama	Alamat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Dasar	SKPD
1	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM (Gizi (RSUD Muntilan))	Jln. Kartini No.13, Kec. Muntilan	83.207.051,00	18.305.551,22	64.901.499,78	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	BPPKAD
2	BANGUNAN GEDUNG.LAIN-LAIN (laundry (RSUD Muntilan))	Jln. Kartini No.13, Kec. Muntilan	775.308.585,00	775.308.585,00	-	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	BPPKAD
3	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TYPE B PERMANEN (RD Dokter/KIA)	Jl. Sentanu, Borobudur	57.500.000,00	19.550.000,00	37.950.000,00	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	DINKES
4	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TYPE B PERMANEN (RD Paramedis)	Jl. Sentanu, Borobudur	57.500.000,00	19.550.000,00	37.950.000,00	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	DINKES
5	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TYPE B PERMANEN (RD Paramedis)	Jl. Sentanu, Borobudur	57.500.000,00	19.550.000,00	37.950.000,00	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	DINKES
6	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Gedung Kantor	170.550.415,00	119.385.290,50	51.165.124,50	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	KECAMATAN BOROBUDUR



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama	Alamat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Dasar	SKPD
7	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Gedung Dinas Nevo	60.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	KECAMATAN BOROBUDU
8	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Gedung Aula BPLLKMD	60.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	KECAMATAN BOROBUDU
9	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TYPE E PERMANEN	Gedung Rumah Dinas	75.000.000,00	52.500.000,00	22.500.000,00	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	KECAMATAN BOROBUDU
10	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	Gedung PKK/RAP AT	15.000.000,00	9.300.000,00	5.700.000,00	SK BUPATI NO 180/182/443/KEP/23/2019 TGL 31 DES 2019	KECAMATAN BOROBUDU
	TOTAL		1.411.566.051,00	1.117.449.426,72	294.116.624,28		

d) Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>(Rp10.652.705.455,00)</b>	<b>(Rp8.377.546.500,00)</b>

Akumulasi Amortisasi merupakan penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud. Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar **(Rp10.652.705.455,00)** Kenaikan nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp1.735.219.465,00 dikarenakan terdapat penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2019.

Bahwa pada tahun 2019 diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Oknum ASN berupa penjualan Barang Milik Daerah sehingga atas barang milik daerah yang disajikan sebagian tidak ada secara fisik.

Sesuai dengan laporan SKPD atas barang milik daerah yang telah diambil oleh pihak ketiga senilai Rp27.497.476.808,00 terdiri atas barang rusak berat yang masih tercatat di aset tetap senilai Rp4.854.445.261,00 pada SKPD DPUPR, DISPERINNAKER, DISPETERIKAN, SETDA (Bagian Organisasi), Kecamatan Ngablak, dan Dinas Kesehatan. Barang yang tercatat pada aset lain-lain senilai Rp22.322.251.887,00 serta daftar barang rusak berat yang sudah tidak tercatat pada neraca senilai Rp320.779.660,00

Adapun atas pelaksanaan Apel Kendaraan seluruh SKPD, barang yang tidak ditemukan fisiknya yang diduga ikut di jual oleh oknum ASN tersebut sejumlah 121 barang terdiri atas 81 kendaraan senilai Rp2.447.266.742,00 tercatat pada aset tetap; sejumlah 20 kendaraan senilai Rp249.700.000,00 tercatat pada aset lain lain, serta ada sejumlah 20 kendaraan tercatat sebagai barang rusak berat dalam daftar gudang yang sudah tidak masuk dalam neraca.





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Bahwa pada tahun 2019 diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Oknum ASN berupa penjualan Barang Milik Daerah sehingga atas barang milik daerah yang disajikan sebagian tidak ada secara fisik.

Sesuai dengan laporan SKPD atas barang milik daerah yang telah diambil oleh pihak ketiga senilai Rp27.359.989.700,00 terdiri atas barang rusak berat yang semula ada di aset tetap yang telah di reklas ke asset lain lain senilai Rp9.133.585.581,00 (nilai buku Rp412.799.925,10), serta barang yang sudah di asset lain lain senilai Rp18.226.404.119,00 yaitu barang hasil inventarisasi rusak berat yang akan dihapuskan.

Bahwa kasus ini sedang dalam penanganan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sehingga untuk tindak lanjut penghapusan barang yang tidak ditemukan tersebut menunggu keputusan tetap dari pihak yang berwenang.

**6) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp13.672.463.777,19</b>	<b>Rp19.717.148.141,04</b>

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis Kewajiban Jangka Pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Tabel 5.83 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Utang PFK	83.677.869,00	27.729.246,00	83.677.869,00	27.729.246,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.102.986.887,04	758.867.947,53	1.339.293.306,13	1.522.561.528,44
3	Utang Beban	3.717.040.828,00	3.748.230.281,00	3.717.040.828,00	3.748.230.281,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.813.442.557,00	8.482.012.721,75	13.921.512.557,00	8.373.942.721,75
<b>Jumlah</b>		<b>19.717.148.141,04</b>	<b>13.016.840.196,28</b>	<b>19.061.524.560,13</b>	<b>13.672.463.777,19</b>

**a) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp27.729.246,00</b>	<b>Rp83.677.869,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga berupa pajak yang belum disetor serta utang PFK dan JKN sebesar Rp27.729.246,00 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.84. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga

No	SKPD	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp) Nilai
1	Disdikbud	9.939.819,00	77.250.700,00
2	Dinkes	17.789.427,00	688.000,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	1.234.264,00
4	Kecamatan Salam	0,00	951.973,00
5	Kecamatan Srumbung	0,00	74,00
6	Kecamatan Mungkid	0,00	2.146.258,00
7	Kecamatan Bandungn	0,00	1.406.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.729.246,00</b>	<b>83.677.869,00</b>

Saldo Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2019 sebesar Rp27.729.246,00.

Saldo hutang PFK Disdikbud Tahun 2019 sebesar Rp9.939.819,00 merupakan utang PFK ke Bendahara BOS.

Saldo hutang PFK Dinkes Tahun 2019 sebesar Rp17.789.427,00 terdiri dari hutang titipan bidan BLUD Puskesmas sebesar Rp16.252.000,00 dan hutang pajak BLUD Puskesmas Rp1.537.427,00.

**b) Pendapatan Diterima Dimuka**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp1.522.561.528,44**

**Rp2.102.986.887,04**

Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Diterima Dimuka dari (8) delapan SKPD yaitu:

Tabel 5.85. Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	Periode	Pendapatan diterima dimuka Tahun 2018 (Audited)	Penambahan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019	Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 (Audited)
<b>1</b>	<b>RSU Muntilan - Pendapatan BLUD</b>		<b>130.900.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.821.268,00</b>	<b>88.078.976,00</b>
	a. Titipan Pasien		0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Sewa Tanah dan Bangunan		130.900.244,00	0,00	42.821.268,00	88.078.976,00
<b>2</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>118.456.654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29.111.116,53</b>	<b>89.345.538,00</b>
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.740.410,96	0,00	1.740.410,96	0,00
	b. Retribusi Terminal (Tempat Kegiatan Usaha)		8.119.611,57	0,00	5.434.993,57	2.684.618,00
	c. Retribusi Izin Trayek (Orang Pribadi)		96.707.591,00	0,00	10.046.671,00	86.660.920,00
	d. Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan (Ijin penempatan pertama toko)		11.889.041,00	0,00	11.889.041,00	0,00
<b>3</b>	<b>BPPKAD</b>		<b>300.124.472,43</b>	<b>150.082.429,53</b>	<b>12.506.251,54</b>	<b>437.700.650,42</b>
	a. Pajak Reklame		212.460.616,83	150.082.429,53	0,00	362.543.046,36
	b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		87.663.855,60	0,00	12.506.251,54	75.157.604,06
<b>4</b>	<b>DISPARPORA</b>		<b>23.833.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>10.833.333,33</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	SKPD	Periode	Pendapatan diterima dimuka Tahun 2018 (Audited)	Penambahan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019	Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 (Audited)
	Lain-lain PAD	2/11/2015 s.d 2/11/2020	23.833.333,33	0,00	13.000.000,00	10.833.333,33
<b>5</b>	<b>DISDAGKOP UMKM</b>		<b>1.368.146.746,53</b>	<b>608.785.518,00</b>	<b>1.171.117.129,16</b>	<b>805.815.135,37</b>
	Retribusi Pelayanan Pasar		1.368.146.746,53	608.785.518,00	1.171.117.129,16	805.815.135,37
<b>6</b>	<b>DISPERINAHER</b>		<b>52.824.476,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.824.476,19</b>	<b>21.000.000,00</b>
	a. Penyewaan Tanah dan Bangunan	01-01-2018 s.d 31/12/2022	28.000.000,00	0,00	7.000.000,00	<b>21.000.000,00</b>
	b. Perpanjangan IMTA		24.824.476,19	0,00	24.824.476,19	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>DISTANPANGAN</b>		<b>91.041.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>57.541.667,00</b>
	Penyewaan Tanah dan Bangunan	2017 s.d 2022	91.041.667,00	0,00	33.500.000,00	57.541.667,00
<b>8</b>	<b>DISPETERIKAN</b>		<b>17.659.293,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413.064,71</b>	<b>12.246.228,32</b>
	a. Fasilitas Pasar atau Pertokoan		17.659.293,03	0,00	5.413.064,71	12.246.228,32
	<b>Jumlah</b>		<b>2.102.986.887,04</b>	<b>758.867.947,53</b>	<b>1.339.293.306,13</b>	<b>1.522.561.528,44</b>

**c) Utang Beban**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp3.748.230.281,00**

**Rp3.717.040.828,00**

Merupakan jumlah Utang Beban yang sampai tanggal 31 Desember 2019 belum terbayar. Rincian Utang Beban per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.86. Utang Beban

Uraian Utang Beban	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
Beban Telepon	27.460.000,00	66.340.369,00
Beban Air	57.609.636,00	64.239.279,00
Beban Listrik	238.992.788,00	1.731.244.587,00
Beban Surat Kabar	3.422.500,00	1.935.000,00
Beban Internet	37.569.426,00	130.595.385,00
Beban Jasa Adm Pungutan PPJU	1.452.105.446,00	0,00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	27.200,00	69.500,00
Beban Transfer	1.102.158.762,00	1.350.241.866,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	492.049.306,00	318.460.435,00
Beban Barang dan Jasa BOS	326.387.698,00	13.835.845,00
Beban STNK	0,00	959.850,00
Beban Pegawai	10.447.519,00	39.118.712,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.748.230.281,00</b>	<b>3.717.040.828,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**d) Utang Jangka Pendek Lainnya**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp8.373.942.721,75**

**Rp13.813.442.557,00**

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.87. Hutang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	31 Desember 2018 (Audited) (Rp)
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700.000,00</b>
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	76.700.000,00
	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>536.059.815,00</b>	<b>3.412.678.917,00</b>
1	Utang Jamkesda ke RSUD Tidar Magelang	0,00	1.696.805.957,00
2	Utang Jamkesda ke RSJ Magelang	0,00	5.270.361,00
3	Utang Jamkesda ke RS Sarjito	0,00	293.609.912,00
4	Utang Jamkesda ke RS Kariyadi	0,00	1.919.700,00
5	Utang Jamkesda Dinkes ke RSUD Muntilan	536.059.815,00	1.415.072.987,00
6	Utang Jasa Pelayanan Puskesmas Muntilan 1	0,00	0,00
	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>7.836.010.078,75</b>	<b>6.447.167.097,00</b>
1	Utang jasa pelayanan kepada pegawai RSUD Muntilan	7.836.010.078,75	6.447.167.097,00
	<b>PPKD</b>	<b>1.872.828,00</b>	<b>3.876.896.543,00</b>
1	Utang RSUD Muntilan Ke GAKIN	1.872.828,00	1.872.828,00
2	Utang kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	5.290.096.702,00
3	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	(1.415.072.987,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>8.737.942.721,75</b>	<b>13.813.442.557,00</b>

**7) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.



## 8) EKUITAS

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Rp3.256.956.976.794,83</b>	<b>Rp3.122.043.629.677,49</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

### 5.d. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

- 1) Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional ;
- 5) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan
- 6) Surplus/defisit-LO

Berikut Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2019:

Tabel 5.88. Penjelasan Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	395.283.754.991,41	350.185.234.845,31	45.098.520.146,00	12,88
Pendapatan Transfer - LO	1.682.859.163.238,00	1.575.218.447.658,00	107.640.715.580,00	6,83
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	100.723.984.677,75	129.151.065.948,00	(28.427.081.270,25)	(22,01)
Beban	2.029.224.812.797,57	1.871.552.868.373,53	157.671.944.424,04	8,42
Surplus / Defisit Dari Operasional - LO	149.642.090.109,59	183.001.880.077,78	(33.359.789.968,19)	(18,23)
Beban Non Operasional - LO	64.901.499,78	8.723.540.941,58	(8.658.639.441,80)	(99,26)
Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO	(64.901.499,78)	(8.723.540.941,58)	8.658.639.441,80	(99,26)



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	149.577.188.609,81	174.278.339.136,20	(24.701.150.526,39)	(14,17)
Beban Luar Biasa - LO	73.755.000,00	946.000.000,00	(872.245.000,00)	(92,20)
Surplus / Defisit Dari Pos Luar Biasa	(73.755.000,00)	(946.000.000,0)	872.245.000,00	(92,20)
<b>Surplus/ Defisit - LO</b>	<b>149.503.433.609,81</b>	<b>173.332.339.136,20</b>	<b>(23.828.905.526,39)</b>	<b>(13,75)</b>

Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Magelang disajikan sebagai berikut:

### 1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Magelang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89. Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	395.283.754.991,41	350.185.234.845,31	45.098.520.146,10	112,88
Pendapatan Transfer – LO	1.682.859.163.238,00	1.575.218.447.658,00	107.640.715.580,00	6,83
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	100.723.984.677,75	129.151.065.948,00	(28.427.081.270,25)	(22,01)
<b>Pendapatan - LO</b>	<b>2.178.866.902.907,16</b>	<b>2.054.554.748.451,31</b>	<b>124.312.154.455,85</b>	<b>6,05</b>

Realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.178.866.902.907,16 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.054.554.748.451,31 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp124.312.154.455,85 atau sebesar 6,05%.

Masing - masing akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

PAD-LO ini pada tahun 2019 sebesar Rp395.283.754.991,41 dan tahun 2018 sebesar Rp350.185.234.845,31 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp45.098.520.146,10 atau sebesar 12,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. PAD – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Pajak Daerah - LO	160.354.333.532,47	126.962.045.080,97	33.392.288.451,50	26,30



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	23.464.707.091,13	20.319.179.530,77	3.145.527.560,36	15,48
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	36.104.651.432,81	41.001.530.399,15	(4.896.878.966,34)	(11,94)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	175.360.062.935,00	161.902.479.834,42	13.457.583.100,58	8,31
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO</b>	<b>395.283.754.991,41</b>	<b>350.185.234.845,31</b>	<b>45.098.520.146,10</b>	<b>12,88</b>

Masing-masing nilai jenis PAD-LO Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**(1) Pendapatan Pajak Daerah – LO**

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2019, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2019 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2019. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp160.354.333.532,47 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp126.962.045.080,97 terdapat kenaikan sebesar Rp33.392.288.451,50 atau sebesar 26,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91. Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Hotel - LO	16.177.110.872,00	14.667.346.154,00	1.509.764.718,00	10,29
Pajak Restoran - LO	19.408.844.926,00	13.413.408.056,00	5.995.436.870,00	44,70
Pajak Hiburan - LO	3.938.997.955,00	3.360.917.009,00	578.080.946,00	17,20



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Pajak Reklame - LO	1.022.876.419,47	1.308.708.433,97	(285.832.014,50)	(21,84)
Pajak Penerangan Jalan - LO	35.696.988.605,00	33.618.199.596,00	2.078.789.009,00	6,18
Pajak Parkir - LO	1.884.848.283,00	1.707.769.643,00	177.078.640,00	10,37
Pajak Air Tanah - LO	914.261.052,00	648.000.516,00	266.260.536,00	41,09
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	25.050.649.281,00	16.009.554.375,00	9.041.094.906,00	56,47
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	35.703.259.197,00	27.610.643.108,00	8.092.616.089,00	29,31
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	20.556.496.942,00	14.617.498.190,00	5.938.998.752,00	40,63
<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>160.354.333.532,47</b>	<b>126.962.045.080,97</b>	<b>33.392.288.451,50</b>	<b>26,30</b>

**(2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Pendapatan Retribusi Daerah - LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berikut perda tentang retribusi di Kabupaten Magelang:

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp23.464.707.091,13 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.319.179.530,77 terdapat kenaikan Rp3.145.527.560,36 atau sebesar 15,48% dengan rincian per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.92. Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4= 2-3</b>	<b>5=4/3*100</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO				





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
	592.197.000,00	452.187.000,00	140.010.000,00	30,96
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	325.141.000,00	249.551.500,00	75.589.500,00	30,29
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	820.889.500,00	601.297.100,00	219.592.400,00	36,52
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	8.839.153.753,16	6.726.472.660,49	2.112.681.092,67	31,41
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	1.013.687.500,00	1.054.554.000,00	(40.866.500,00)	(3,88)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	1.915.000,00	1.295.000,00	620.000,00	47,88
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	128.095.000,00	81.405.500,00	46.689.500,00	57,35
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.152.104.024,00	955.957.193,00	196.146.831,00	20,52
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.292.520.284,50	1.165.841.920,83	126.678.363,67	10,87
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	28.487.105,71	36.774.041,97	(8.286.936,26)	(22,53)
Retribusi Terminal – LO	483.627.543,57	535.112.809,00	(51.485.265,43)	(9,62)
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	910.723.800,00	879.030.900,00	31.692.900,00	3,61
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	215.805.000,00	208.033.000,00	7.772.000,00	3,74
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	5.690.177.230,00	5.677.791.150,00	12.386.080,00	0,22
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	111.804.500,00	104.921.000,00	6.883.500,00	6,56
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.758.277.703,00	1.407.222.750,00	351.054.953,00	24,95
Retribusi Izin Gangguan - LO	0,00	68.087.500,00	(68.087.500,00)	(100,00)
Retribusi Izin Trayek – LO	75.276.671,00	82.139.115,00	(6.862.444,00)	(8,35)
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	24.824.476,19	31.505.390,48	(6.680.914,29)	(21,21)
<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b>	<b>23.464.707.091,13</b>	<b>20.319.179.530,77</b>	<b>3.145.527.560,36</b>	<b>15,48</b>

Rincian per obyek dan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.39**.



### (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp36.104.651.432,81 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.001.530.399,15 sehingga terdapat penurunan Rp4.896.878.966,34 atau sebesar 11,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	36.104.651.432,81	41.001.530.399,15	(4.896.878.966,34)	(11,94)
<b>Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD</b>	<b>36.104.651.432,81</b>	<b>41.001.530.399,15</b>	<b>(4.896.878.966,34)</b>	<b>(11,94)</b>

### (4) Lain-Lain PAD yang Sah -LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp175.360.062.935,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp161.902.479.834,42 sehingga terdapat kenaikan Rp13.457.583.100,58 atau sebesar 8,31% dengan rincian per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.94. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	125.060.750,00	383.218.281,00	(258.157.531,00)	(67,37)
Penerimaan Jasa Giro - LO	10.866.974.348,00	10.137.681.886,00	729.292.462,00	7,19
Pendapatan Bunga - LO	19.853.168.014,00	27.137.501.889,42	(7.284.333.875,42)	(26,84)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	-	10.562.500,00	(10.562.500,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	5.853.945.930,00	422.272.923,00	5.431.673.007,00	1.286,29
Pendapatan Denda Pajak - LO	134.800.009,00	1.676.573,00	133.123.436,00	7.940,21



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Denda Retribusi - LO	842.755.980,00	969.383.980,00	(126.628.000,00)	(13,06)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	146.618.073,00	56.949.600,00	89.668.473,00	157,45
Pendapatan dari Pengembalian -LO	2.572.049.586,00	3.610.153.295,00	(1.038.103.709,00)	(28,76)
Pendapatan BLUD - LO	133.496.100.691,00	118.189.442.064,00	15.306.658.627,00	12,95
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	342.296.608,00	438.824.989,00	(96.528.381,00)	(22,00)
Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air- LO	1.107.292.946,00	534.811.854,00	572.481.092,00	107,04
Hasil Penjualan Pertanian- LO	19.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00
Lain -Lain PAD Yang Sah -LO	175.360.062.935,00	161.902.479.834,42	13.457.583.100,58	8,31

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO per obyek per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.40**.

**b) Pendapatan Transfer - LO**

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Adapun Pendapatan Transfer – LO untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.682.859.163.238,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.575.218.447.658,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp107.640.715.580,00 atau 6,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95. Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.459.337.728.117,00	1.398.132.841.570,00	61.204.886.547,00	4,38
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	47.781.527.000,00	0,00	47.781.527.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	163.009.375.121,00	167.726.372.088,00	(4.716.996.967,00)	(2,81)
Bantuan Keuangan - LO	12.730.533.000,00	9.359.234.000,00	3.371.299.000,00	36,02



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Pendapatan Pendapatan Transfer - LO	1.682.859.163.238,00	1.575.218.447.658,00	107.640.715.580,00	6,83
---	----------------------	----------------------	--------------------	------

**(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Magelang untuk periode Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.459.337.728.117,00 dan Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp1.398.132.841.570,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.204.886.547,00 atau sebesar 4,38%.

Tabel 5.96. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bagi Hasil Pajak - LO	32.845.407.899,00	35.047.562.884,00	(2.202.154.985,00)	(6,28)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.936.147.553,00	1.384.029.091,00	552.118.462,00	39,89
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.097.366.974.000,00	1.060.540.612.000,00	36.826.362.000,00	3,47
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	327.189.198.665,00	301.160.637.595,00	26.028.561.070,00	8,64
<b>Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>1.459.337.728.117,00</b>	<b>1.398.132.841.570,00</b>	<b>61.204.886.547,00</b>	<b>4,38</b>

**(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.781.527.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp47.781.527.000,00 atau sebesar 100,00%.

Tabel 5.97. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Dana Penyesuaian - LO	47.781.527.000,00	0,00	47.781.527.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah (DID)	47.781.527.000,00	0,00	47.781.527.000,00	100,00
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO</b>	<b>47.781.527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.781.527.000,00</b>	<b>100,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**(3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp163.009.375.121,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp167.726.372.088,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.716.996.967,00 atau sebesar 2,81 %.

Tabel 5.98. Pendapatan Transfer Daerah – Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	163.009.375.121,00	167.726.372.088,00	(4.716.996.967,00)	(2,81)
Pajak Kendaraan Bermotor	38.936.461.265,00	35.988.442.056,00	2.948.019.209,00	8,19
BBNKB	28.550.829.285,00	29.360.631.767,00	(809.802.482,00)	(2,76)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.832.887.405,00	49.359.617.794,00	(2.526.730.389,00)	(5,12)
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	269.884.249,00	241.921.036,00	27.963.213,00	11,56
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	48.419.312.917,00	52.775.759.435,00	(4.356.446.518,00)	(8,25)
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>163.009.375.121,00</b>	<b>167.726.372.088,00</b>	<b>(4.716.996.967,00)</b>	<b>(2,81)</b>

**(4) Bantuan Keuangan - LO**

Bantuan Keuangan- LO untuk periode Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp12.730.533.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.359.234.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.371.299.000,00 atau sebesar 36,02% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.99. Bantuan Keuangan – LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	12.730.533.000,00	9.359.234.000,00	3.371.299.000,00	36,02
<b>Bantuan Keuangan - LO</b>	<b>12.730.533.000,00</b>	<b>9.359.234.000,00</b>	<b>3.371.299.000,00</b>	<b>36,02</b>

Rincian Bantuan Keuangan per SKPD sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.100. Bantuan Keuangan – LO Per SKPD

No	NAMA SKPD	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	12.730.533.000,00	9.359.234.000,00	3.371.299.000,00	36,02
<b>Pendapatan Bantuan Keuangan - LO</b>		<b>12.730.533.000,00</b>	<b>9.359.234.000,00</b>	<b>3.371.299.000,00</b>	<b>36,02</b>

c) Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.723.984.677,75 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp129.151.065.948,00 terdapat penurunan sebesar Rp28.427.081.270,25 atau sebesar 22,01%.

Tabel 5.101. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Hibah – LO	100.723.984.677,75	129.151.065.948,00	(28.427.081.270,25)	(22,01)
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO</b>	<b>100.723.984.677,75</b>	<b>129.151.065.948,00</b>	<b>(28.427.081.270,25)</b>	<b>(22,01)</b>

Pendapatan Hibah - LO untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.723.984.677,75,00 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp129.151.065.948,00. Terdapat penurunan sebesar Rp28.427.081.270,25 atau 22,01% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.102. Pendapatan Hibah - LO

No	Nama SKPD	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.153.298.406,75	4.029.822.780,00	(2.876.524.373,25)	(71,38)
2	RSUD Muntian	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.072.397,00	253.182.900,00	(38.110.503,00)	(15,05)
4	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.737.946.000,00	0,00	4.737.946.000,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	51.069.470,00	(51.069.470,00)	(100,00)



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama SKPD	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
6	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	35.273.769.949,00	(35.273.769.949,00)	(100,00)
7	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	94.617.667.874,00	89.543.220.849,00	5.074.447.025,00	5,67
<b>Pendapatan Hibah – LO</b>		<b>100.723.984.677,75</b>	<b>129.151.065.948,00</b>	<b>(28.427.081.270,25)</b>	<b>(22,01)</b>

## 2) Beban-LO

Beban - LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban - LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.029.224.812.797,57 sedangkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.871.552.868.373,53 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp157.671.944.424,04 atau sebesar 8,42%.

Rincian Beban Operasi, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa diuraikan sebagai berikut:

### a) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar Belanja Pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2019 dan tidak termasuk pembayaran atas Belanja Pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan Belanja Pegawai yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan ditambah dengan utang Belanja Pegawai yang terjadi pada Tahun 2019.

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp842.355.659.278,00 dan Rp845.496.956.272,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.141.296.994,00 atau 0,37%.

Tabel 5.103. Beban Pegawai - LO

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	789.453.420.775,00	792.249.812.246,00	(2.796.391.471,00)	(0,35)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	34.961.110.122,00	37.373.077.655,00	(2.411.967.533,00)	(6,45)



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	9.482.000.000,00	6.814.600.000,00	2.667.400.000,00	39,14
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.933.633.221,00	5.982.484.717,00	(48.851.496,00)	(0,82)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	512.220.100,00	735.601.169,00	(223.381.069,00)	(30,37)
Beban Uang Lembur – LO	2.013.275.060,00	2.341.380.485,00	(328.105.425,00)	(14,01)
<b>Realisasi Beban Pegawai – LO</b>	<b>842.355.659.278,00</b>	<b>845.496.956.272,00</b>	<b>(3.141.296.994,00)</b>	<b>(0,37)</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 adalah sebesar Rp842.384.330.471,00 dan ada utang Beban Pegawai Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan, RSU Muntian, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp39.118.712,00 serta Tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp10.447.519,00 sehingga Beban Pegawai Tahun 2019 menjadi sebesar Rp842.355.659.278,00.

Tabel 5.104. Beban Pegawai

Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Utang Gaji Tahun 2019 (Rp)	Utang Gaji Tahun 2018 (Rp)	Beban Pegawai – LO (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Gaji dan Tunjangan	789.482.091.968,00	10.447.519,00	39.118.712,00	789.453.420.775,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	34.961.110.122,00			34.961.110.122,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.482.000.000,00			9.482.000.000,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.933.633.221,00			5.933.633.221,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	512.220.100,00			512.220.100,00
Beban Uang Lembur	2.013.275.060,00			2.013.275.060,00
<b>Jumlah</b>	<b>842.384.330.471,00</b>	<b>10.447.519,00</b>	<b>39.118.712,00</b>	<b>842.355.659.278,00</b>

Rincian Beban Pegawai-LO terdapat dalam **Lampiran 5.41**.





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**b) Beban Persediaan**

Beban Persediaan yaitu beban yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

Tabel 5.105. Beban Persediaan

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
<b>PERSEDIAAN AWAL 2019</b>		<b>21.159.921.152,85</b>
<b>PENAMBAH</b>		
1	Pembelian (Belanja Persediaan)	81.880.472.933,00
2	Reklas dari Aset Tetap	8.577.022.254,00
3	koreksi masuk persediaan di BPBD dari Hibah Provinsi dan BNPB	695.186.422,00
4	Ditambah Persediaan Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat di SKPD DISTANPANGAN Tahun 2019	1.665.820.980,00
5	Ditambah Persediaan Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat di SKPD DPUPR Tahun 2019	843.122.623,00
<b>JUMLAH PENAMBAH</b>		<b>93.661.625.212,00</b>
<b>PENGURANG</b>		
1	Saldo akhir Persediaan 2019	21.411.185.873,18
2	Reklas Ke Aset Tetap	38.543.500,00
3	Persediaan 2018 BPBD yang digunakan lagi di Tahun 2019	480.114.025,00
<b>JUMLAH PENGURANG</b>		<b>21.929.843.398,18</b>
<b>BEBAN PERSEDIAAN 2019</b>		<b>92.891.702.966,67</b>

Beban Persediaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp92.891.702.966,67 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp76.960.279.064,67 atau terdapat kenaikan sebesar Rp15.931.423.902,00 atau 20,70%.

Tabel 5.106. Beban Persediaan per Jenis

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bahan Pakai Habis	21.986.372.283,00	10.764.436.082,00	11.221.936.201,00	104,25
Beban Persediaan Bahan/ Material	15.227.697.091,67	10.149.380.711,67	5.078.316.380,00	50,04
Beban Cetak	5.178.230.102,00	5.432.727.949,00	(254.497.847,00)	(4,68)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	353.228.000,00	489.178.400,00	(135.950.400,00)	(27,79)
Beban Pakaian Kerja	1.094.729.269,00	934.153.485,00	160.575.784,00	17,19



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	827.135.280,00	947.939.280,00	(120.804.000,00)	(12,74)
Beban Persediaan BOS	20.226.917.257,00	16.716.553.211,00	3.510.364.046,00	21,00
Beban Persediaan BLUD	27.997.393.684,00	25.276.969.946,00	2.720.423.738,00	10,76
Beban Barang Dana BOS	0,00	6.248.940.000,00	(6.248.940.000,00)	(100,00)
<b>Beban Persediaan</b>	<b>92.891.702.966,67</b>	<b>76.960.279.064,67</b>	<b>15.931.423.902,00</b>	<b>20,70</b>

Rincian Beban Persediaan terdapat dalam **Lampiran 5.42**.

**c) Beban Jasa**

Beban Jasa yaitu beban yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi.

Beban Jasa Tahun 2019 adalah sebesar Rp376.084.176.588,75 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp313.937.087.145,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp62.147.089.443,75 atau 19,80 %.

Tabel 5.107. Beban Jasa

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Jasa Kantor	131.823.637.064,00	115.129.315.892,00	16.694.321.172,00	14,50
Beban Premi Asuransi	25.044.713.027,00	5.350.077.800,00	19.694.635.227,00	368,12
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	939.685.600,00	1.137.546.800,00	(197.861.200,00)	(17,39)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.230.538.600,00	1.257.804.060,00	(27.265.460,00)	(2,17)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.838.269.660,00	1.341.371.805,00	496.897.855,00	37,04
Beban Makanan dan Minuman	34.769.002.180,00	27.408.980.045,00	7.360.022.135,00	26,85
Beban Jasa Konsultasi	9.906.263.595,00	6.101.414.827,00	3.804.848.768,00	62,36
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	69.600.000,00	143.500.000,00	(73.900.000,00)	(51,50)



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.380.213.843,00	4.039.624.395,00	1.340.589.448,00	33,19
Beban Honorarium PNS	27.849.759.495,00	26.141.146.450,00	1.708.613.045,00	6,54
Beban Honorarium Non PNS	10.809.365.478,00	5.251.506.520,00	5.557.858.958,00	105,83
Beban Pajak / Retribusi	199.668.864,00	177.888.267,00	21.780.597,00	12,24
Beban Pegawai BLUD	36.081.511.582,00	35.556.853.149,00	524.658.433,00	1,48
Beban Barang Jasa BLUD	6.114.837.861,00	0,00	6.114.837.861,00	0,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	7.591.777.000,00	7.011.136.000,00	580.641.000,00	8,28
Beban Jasa BOS	40.439.328.849,00	29.587.981.675,00	10.851.347.174,00	36,67
Beban Jasa BLUD	35.195.760.970,75	35.597.283.935,00	(401.522.964,25)	(1,13)
Beban Pegawai BOS	800.242.920,00	12.703.655.525,00	(11.903.412.605,00)	(93,70)
<b>Beban Jasa</b>	<b>376.084.176.588,75</b>	<b>313.937.087.145,00</b>	<b>62.147.089.443,75</b>	<b>19,80</b>

Rincian Beban Jasa per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.43**.

Beban Premi Asuransi Tahun 2019 sebesar Rp25.044.713.027 sudah termasuk didalamnya iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp6.364.715.000,00 yang dibayarkan melalui transfer pemerintah pusat dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke rekening BPJS sesuai PMK Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah.

**d) Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan yaitu beban yang digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset Lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi.

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp47.409.954.402,00 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp61.188.538.212,00 atau terdapat Penurunan sebesar Rp13.778.583.810,00 atau 22,52%.



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.108. Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Pemeliharaan	28.455.401.474,00	41.141.139.069,00	(12.685.737.595,00)	(30,83)
Beban Pemeliharaan BOS	4.042.684.833,00	5.623.550.797,00	(1.580.865.964,00)	(28,11)
Beban Pemeliharaan BLUD	3.133.344.049,00	1.967.600.732,00	1.165.743.317,00	59,25
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	11.778.524.046,00	12.456.247.614,00	(677.723.568,00)	(5,44)
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>47.409.954.402,00</b>	<b>61.188.538.212,00</b>	<b>(13.778.583.810,00)</b>	<b>(22,52)</b>

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.44**.

**e) Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tugas utama suatu instansi.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 adalah sebesar Rp48.664.259.432,00 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp46.779.892.848,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp1.884.366.584,00 atau 4,03%.

Tabel 5.109. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Perjalanan Dinas SKPD	45.454.051.742,00	43.451.449.528,00	2.002.602.214,00	4,61
Beban Perjalanan Dinas BOS	1.955.007.770,00	1.922.527.201,00	32.480.569,00	1,69
Beban Perjalanan Dinas BLUD	1.255.199.920,00	1.405.916.119,00	(150.716.199,00)	(10,72)
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>48.664.259.432,00</b>	<b>46.779.892.848,00</b>	<b>1.884.366.584,00</b>	<b>4,03</b>

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD ada pada **Lampiran 5.45**.

**f) Beban Hibah**

Beban Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp71.533.972.620,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp80.382.264.334,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp8.848.291.714,00 atau 11,01% .



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.110. Beban Hibah

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	46.064.197.000,00	55.322.664.784,00	(9.258.467.784,00)	(16,74)
Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat	25.469.775.620,00	25.059.599.550,00	410.176.070,00	1,64
<b>Realisasi Beban Hibah</b>	<b>71.533.972.620,00</b>	<b>80.382.264.334,00</b>	<b>(8.848.291.714,00)</b>	<b>(11,01)</b>

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tersebut sama dengan realisasi belanja hibah sebesar Rp46.064.197.000,00 dan Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp25.469.775.620,00 merupakan realisasi belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp27.978.719.223,00 dikurangi persediaan tahun 2019 sebesar Rp1.665.820.980,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Pangan dan Rp843.122.623,00 pada SKPD DPUPR.

Tabel 5.111. Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Nama SKPD	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Audited) (Rp)	Pengurangan (Rp)	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Audited) (Rp)	Keterangan Pengurangan
1	2	3	4=2-3	5
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10.591.545.900,00		10.591.545.900,00	
Dinas Kesehatan	213.818.000,00		213.818.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.151.383.066,00	843.122.623,00	6.308.260.443,00	Persediaan 2019
Dinas Pertanian Dan Pangan	5.471.204.615,00	1.665.820.980,00	3.805.383.635,00	Persediaan 2019
Dinas Lingkungan Hidup	1.318.788.231,00		1.318.788.231,00	
Dinas Peternakan Dan Perikanan	3.231.979.411,00		3.231.979.411,00	
<b>Jumlah</b>	<b>27.978.719.223,00</b>	<b>2.508.943.603,00</b>	<b>25.469.775.620,00</b>	



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**g) Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp31.625.859.000,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp42.379.569.000,00 sehingga terdapat penurunan Rp10.753.710.000,00 atau 25,37%.

Beban Bantuan Sosial tahun 2019 tersebut sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 sebesar Rp31.625.859.000,00.

Tabel 5.112. Beban Bantuan Sosial

Nama SKPD	Beban Bantuan Sosial		Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)		
Dinas Kesehatan	0,00	254.073.000,00	(254.073.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	418.160.400,00	473.856.000,00	(55.695.600,00)	(11,75)
Dinas Pertanian dan Pangan	152.820.000,00	0,00	152.820.000,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	206.600.000,00	0,00	206.600.000,00	0,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	649.669.600,00	707.275.000,00	(57.605.400,00)	(8,14)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	30.198.609.000,00	40.944.365.000,00	(10.745.756.000,00)	(26,24)
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>31.625.859.000,00</b>	<b>42.379.569.000,00</b>	<b>(10.753.710.000,00)</b>	<b>(25,37)</b>

**h) Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp214.186.862.590,94 dan Rp195.212.527.491,41 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp18.974.335.099,53 atau 9,72%.

Tabel 5.113. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.202.143.902,68	62.686.655.315,39	16.515.488.587,29	26,35
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.636.632.312,70	30.154.500.933,48	5.482.131.379,22	18,18



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	97.274.537.420,56	100.075.374.217,87	(2.800.836.797,31)	(2,80)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.073.548.955,00	2.295.997.024,67	(222.448.069,67)	(9,69)
<b>Realisasi Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>214.186.862.590,94</b>	<b>195.212.527.491,41</b>	<b>18.974.335.099,53</b>	<b>9,72</b>

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.46**.

**i) Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.648.551.349,21 dan Rp4.370.009.919,45 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp721.458.570,24 atau 16,51%. Berikut Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018:

Tabel 5.114. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	3.648.551.349,21	4.205.243.416,25	(556.692.067,04)	(13,24)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	164.766.503,20	(164.766.503,20)	(100,00)
<b>Realisasi Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>3.648.551.349,21</b>	<b>4.370.009.919,45</b>	<b>(721.458.570,24)</b>	<b>(16,51)</b>

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.115. Beban Penyisihan Piutang Per SKPD

SKPD	Beban Penyisihan Piutang		Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)		
RSUD Muntian	0,00	164.766.503,20	(164.766.503,20)	(100,00)
Dinas Perhubungan	13.259.093,75	11.957.181,25	1.301.912,50	10,89
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.821.066,25	(1.821.066,25)	(100,00)



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

SKPD	Beban Penyisihan Piutang		Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)		
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.669.651.515,20	1.318.697.251,85	1.350.954.263,35	102,45
Dinas Peternakan dan Perikanan	17.983.928,00	2.658.440,00	15.325.488,00	576,48
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	947.656.812,26	2.870.109.476,90	(1.922.452.664,64)	(66,98)
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>3.648.551.349,21</b>	<b>4.370.009.919,45</b>	<b>(721.458.570,24)</b>	<b>(16,51)</b>

**j) Beban Lain-Lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sehat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp231.784.708,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp544.772.891,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp312.988.183,00 atau 57,45%.

Rincian Beban Lain – Lain per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.47**.

**k) Beban Penyisihan Investasi Non Permanen**

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp82.449.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp82.449.000,00 atau 100%.

**l) Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban transfer Tahun 2019 yang diberikan kepada Provinsi, pemerintah desa dan partai politik.

Beban Transfer pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebesar Rp300.592.029.862,00 dan Rp204.218.522.196,00 terdapat kenaikan sebesar Rp96.373.507.666,00 atau 47,19 %.

Tabel 5.116. Beban Transfer

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>14.130.217.300,00</b>	<b>11.517.775.700,00</b>	<b>2.612.441.600,00</b>	<b>22,68</b>
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan	14.130.217.300,00	11.517.775.700,00	2.612.441.600,00	22,68
<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>	<b>4.521.758.861,00</b>	<b>4.182.065.383,00</b>	<b>339.693.478,00</b>	<b>8,12</b>
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	3.379.422.100,00	2.831.823.517,00	547.598.583,00	19,34
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi	1.142.336.761,00	1.350.241.866,00	(207.905.105,00)	(15,40)
<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>280.863.087.201,00</b>	<b>187.146.528.113,00</b>	<b>93.716.559.088,00</b>	<b>50,08</b>
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	280.863.087.201,00	187.146.528.113,00	93.716.559.088,00	50,08
<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>1.076.966.500,00</b>	<b>1.122.153.000,00</b>	<b>(45.186.500,00)</b>	<b>(4,03)</b>
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	1.076.966.500,00	1.122.153.000,00	(45.186.500,00)	(4,03)
<b>Beban Transfer</b>	<b>300.592.029.862,00</b>	<b>204.218.522.196,00</b>	<b>96.373.507.666,00</b>	<b>47,19</b>

**m) Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Surplus/Defisit dari Operasi selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp149.642.090.109,59 dan Tahun 2018 sebesar Rp183.001.880.077,78 terdapat penurunan sebesar Rp33.359.789.968,19 atau 18,23%.

**n) Beban Non Operasional**



Realisasi Beban Non Operasional pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp64.901.499,78 dan Rp8.723.540.941,58 terdapat penurunan sebesar Rp8.658.639.441,80 atau 99,26%.

Beban Non Operasional merupakan penghapusan Bangunan Gedung berdasarkan SK Bupati Nomor 180.182/443/KEP/23/2019 tanggal 31 Desember 2019. Barang-barang yang dihapuskan tersebut nilai bukunya jauh lebih kecil dari nilai perolehannya. Pada saat aset-aset tersebut dipindahkan ke Aset Lain-Lain sebelum dihapuskan, Pemerintah Kabupaten Magelang sudah melakukan penyusutan sehingga nilai yg tercantum di nilai Aset Lain-Lain tersebut sebesar nilai buku.

**o) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp64.901.499,78 dan Rp8.723.540.941,58 atau terdapat penurunan sebesar Rp 8.658.639.441,80 atau 99,26%.

**p) Pendapatan Luar Biasa – LO**

Pendapatan Luar Biasa - LO pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**q) Beban Luar Biasa- LO**

Beban Luar Biasa - LO pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp73.755.000,00 dan Rp946.000.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp872.245.000,00 atau 92,20%. Beban Luar Biasa terdiri dari Beban Tak Terduga untuk penanganan bencana.

**r) Surplus/Defisit – LO**

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada Laporan Operasional Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten memperoleh surplus sebesar Rp149.503.433.609,81 dan Tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp173.332.339.136,20 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp23.828.905.526,39 atau 13,75%.

**5.e. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS (LAK)**

Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Informasi ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai pengaruh dari masing – masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah;



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2) Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas.

Komponen laporan arus kas yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri atas arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas aktivitas pembiayaan, dan arus kas aktivitas non anggaran.

Laporan Arus Kas tahun anggaran 2018 disajikan kembali sesuai dengan format penyajian laporan arus kas tahun anggaran 2019.

### 1) Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

#### a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2019 sebesar Rp2.575.327.998.124,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp2.302.180.510.955,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.117. Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Audited) (Rp)	(Audited) (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	156.886.789.644,00	124.444.072.936,00
Penerimaan Retribusi Daerah	22.934.190.849,00	18.186.191.392,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	23.700.417.768,00	28.534.358.666,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	213.544.874.069,00	153.914.437.410,00
Dana Alokasi Umum	1.097.366.974.000,00	1.060.540.612.000,00
Dana Alokasi Khusus	327.189.198.665,00	301.160.637.595,00
Dana Desa	383.071.777.000,00	325.360.832.000,00
Dana Penyesuaian	47.781.527.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak	26.872.678.200,00	35.047.562.884,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.375.208.237,00	1.384.029.091,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	167.256.161.818,00	154.791.322.105,00
Bantuan Keuangan	12.730.533.000,00	9.359.234.000,00
Pendapatan Hibah	94.617.667.874,00	89.457.220.849,00
Pendapatan operasi BLUD	0,00	0,00
Pendapatan operasi BOS	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2.575.327.998.124,00</b>	<b>2.302.180.510.955,00</b>

#### b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tahun 2019 sebesar Rp2.182.063.607.163,00 dan tahun 2018 sebesar Rp1.984.813.185.908,00 merupakan pengeluaran kas untuk biaya operasional pemerintah dalam Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.118. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Audited) (Rp)	(Audited) (Rp)
Pembayaran Pegawai	842.384.330.471,00	845.457.837.560,00
Pembayaran Barang dan Jasa	550.024.856.503,00	495.704.552.647,00
Pembayaran Hibah	74.042.916.223,00	70.898.793.334,00
Pembayaran Bantuan Sosial	31.625.859.000,00	42.379.569.000,00
Pembayaran Tak Terduga	73.755.000,00	946.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	18.900.059.265,00	15.546.920.254,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	665.011.830.701,00	513.879.513.113,00
<b>Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2.182.063.607.163,00</b>	<b>1.984.813.185.908,00</b>

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar Rp393.264.390.961,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp317.367.325.047,00

## 2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

### a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp 125.060.750,00 dan tahun 2018 sebesar Rp131.250.988.000,00 merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berasal dari pencairan dana cadangan, penjualan aset tetap dan aset lainnya. Berikut rincian Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi:

Tabel 5.119. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2019(Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	131.250.988.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	400.000,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	110.878.750,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	13.782.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>125.060.750,00</b>	<b>131.250.988.000,00</b>

### b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp396.733.995.844,00 dan tahun 2018 sebesar Rp527.482.375.251,00 merupakan pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan, perolehan aset tetap dan aset lain serta penyertaan modal Pemerintah Daerah. Berikut rincian Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.120..Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited)(Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	14.038.662.136,00	14.739.607.873,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	131.750.646.976,00	58.710.296.254,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	131.649.038.026,00	272.403.892.514,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91.473.924.357,00	135.156.134.118,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	15.782.598.699,00	20.198.464.502,00
Perolehan Aset Lainnya	1.835.125.000,00	518.980.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.204.000.000,00	25.755.000.000,00
<b>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi</b>	<b>396.733.995.844,00</b>	<b>527.482.375.261,00</b>

Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun 2018 sebesar (Rp396.231.387.261,00) dan Tahun 2019 sebesar (Rp396.733.995.844,00) Ini menggambarkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Magelang lebih banyak berinvestasi untuk menambah aset.

### 3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

#### a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesar Rp11.400.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman dana bergulir, penerimaan hasil pencairan deposito dan penerimaan pinjaman BLUD. Berikut rincian arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan:

Tabel 5.121. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2019(Audited) (Rp)	Tahun 2018(Audited) (Rp)
Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	11.400.000,00	0,00
Penerimaan pinjaman BLUD	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan tahun 2018 sebesar Rp0,00 berasal dari pemindahbukuan ke investasi jangka pendek:

Tabel 5.122.Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)
Pembayaran pokok pinjaman BLUD	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2019 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp11.400.000,00

#### 4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

##### a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris (non anggaran) adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai oleh pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes, penerimaan UUDP tahun lalu maupun penerimaan atas kesalahan setor. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga, pengeluaran kesalahan BOS serta penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran.

Metode yang digunakan dalam menyajikan Laporan Arus Kas ini menggunakan metode langsung dengan mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Keuntungan metode ini adalah:

- Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang.
- Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan.
- Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris pada tahun 2019 sebesar Rp6.470.301.277,00 dan tahun 2018 sebesar Rp70.039.335.357,00. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.123. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited)(Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	6.470.301.277,00	69.995.949.159,00
Penerimaan UUDP Tahun lalu	0,00	43.386.198,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>6.470.301.277,00</b>	<b>70.039.335.357,00</b>

##### b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris (non anggaran) adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga, pengeluaran kesalahan RSU serta penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran.

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada tahun 2019 sebesar Rp6.690.942.905,00 dan tahun 2018 sebesar Rp69.882.337.748,00. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 5.124. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	6.506.172.905,00	69.882.337.748,00
Pengembalian Lebih Salur Ke Provinsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan di Bendahara Pengeluaran	184.770.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>6.690.942.905,00</b>	<b>69.882.337.748,00</b>

Arus Kas keluar dari aktivitas transitoris tahun 2019 berasal dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga sebesar Rp6.506.172.905,00 terdiri dari pembayaran titipan badan dan pajak pada BLUD Puskesmas dan pengembalian lebih salur dana BOS ke provinsi sebesar Rp 184,770.000,00

Pada Tahun 2018 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp156.997.609,00 dan pada Tahun 2019 arus kas bersih dari aktivitas ini adalah (Rp220.641.628,00).

Terdapat penurunan bersih kas selama periode sebesar Rp3.553.785.761,00 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Sedangkan saldo akhir kas sebesar Rp218.893.323.318,00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir kas selain investasi jangka pendek di BUD, Kas BLUD dan Kas BOS sebesar Rp0,00 saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125. Kenaikan Penurunan Kas

Uraian	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	( 3.553.785.761,00)	(78.708.295.366,00)
Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas BLUD, Kas BOS	222.516.783.076,00	303.478.264.300,00
Koreksi saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS setelah koreksi	(69.673.997,00)	(2.254.416.619,00)
Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas BLUD dan Kas BOS setelah koreksi	222.447.109.079,00	301.223.847.681,00
Saldo akhir Kas di BUD /Kas Daerah, Kas BLUD, Kas BOS	218.893.323.318,00	222.515.552.315,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	(80.000.000.000,00)
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas di BOS Selain yang diinvestasikan	0,00	142.516.783.076,00
Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.739.169,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	101.836.500,00
Saldo Akhir Kas	218.893.323.318,00	142.624.358.745,00

Saldo awal Kas tahun 2019 dikoreksi sebesar (Rp69.673.997,00) yang berasal dari selisih saldo BOS per 31 Desember 2018 audited sebesar Rp1.347.001.214,00 dengan saldo BOS per 31 Desember 2018 hasil rekonsiliasi sebesar Rp 1.277.327.217,00.



#### 5.f. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Penambahan Ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp149.503.433.609,81 merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif kesalahan mendasar berupa koreksi-koreksi akuntansi sebesar Rp14.590.086.492,47.

Pada Tahun 2019 tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan dan Selisih Revaluasi Aset Tetap. Ini berarti Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar hanya dipengaruhi oleh adanya Koreksi ekuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.590.086.492,47 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.126 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR</b>		<b>(14.590.086.492,47)</b>
<b>PENAMBAH</b>		
1	<b>AKUMULASI DEPRESIASI</b>	<b>1.138.646.818,70</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan oleh koreksi akumulasi depresiasi aset tetap. Ini terjadi karena kesalahan pencatatan dan/atau penghitungan nilai akumulasi depresiasi serta kesalahan pencatatan dan/atau penghitungan nilai aset tetap pada pembukuan tahun sebelumnya yang menyebabkan kesalahan perhitungan akumulasi depresiasi.	
2	<b>PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>1.405.452.180,00</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan karena adanya koreksi nilai penyisihan piutang tahun sebelumnya. Koreksi nilai penyisihan piutang terjadi karena kesalahan perhitungan nilai penyisihan piutang tahun sebelumnya maupun karena adanya koreksi nilai piutang tahun sebelumnya yang mengakibatkan berubahnya nilai penyisihan piutang.	
3	<b>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>	<b>5.290.096.702,00</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan adanya koreksi pengakuan lebih salur bagi hasil dari pemerintah pusat berdasar PMK Nomor 103 /PMK/07/2018	
4	<b>INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>11.400.000,00</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan karena adanya pengakuan kembali dana bergulir	
<b>JUMLAH PENAMBAH</b>		<b>7.845.595.700,70</b>
<b>PENGURANG</b>		
1	<b>MUTASI ASET TETAP</b>	<b>1.496.861.452,58</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan oleh koreksi mutasi aset tetap, berupa: koreksi penambahan nilai aset tetap karena kesalahan pencatatan dan/atau penilaian, serta koreksi karena adanya mutasi aset antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koreksi kesalahan pencatatan dan/atau penilaian terjadi karena kesalahan pencatatan dan/atau penilaian aset tetap yang dimasukkan ke dalam barang ekstrakomtable dan sebaliknya. Kesalahan pencatatan dan/atau penilaian aset tetap juga disebabkan karena salah menghitung, mencatat dan/atau menilai nilai nominal aset tetap pada pembukuan tahun sebelumnya.	
2	<b>MUTASI ASET LAINNYA</b>	<b>(115.365.124,50)</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan oleh koreksi mutasi aset lainnya, berupa: koreksi penambahan nilai aset lainnya karena kesalahan pencatatan dan/atau penilaian. Koreksi kesalahan pencatatan dan/atau penilaian terjadi karena kesalahan pencatatan dan/atau penilaian aset lainnya yang dimasukkan ke dalam aset tetap dan sebaliknya. Kesalahan pencatatan dan/atau penilaian aset lainnya juga disebabkan karena salah menghitung, mencatat dan/atau menilai nilai nominal aset tetap pada pembukuan tahun sebelumnya.	





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
3	<b>KOREKSI NILAI PIUTANG</b>	<b>(23.452.162.350,25)</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan adanya koreksi nilai piutang tahun sebelumnya karena kesalahan perhitungan dan/atau pencatatan nilai piutang tahun sebelumnya, maupun penambahan/pengurangan jenis piutang tahun sebelumnya yang belum tercatat.	
4	<b>KOREKSI DANA BOS</b>	<b>(163.406.171,00)</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan karena adanya koreksi dana BOS tahun 2019	
5	<b>AKUMULASI AMORTISASI</b>	<b>(201.610.000,00)</b>
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan oleh koreksi akumulasi amortisasi aset lainnya. Ini terjadi karena kesalahan pencatatan dan/atau penghitungan nilai akumulasi amortisasi itu sendiri maupun kesalahan pencatatan dan/atau penghitungan nilai aset tetap pada pembukuan tahun sebelumnya yang menyebabkan kesalahan perhitungan akumulasi amortisasi.	
<b>JUMLAH PENGURANG</b>		<b>(22.435.682.193,17)</b>

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2019 terdapat dalam **Lampiran 5.48**.

Nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai Surplus/Defisit-LO ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar didapat nilai ekuitas akhir Tahun 2019 sebesar Rp3.256.956.976.794,83.

## 5.g. INFORMASI PENTING LAINNYA

### a. Dana Bencana Alam

Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki rekening untuk menampung dana bantuan dari masyarakat yang berada di rekening Bank Jateng Cabang Magelang dengan Nomor Rekening 10050082. Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp461.062.190,00

### b. Kegiatan yang Belum Selesai

Selama tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2019 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagai berikut:

Tabel 5.127. Kegiatan yang Belum Selesai

No	Kegiatan	Nilai Kontrak/Adendum	Realisasi	Sisa
1	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar wil.KR Santri (Pendukung Adipura)	1.312.489.000,00	1.225.890.975,00	86.598.025,00
2	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar wil.IKK Kajoran	948.426.000,00	887.726.736,00	60.699.264,00
3	Penyediaan Sarpras Air Limbah Dusun Jlegong Ds.Klegen, Kec. Grabag	396.083.000,00	343.366.953,00	52.716.047,00
4	Pembangunan Kantor Kecamatan Borobudur	5.831.549.000,00	5.438.794.175,00	392.754.825,00
5	Peningkatan Jalan Tampir Wetan – Beteh, Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten	1.119.881.000,00	1.015.946.950,00	103.934.050,00
6	Peningkatan Jalan Tampir Selomerah-Babrik, Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten	729.081.000,00	636.976.350,00	92.104.650,00
	<b>Jumlah</b>			<b>788.806.861,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**c. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**

Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dan 367 desa. Selama tahun 2019, total penerimaan dan pengeluaran Desa adalah Rp621.123.645.954,00 dan Rp607.898.543.601,00.

Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, Pemda diwajibkan menyusun ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat dilihat pada **Lampiran 5.49**.

**d. Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama**

Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 Wilayah (0319) Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut

**1) Neraca**

Tabel 5.128. Neraca TP / UB

URAIAN	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
<b>ASET</b>		
Piutang Bukan Pajak		11.960.000,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		20.745.750,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak		(59.800,00)
Persediaan	815.918.000,00	4.737.946.000,00
<b>Aset Lancar</b>	<b>815.918.000,00</b>	<b>4.770.591.950,00</b>
<b>Aset Tetap</b>		
Peralatan dan Mesin	-	-
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>815.918.000,00</b>	<b>4.770.591.950,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	815.918.000,00	4.770.591.950,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>815.918.000,00</b>	<b>4.770.591.950,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>815.918.000,00</b>	<b>4.770.591.950,00</b>

**2) Laporan Realisasi Anggaran**

Tabel 5.129. LRA TP / UB

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	0,00	41.255.750,00	0,00
PENERIMAAN NEGARA	0,00	41.255.750,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
Penerimaan Perpajakan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	41.255.750,00	6.866.400,00
<b>HIBAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0,00</b>	<b>41.255.750,00</b>	<b>6.866.400,00</b>
<b>BELANJA</b>	<b>15.093.768.000,00</b>	<b>13.941.955.025,00</b>	<b>23.474.125.460,00</b>
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	15.093.768.000,00	13.941.955.025,00	23.492.326.640,00
Belanja Modal	0,00	0,00	-
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja lain-lain	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>15.093.768.000,00</b>	<b>13.941.955.025,00</b>	<b>23.492.326.640,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3) Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 5.130. LPE TP / UB

URAIAN	JUMLAH (Rp)
EKUITAS AWAL	32.542.221,00
SURPLUS/ DEFISIT- LO	(13.117.323.496,00)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.092.482.300,00
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	13.624.134.975,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>815.918.000,00</b>

### 4) Laporan Operasional

Tabel 5.131. Laporan Operasional TP / UB

URAIAN	TOTAL
SURPLUS/ DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	0,00
PENDAPATAN	1.800.000,00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.800.000,00
BEBAN	13.125.873.496,00
BEBAN PEGAWAI	0,00
BEBAN PERSEDIAAN	20.768.250,00
BEBAN BARANG DAN JASA	215.430.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	0,00
BEBAN PERJALANAN DINAS	274.375.050,00
BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00
BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	12.615.463.725,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TOTAL
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	(163.529,00)
JUMLAH BEBAN	13.125.873.496,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13.124.073.496,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	6.750.000,00
BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	6.750.000,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	6.750.000,00
POS LUAR BIASA	0,00
<b>SURPLUS/ DEFISIT LO</b>	<b>(13.117.323.496,00)</b>

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

a) **Dasar Hukum Tugas Pembantuan**

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b) **Tugas Pembantuan yang Diterima**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas Pembantuan Tahun 2019 dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan rincian sebagai berikut:

(1) Dinas Pertanian dan Pangan

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 1 DIPA Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan total anggaran sebesar Rp13.890.000.000,00. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp13.305.801.000,00 (95,79%) dengan realisasi fisik sebesar 100,00%, secara rinci dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.132. Realisasi Tugas Pembantuan yang Diterima Dinas Pertanian Tahun 2019

No	Kementerian	SKPD Pelaksana /No.DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan SP DIPA- 018.04.4.039069/2019	13.890.000.000	12.849.472.725	92,51	100,00

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan ini, Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.

a. Kawasan Sayuran lainnya (Kawasan Bawang Putih)

Pengembangan kawasan bawang putih mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.740.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp10.810.096.000,00 atau 92,08 %.

Output kegiatan pengembangan kawasan bawang putih meliputi :

- a) Fasilitasi bantuan sarana produksi kepada 76 kelompok tani bawang putih seluas 730 ha, berupa : Mulsa plastik hitam perak sejumlah 7.300 rol, Benih bawang putih varietas lumbu hijau dan varietas lumbu kuning sejumlah 40.000 kg, Pupuk NPK dengan kandungan 15 : 15 : 15 sejumlah 367.500 kg, Pupuk organik cair sejumlah 3.020 liter, Likat kuning 10.950 buah dan Feromon BWG 10.950 buah.
- b) Pembuatan Obor Pangan Lestari sebanyak 1 (satu) unit.
- c) Pertemuan bimbingan teknis petani milenial sebanyak 5 (lima) kali.
- d) Koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan pusat.

Hasil (*Outcome*) kegiatan pengembangan Kawasan bawang putih ini adalah pengembangan kawasan bawang putih seluas 730 ha di 76



kelompok tani dan tersedianya percontohan pemanfaatan lahan pekarangan (green house untuk komoditas hortikultura dan perikanan sebanyak 1 (satu) unit.

#### Kawasan Aneka Cabai

Pengembangan kawasan aneka cabai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.625.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp1.578.147.125,00 atau 97,12 %.

Output kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai meliputi :

- a) Fasilitasi bantuan sarana produksi kepada 45 kelompok tani cabai seluas 125 ha, berupa : mulsa plastik hitam perak sejumlah 625 rol, pupuk NPK dengan kandungan 16 : 16 : 16 sejumlah 62.500 kg, pupuk POC sejumlah 625 liter, pupuk Dolomit sejumlah 375.000 kg, dan liat kuning sejumlah 5.000 buah.
- b) Pertemuan koordinasi dan pembinaan kelompok tani cabai rawit dan cabai besar sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.

Hasil (*outcome*) kegiatan pengembangan Kawasan aneka cabai adalah pengembangan kawasan cabai rawit seluas 50 ha dan pengembangan cabai besar (cabai merah keriting) seluas 75 ha di 45 kelompok tani.

#### Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Sub Kegiatan layanan dukungan manajemen dan teknis lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp105.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp96.728.000,00 atau 92,12 %. Output kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya adalah tersedianya anggaran untuk penyusunan laporan keuangan dan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan, dengan hasil (*outcome*) tersusunnya laporan realisasi keuangan dan laporan akhir kegiatan APBN Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

#### Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Pada Tahun 2018, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menerima anggaran APBN untuk pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura sebesar Rp420.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp364.501.600,00 atau 86,79 %.

*Output* kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, meliputi:

- a) Bimbingan teknis GHP buah salak sejumlah 1 (satu), 10 (sepuluh) kali pertemuan.
- b) Bimbingan teknis GHP sayuran bawang putih sejumlah 1 (satu), 10 (sepuluh) kali pertemuan
- c) Fasilitasi alisintan dan sarana pasca panen, berupa :
  - Bantuan pasca panen cabai besar berupa keranjang panen 221 buah untuk gapoktan Harapan Jaya, desa Mangunrejo, kecamatan Tegalrejo
  - Bantuan pasca panen cabai besar berupa gudang pasca panen sebanyak 1 unit untuk kelompok tani kembang sari desa Sonorejo, kecamatan Candimulyo.



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

---

- Bantuan sarana pasca panen bawang putih berupa para-para untuk pengeringan sejumlah 12 (dua belas) buah untuk kelompok tani Sido Luhur Girirejo desa Girimulyo, kecamatan Windusari.
- Bahan fasilitasi pasar lelang cabai sebanyak 1 unit (keranjang panen, meja kursi, timbangan dan blower) untuk kelompok tani kembang sari, Desa Sonorejo, Kecamatan Candimulyo.

Hasil (*outcome*) kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura yaitu ;

- a) Kelompok tani dapat melaksanakan panen dan pasca panen yang baik sesuai dengan *Good Handling Practices* dengan memanfaatkan bantuan sarana yang ada.
- b) Kelompok tani dapat memanfaatkan bangsal sarana pasca panen untuk penanganan pasca panen dan pemasaran hasil cabai dengan sistem lelang.

Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan antara lain :

- a. Proses penetapan CP CL terlambat karena adanya perubahan-perubahan kebijakan dan banyaknya usulan kelompok tani yang masuk dalam e proposal.
- b. Pengadaan barang mendekati waktu tanam dan mendekati akhir tahun anggaran.
- c. Lamanya antrian proses pengadaan di Pokja ULP.
- d. Pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan tahun anggaran
- e. Keterbatasan SDM petani bawang putih dalam budidaya yang sesuai dengan norma budidaya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)
- f. Gudang untuk penanganan pasca panen untuk mendukung perbenihan bawang putih masih terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a. Agar penetapan CP CL tidak terlambat pada tahun 2019, maka proses penetapan CP CL dilaksanakan pada akhir bulan Desember dan kelompok tani penerima bantuan diprioritaskan kelompok tani yang belum pernah memperoleh bantuan.
- b. Proses penyiapan administrasi untuk pengadaan barang akan dilaksanakan pada awal tahun, proses pengadaan dilaksanakan dengan metode tender cepat, e katalog dan transfer uang.
- c. Dibuat jadwal palang sebagai pedoman pelaksanaan fisik dan surat pernyataan dari kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal tanam yang disepakati.
- d. Dilaksanakan Sekolah Lapang *Good Agriculture Practices* dan Bintek *Good Handling Practices* dengan anggaran dari APBD Kabupaten (anggaran DBHCT) untuk mengatasi keterbatasan SDM petani dalam budidaya bawang putih.
- e. Disarankan penangkar benih bermitra dengan pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan sarana pasca panen untuk perbenihan.



(2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pada 2019, Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut.

Tabel 5.133. Realisasi Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2019

No	SKPD Pelaksana /No.DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 026.04.4.039560/2019	253.768.000	252.564.300	99,53	100,00

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Wirausaha tenaga kerja mandiri melalui pola pendampingan
  - a. Kegiatan wirausaha tenaga kerja mandiri melalui pola pendampingan kejuruan kuliner pembuatan aneka makanan dan masakan di Desa Trasan Kecamatan Bandongan dilaksanakan selama 3 hari pada hari Senin s/d Rabu tanggal 28 s/d 30 Oktober 2019 dengan peserta sebanyak 20 orang. Peserta pelatihan adalah pencari kerja/masyarakat Kabupaten Magelang yang belum bekerja/mempunyai rintisan usaha kuliner. Anggaran kegiatan sebesar Rp70.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp69.779.000,00 atau 99,68% dan realisasi fisik 100%.
  - b. Kegiatan wirausaha tenaga kerja mandiri melalui pola pendampingan menjahit kreasi dilaksanakan pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak.
    - a) Pelatihan di Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 serta Senin dan Selasa tanggal 21-22 Oktober 2019 dengan peserta sebanyak 20 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp70.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp69.807.000,00 atau 99,72% dan realisasi fisik 100%.
    - b) Pelatihan di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak dilaksanakan selama 3 hari pada hari Rabu s/d Jum'at tanggal 23 s/d 25 Oktober 2019 dengan peserta sebanyak 20 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp70.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp69.719.000,00 atau 99,60% dan realisasi fisik 100%.

Setelah selesai mengikuti pembekalan para peserta diberikan bantuan sarana usaha sehingga dapat memajukan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok serta dapat menyerap tenaga kerja dilingkungan sekitarnya.

Layanan dukungan manajemen dengan anggaran Rp253.768.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp43.259.700,00 atau 98,84% serta realisasi fisik 100%





Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya motivasi untuk maju dan wawasan untuk menjadi wirausahawan kecil sehingga perlu dukungan atau pendamping usaha yang handal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan kerja Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagai pendamping usaha sehingga diharapkan usaha peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Pola Pendampingan dapat semakin berkembang dan bisa merekrut tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

(3) Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM

Pada 2019 Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 5.134. Tugas Pembantuan pada  
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019

No	SKPD Pelaksana /No.DIPA	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah / SP DIPA-044.01.4.031906/2019	950.000.000	839.918.000	88,41	100,00

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan Program Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro, dengan sub kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi.

Output kegiatan adalah terbangunnya 1 unit pasar desa dengan 3 bagian bangunan utama yang terdiri dari bangunan utama los pasar yang mampu menampung 80 pedagang; 2 unit toilet; dan 1 unit tempat pembuangan sampah. Sedangkan untuk pembangunan kios akan dialokasikan anggaran dari dana desa, sebagaimana yang tertuang di dalam Petunjuk Teknis dan telah disepakati antara Pemerintah Desa; Koperasi (KSU Kartika Nawa Kajoran) serta Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang. Bangunan kios telah didirikan terlebih dahulu dengan tahap penyelesaian 50% dan dilanjutkan dengan anggaran dana Desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : proses pecah DIPA yang baru tersosialisasikan di bulan April 2019; proses lelang fisik di ULP yang baru bisa mendapatkan pemenang lelang di Akhir Agustus 2019, menyebabkan masa pengerjaan kontrak yang semakin pendek; penyelesaian administrasi APBN khususnya TP yang cukup ketat;

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah segera setelah proses pecah DIPA melakukan koordinasi dengan KPPN terkait hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pengelolaan dana Tugas Pembantuan; melakukan koordinasi terkait proses lelang fisik di ULP supaya bisa dipercepat mengingat waktu dan SDM yang terbatas; koordinasi dengan KPPN terkait tanggal/ waktu penyelesaian keuangan.

Penjelasan masing-masing Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

## Penjelasan Neraca

### (1) ASET

Aset untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.135. Aset TP / UB

ASET	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Aset Lancar	815.918.000,00	4.770.488.221,00
Aset Tetap	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>815.918.000,00</b>	<b>4.770.488.221,00</b>

### (2) KEWAJIBAN

Kewajiban untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.136. Kewajiban TP / UB

KEWAJIBAN	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### (3) EKUITAS

Ekuitas untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.137. Ekuitas TP / UB

EKUITAS	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
Ekuitas	815.918.000,00	4.770.488.221,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>815.918.000,00</b>	<b>4.770.488.221,00</b>

## Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

### (1) PENDAPATAN

Pendapatan Negara terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas serta Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas. Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019, sebagai berikut:

Tabel 5.138. Pendapatan TP / UB

Pendapatan Negara	2019		Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	41.255.750,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Negara</b>	<b>0,00</b>	<b>41.255.750,00</b>	<b>0,00</b>



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Untuk Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas Tahun 2019 dan Tahun 2018 realisasinya Rp41.255.750,00 dan Rp0,00.

**(2) BELANJA**

Belanja Negara meliputi Belanja Transaksi Kas dan Belanja Transaksi Non Kas. Belanja Transaksi Kas dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019, sebagai berikut:

Tabel 5.139. Belanja TP / UB

Belanja Negara	2019		Realisasi 2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang	15.093.768.000,00	13.941.955.025,00	23.474.125.460,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>15.093.768.000,00</b>	<b>13.941.955.025,00</b>	<b>23.474.125.460,00</b>

**(3) PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Negara meliputi Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Untuk Tahun 2019 tidak dianggarkan.

**Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Ekuitas awal sejumlah Rp32.542.221,00 yang merupakan saldo akhir Neraca Tahun 2018.
- (2) Surplus/defisit LO sejumlah (Rp13.117.323.496,00) berasal dari Laporan Operasional.
- (3) Transaksi antar entitas sejumlah Rp1.092.482.300,00.
- (4) Kenaikan/penurunan ekuitas sejumlah Rp13.624.134.975,00 merupakan penurunan ekuitas pada Tahun 2019.
- (5) Nilai Ekuitas Akhir Rp815.918.000,00 yang merupakan nilai akhir Neraca Tahun 2019.

**Penjelasan Laporan Operasional**

Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan:  
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.800.000,00
- (2) Beban sebesar Rp13.125.873.496,00 terdiri dari:
  - (a) Beban Persediaan sebesar Rp20.768.250,00
  - (b) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp215.430.000,00
  - (c) Beban Pemeliharaan sebesar Rp0,00
  - (d) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp274.375.050,00
  - (e) Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp12.615.463.725,00
  - (f) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp0,00.



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- (g) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp163.529,00  
 (3) Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Operasional sebesar (Rp13.124.073.496,00).  
 (4) Pendapatan dari kegiatan non operasional sebesar Rp6.750.000,00.  
 (5) Beban dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00.  
 (6) Surplus/ (Defisit) LO adalah (Rp13.117.323.496,00).

**e. DANA DEKONSENTRASI**

Anggaran Dana Dekonsentrasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp5.568.547.600,00 dengan realisasi sebesar Rp5.032.570.990,00 atau sebesar 90,37% dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 5.140. Laporan Realisasi Dana Dekonsentrasi

No	Instansi	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	Fisik	
			Rp	Rp	%	%
1.	DISTANPANGAN	DEKONSENTRASI				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian				
		1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1.524.000.000	1.469.910.000	96,45	100,00
		2 Perluasan dan perlindungan lahan pertanian	50.000.000	0	0,00	30,00
		3 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	636.126.000	435.376.000	68,44	100,00
		4 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lain	1.468.503.000	1.449.472.000	98,70	100,00
		5 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	258.600.000	206.912.000	80,01	100,00
		6 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	106.490.000	4.800.000	4,51	50,00
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan				
		7 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	200.000.000	200.000.000	100,00	100,00
		8 Dukungan manajemen dan teknis lainnya	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
		9 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman pangan	646.040.000	646.040.000	100,00	100,00
		<b>Jumlah</b>	<b>4.909.759.000</b>	<b>4.432.510.000</b>	<b>90,28</b>	<b>98,20</b>
2.	DINSOS PPKB PPPA	DEKONSENTRASI				
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN				
		1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00
		Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
		2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	12.825.000	12.825.000	100,00	100,00
		3 Kesertaan Ber-KB melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar Pelayanan	234.564.100	232.664.100	99,19	100,00
		4 Pembinaan Pembangunan Keluarga di seluruh Tingkatan Wilayah	21.525.000	21.525.000	100,00	100,00
		5 Penggerakkan Stakeholder, Mitra Kerja, serta Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat, Berdasarkan Data dan Informasi yang Berbasis IT dalam Program KKBPK	265.749.500	216.121.890	81,33	95,00



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Instansi	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
			Rp	Rp	%	%
		6 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai calon ibu	28.145.000	28.145.000	100,00	100,00
		<b>Jumlah</b>	<b>565.208.600</b>	<b>513.680.990</b>	<b>90,88</b>	<b>97,65</b>
3.	DISPERINAHER	DEKONSENTRASI				
		Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja				
		1 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	49.930.000	42.730.000	85,58	100,00
		<b>Jumlah</b>	<b>49.930.000</b>	<b>42.730.000</b>	<b>85,58</b>	<b>100,00</b>
4.	DINKES	DEKONSENTRASI				
		1 Monitoring Evaluasi JKN Kabupaten / Kota	43.650.000	43.650.000	100,00	100,00
		<b>Jumlah</b>	<b>43.650.000</b>	<b>43.650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Jumlah Total</b>	<b>5.568.547.600</b>	<b>5.032.570.990</b>	<b>90,37</b>	<b>98,18</b>

**f. DANA APBN**

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBN tahun 2019 adalah sebesar Rp272.101.188.758,00 dengan realisasi sebesar Rp249.964.794.993,00 atau sebesar 91,86% dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 5.50**.

**g. DANA APBD PROVINSI**

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBD Provinsi tahun 2019 adalah sebesar Rp19.502.167.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.498.211.000,00 atau sebesar 99,98% dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 5.51**.



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN SKPD**

**1. Domisili Entitas**

Pemerintah Kabupaten Magelang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).

**2. Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah**

Memenuhi amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan terjadi perubahan struktur perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku mulai 6 Oktober 2016.

Tabel 6.1. Perubahan Struktur OPD

No.	SKPD Lama	SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Tipe A;
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Tipe A;
3	Inspektorat	Inspektorat Tipe A;
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
5	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Tipe A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
7	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C
8	Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Prajadan Penanggulangan Kebakaran Tipe A
9	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
10	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A
11	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
13	Bapermaspuan & KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
14	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Tipe B
15	DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A
16	BPMPPT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
17	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakandan Perikanan Tipe A
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A
20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A
21	Dinas Perdagangan dan Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A



Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD Lama	SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)
22	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A
23	DPPKAD	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
24	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A
25	Kecamatan Salaman;	Kecamatan Salaman;
26	Kecamatan Borobudur;	Kecamatan Borobudur;
27	Kecamatan Ngluwar;	Kecamatan Ngluwar;
28	Kecamatan Salam;	Kecamatan Salam;
29	Kecamatan Srumbung;	Kecamatan Srumbung;
30	Kecamatan Dukun;	Kecamatan Dukun;
31	Kecamatan Sawangan;	Kecamatan Sawangan;
32	Kecamatan Muntilan;	Kecamatan Muntilan;
33	Kecamatan Mungkid;	Kecamatan Mungkid;
34	Kecamatan Mertoyudan;	Kecamatan Mertoyudan;
35	Kecamatan Tempuran;	Kecamatan Tempuran;
36	Kecamatan Kajoran;	Kecamatan Kajoran;
37	Kecamatan Kaliangkrik;	Kecamatan Kaliangkrik;
38	Kecamatan Bandongan;	Kecamatan Bandongan;
39	Kecamatan Candimulyo;	Kecamatan Candimulyo;
40	Kecamatan Pakis;	Kecamatan Pakis;
41	Kecamatan Ngablak;	Kecamatan Ngablak;
42	Kecamatan Grabag;	Kecamatan Grabag;
43	Kecamatan Tegalrejo;	Kecamatan Tegalrejo;
44	Kecamatan Secang;	Kecamatan Secang; dan
45	Kecamatan Windusari.	Kecamatan Windusari.

Sementara SKPD yang tidak berubah adalah sebanyak 12 SKPD, yaitu:

- a. Kantor Kesbangpol;
- b. RSUD Muntilan;
- c. Kelurahan Muntilan;
- d. Kelurahan Mendut;
- e. Kelurahan Sawitan;
- f. Kelurahan Sumberrejo;
- g. Kelurahan Secang;
- h. BPPKP;
- i. BPBD;
- j. DPRD;
- k. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH dan WKDH); dan
- l. PPKD.

Beberapa hal terkait perubahan perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong



Praja, tetap melaksanakan tugas sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- b. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tetap melaksanakan tugas.
- d. Sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berbentuk rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. UPT yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

### **3. Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang**

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Magelang berencana mengadakan kegiatan penegasan batas dengan Kabupaten Magelang, namun kegiatan tersebut baru terlaksana pada Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Sebagai tindak lanjut dari rencana penegasan tersebut pada tanggal 23 Januari 2007 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Bupati Magelang dengan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 01/PERJ/I/2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

Kegiatan tersebut berhasil menegaskan batas antara kota Magelang dengan Kecamatan Bandongan, Kecamatan Secang dan Kecamatan Tegalrejo di Kabupaten Magelang dengan telah ditandatanganinya Berita Acara pada Tahun 2009. Sedangkan perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang di sisi Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan yang meliputi sebagian dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan di





Kabupaten Magelang dengan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Jurangombo, Kelurahan Magersari dan Kelurahan Tidar di Kota Magelang belum dapat disepakati karena pihak Kota Magelang tidak bersedia menerima penggunaan dokumen berupa peta desa (menitplan) dari Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan yang telah dengan jelas menunjukkan batas kedua wilayah.

Pada tahun 2008 telah disepakati batas-batas antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang di sisi Utara, Barat dan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Magelang. Dimana salah satu dokumen yang digunakan untuk penegasan batas di sisi Utara Barat dan Timur tersebut adalah peta desa dan buku C desa.

Sesuai dengan ketentuan dan Permendagri bahwa apabila terdapat permasalahan batas antara dua daerah dalam satu wilayah provinsi maka Gubernur memfasilitasi untuk penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut Gubernur Jateng telah berkali-kali mengadakan pertemuan untuk mediasi penyelesaian permasalahan tersebut, namun tetap tidak dapat menghasilkan keputusan. Hasil mediasi oleh Gubernur tersebut kemudian disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat untuk dimintakan keputusan.

Pada tanggal 10 Pebruari 2016, Bupati Magelang beserta tim diundang oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri untuk bertemu dengan Walikota Magelang dan Tim. Hasil pertemuan diberikan 4 alternatif batas dan dimohon kepada masing-masing daerah untuk memilih salah satu dari keempat alternatif tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memilih alternatif ketiga dengan catatan tambahan yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.



## BAB VII

### PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

 **BUPATI MAGELANG**  
  
**LAENAL ARIFIN, S.IP**